

BUKU II - LAPORAN UTAMA
DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
(SLHD) KOTA PONTIANAK
TAHUN 2026



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**PERNYATAAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) disusun sebagai bentuk penyediaan data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan akuntabel mengenai kondisi, permasalahan, serta pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan terukur terkait isu-isu prioritas lingkungan hidup di Kota Pontianak, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang melibatkan para pemangku kepentingan secara partisipatif. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 telah disusun dengan memuat isu prioritas daerah yang ditetapkan melalui proses partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Adapun isu prioritas lingkungan hidup Kota Pontianak Tahun 2025 meliputi:

- (1) Pengelolaan Sampah Perkotaan;
- (2) Penurunan Kualitas Air Permukaan;
- (3) Genangan Air Perkotaan

Demikian Surat Pernyataan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kota Pontianak ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, April 2026

Wali Kota Pontianak



Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T.

BUKU II - LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)
KOTA PONTIANAK - TAHUN 2026

**PERNYATAAN MENGENAI INOVASI DAERAH**

Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 telah memuat dan mengakomodasi inovasi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seluruh inovasi yang dicantumkan dalam Dokumen SLHD Kota Pontianak Tahun 2026 telah disusun berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh inovasi yang dicantumkan dalam Dokumen SLHD Kota Pontianak Tahun 2026 telah disusun berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kota Pontianak:

1. GALAH BUNG SAM (Gerakan Memilah dan Menabung Sampah) di Sekolah
2. Memilah Sampah Menabung Emas
3. SI GITA JAS BERKERAH (Sistem Digital Jasa Angkutan Sampah dari Sumber yang Keren dan Ramah)
4. SIPEKA (Sistem Pemantauan Kualitas Air)
5. Hutan Sekolah

Demikian Surat Pernyataan mengenai Inovasi Daerah Kota Pontianak dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, April 2026

Wali Kota Pontianak



Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T.



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Aliyong Nomor 7D Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telp. (0561) 8171726
Laman www.dlh.pontianak.go.id

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. SY. Usmulyono, M.T.

NIP : 196710171997031002

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Menyatakan bahwa seluruh data yang disajikan dalam Dokumen Status Lingkungan Hidup (SLHD) Kota Pontianak tahun 2026 merupakan data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, April 2026

Mengetahui,

Wali Kota Pontianak

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Pontianak



Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T.



Ir. SY. Usmulyono, M.T.

BUKU II - LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)
KOTA PONTIANAK - TAHUN 2026

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 disusun sebagai sarana penyediaan informasi mengenai kondisi, permasalahan, dan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pontianak. Dokumen ini juga berisikan isu prioritas di Kota Pontianak Tahun 2025 beserta inovasi dan regulasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk menangani isu tersebut demi meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pontianak.

Data-data yang disajikan dalam dokumen ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dokumen ini diharapkan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyampaian informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Semoga adanya Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 dapat memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Pontianak.

Pontianak, April 2026

Wali Kota Pontianak



Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
PERNYATAAN MENGENAI INOVASI DAERAH	ii
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Proses Penyusunan Dokumen SLHD	I-3
1.3 Profil atau Keadaan Umum Daerah.....	I-5
1.3.1 Kondisi Ekologis	I-6
1.3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	I-40
1.3.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	I-45
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-48
1.5 Ruang Lingkup Penulisan.....	I-48
BAB II ANALISIS ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.....	II-1
2.1 Keanekaragaman Hayati	II-4
A. Driving Force	II-4
B. Pressure	II-8
C. State	II-10
D. Impact.....	II-15
E. Response.....	II-16

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

2.2	Kualitas Air	II-24
A.	Driving Force	II-24
B.	Pressure	II-28
C.	State	II-30
D.	Impact	II-33
E.	Response.....	II-35
2.3	Laut, Pesisir, dan Pantai	II-38
A.	Driving Force	II-38
B.	Pressure	II-40
C.	State	II-41
D.	Impact	II-44
E.	Response.....	II-45
2.4	Kualitas Udara.....	II-45
A.	Driving Force	II-45
B.	Pressure	II-47
C.	State	II-49
D.	Impact	II-52
E.	Response.....	II-55
2.5	Lahan dan Hutan.....	II-59
A.	Driving Force	II-59
B.	Pressure	II-61
C.	State	II-63
D.	Impact	II-65
E.	Response.....	II-66
2.6	Pengelolaan Sampah dan Limbah	II-71

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

A.	Driving Force	II-71
B.	Pressure	II-76
C.	State	II-77
D.	Impact	II-81
E.	Response.....	II-83
2.7	Perubahan Iklim.....	II-94
A.	Driving Force	II-94
B.	Pressure	II-96
C.	State	II-99
D.	Impact	II-100
E.	Response.....	II-102
2.8	Risiko Bencana.....	II-109
A.	Driving Force	II-109
B.	Pressure	II-111
C.	State	II-112
D.	Impact	II-114
E.	Response.....	II-115
BAB III	ISU PRIORITAS, RESPON, DAN INOVASI	III-1
3.1	Penetapan Isu Prioritas dan Rencana Penyelesaian.....	III-1
3.1.1	Proses Perumusan Isu Prioritas	III-1
3.1.2	Penyaringan dan Penilaian Isu Prioritas	III-2
3.1.3	Penetapan Isu Prioritas.....	III-3
3.1.4	Rencana Penyelesaian (Respon) Isu Prioritas	III-5
3.1.5	Pengelolaan Sampah Perkotaan	III-6
3.1.6	Penurunan Kualitas Air Permukaan	III-12

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

3.1.7 Genangan Air Perkotaan	III-18
3.2 Progres Implementasi Rencana Penyelesaian Isu Prioritas.....	III-28
3.3 Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	III-37
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Saran.....	V-3
DAFTAR PUSTAKA	xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Daerah Kota Pontianak Menurut Kecamatan	I-7
Tabel 1. 2 Rata-Rata Suhu Dan Rata-Rata Curah Hujan Bulanan Kota Pontianak Tahun 2024	I-10
Tabel 1. 3 Persebaran Sungai dan Parit di Kota Pontianak.....	I-13
Tabel 1. 4 Jenis Tanah Kota Pontianak.....	I-19
Tabel 1. 5 Tutupan Lahan Kota Pontianak.....	I-19
Tabel 1. 6 Jumlah Rumah Sakit Umum Kota Pontianak	I-23
Tabel 1. 7 Jumlah Puskesmas dan Klinik Pratama Kota Pontianak	I-23
Tabel 1. 8 Jumlah Posyandu dan Rumah Sakit Bersalin Kota Pontianak	I-24
Tabel 1. 9 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Pontianak	I-24
Tabel 1. 10 Jumlah Satuan Pendidikan di Kota Pontianak.....	I-27
Tabel 1. 11 Jumlah Kepala Sekolah dan Pendidik di Kota Pontianak.....	I-27
Tabel 1. 12 Jumlah Peserta Didik di Kota Pontianak.....	I-28
Tabel 1. 13 Produksi Serealial Pokok dan Umbi-Umbian Tahun 2023	I-29
Tabel 1. 14 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan (Kuintal) di Kota Pontianak 2022-2025	I-30
Tabel 1. 15 Produksi Daging, Telur, Susu dan Kulit di Kota Pontianak 2023-2025.....	I-31
Tabel 1. 16 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) di Kota Pontianak 2021-2024	I-32
Tabel 1. 17 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN menurut Bulan di Kota Pontianak, 2025.....	I-33
Tabel 1. 18 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak.....	I-35
Tabel 1. 19 Realisasi Belanja Daerah Kota Pontianak (dalam Rp. Miliar)	I-36
Tabel 1. 20 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pontianak (dalam Rp. Miliar)	I-37
Tabel 1. 21 Obyek Wisata di Kota Pontianak	I-38

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Tabel 1. 22 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Pontianak (km), 2023-2025	I-39
Tabel 1. 23 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Pontianak (km), 2022-2024.....	I-40
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah	II-5
Tabel 2. 2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku.....	II-7
Tabel 2. 3 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan.....	II-7
Tabel 2. 4 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama.....	II-9
Tabel 2. 5 Indeks Kinerja Tutupan Lahan (IKTL)	II-10
Tabel 2. 6 Kenakearagaman Hayati Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Jenis Tahun 2025	II-11
Tabel 2. 7 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi Kota Pontianak	II-19
Tabel 2. 8 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Pontianak.....	II-19
Tabel 2. 9 Data Taman Kehati.....	II-22
Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah	II-25
Tabel 2. 11 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	II-26
Tabel 2. 12 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan	II-27
Tabel 2. 13 Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Bersih.....	II-29
Tabel 2. 14 Indeks Kualitas Air	II-30
Tabel 2. 15 Kualitas Air Sungai	II-31
Tabel 2. 16 Penyakit Utama Yang Diderita Masyarakat.....	II-34
Tabel 2. 17 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama	II-41
Tabel 2. 18 Indeks Kualitas Air	II-42
Tabel 2. 19 Kualitas Air Sungai	II-43
Tabel 2. 20 Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor.....	II-47

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Tabel 2. 21 Perubahan Ruas Jalan.....	II-49
Tabel 2. 22 Kualitas Udara Ambien Kota Pontianak.....	II-49
Tabel 2. 23 Indeks Kualitas Udara Kota Pontianak	II-51
Tabel 2. 24 Suhu Udara Rata-Rata Bulanan.....	II-52
Tabel 2. 25 Curah Hujan Rata-Rata Bulanan.....	II-52
Tabel 2. 26 Penyakit Utama Yang Diderita Masyarakat.....	II-55
Tabel 2. 27 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi Kota Pontianak	II-58
Tabel 2. 28 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama	II-62
Tabel 2. 29 Perubahan Ruas Jalan.....	II-63
Tabel 2. 30 Indeks Kinerja Tutupan Lahan (IKTL).....	II-64
Tabel 2. 31 Capaian RTH Kota Pontianak	II-65
Tabel 2. 32 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi Kota Pontianak	II-67
Tabel 2. 33 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Pontianak.....	II-69
Tabel 2. 34 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah	II-72
Tabel 2. 35 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku.....	II-74
Tabel 2. 36 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan.....	II-74
Tabel 2. 37 Jumlah Rumah Tangga Miskin	II-77
Tabel 2. 38 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	II-79
Tabel 2. 39 Capaian Pengurangan dan Daur Ulang Sampah	II-80
Tabel 2. 40 Penyakit Utama Yang Diderita Masyarakat.....	II-82
Tabel 2. 41 Daftar Bank Sampah di Kota Pontianak	II-84
Tabel 2. 42 Fasilitas TPST/TPS3R di Kota Pontianak.....	II-87
Tabel 2. 43 Perusahaan Pengelola Limbah B3 Berizin.....	II-93
Tabel 2. 44 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama	II-96
Tabel 2. 45 Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor.....	II-96
Tabel 2. 46 Tingkat Emisi GRK Masing-Masing Sektor	II-98

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Tabel 2. 47 Curah Hujan Rata-Rata Bulanan.....	II-99
Tabel 2. 48 Suhu Udara Rata-Rata Bulanan.....	II-100
Tabel 2. 49 Jumlah Kecamatan Berdasarkan Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim	II-100
Tabel 2. 50 Kejadian Bencana di Kota Pontianak	II-101
Tabel 2. 51 Pengurangan Emisi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Kota Pontianak Tahun 2024	II-103
Tabel 2. 52 Aksi Adaptasi Perubahan Iklim	II-106
Tabel 2. 53 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi Kota Pontianak	II-108
Tabel 2. 31 Capaian RTH Kota Pontianak	II-108
Tabel 2. 54 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah	II-109
Tabel 2. 55 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama	II-111
Tabel 2. 56 Indeks Resiko Bencana Kota Pontianak	II-112
Tabel 2. 57 Kejadian Bencana di Kota Pontianak	II-113
Tabel 3. 1 Indeks Kualitas Air	III-12
Tabel 3. 2 Luas Area Rawan Genangan Kota Pontianak.....	III-19
Tabel 3. 3 Data Saluran Terbangun Kota Pontianak	III-33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kota Pontianak	I-8
Gambar 1. 2 Persentase Luasan Kota Pontianak per Kecamatan	I-9
Gambar 1. 3 Peta Topografi Kota Pontianak	I-12
Gambar 1. 4 Peta Hidrologi Kota Pontianak	I-15
Gambar 1. 5 Peta Tutupan Lahan Kota Pontianak.....	I-20
Gambar 1. 6 Angka Usia Harapan Hidup Kota Pontianak	I-21
Gambar 1. 7 Jumlah Kasus Gizi Buruk di Kota Pontianak	I-22
Gambar 1. 8 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pontianak.....	I-25
Gambar 1. 9 Harapan Lama Sekolah di Kota Pontianak	I-26
Gambar 1. 10 Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungn Hidup Kota Pontianak.....	I-44
Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025	II-6
Gambar 2. 2 Produksi Buah-Buahan Kota Pontianak, 2025	II-12
Gambar 2. 3 Produksi Sayuran Kota Pontianak, 2025	II-13
Gambar 2. 4 Populasi Unggas di Kota Pontianak, 2025	II-14
Gambar 2. 5 Produksi Tanaman Hias Kota Pontianak, 2025.....	II-15
Gambar 2. 6 Sosialisasi Sekolah Adiwiyata	II-17
Gambar 2. 7 Sosialisasi Konsep Baru Adipura	II-17
Gambar 2. 8 FGD Kolaborasi pemerintah dan Penggiat Lingkungan	II-18
Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025	II-25
Gambar 2. 10 Grafik Indeks Kualitas Air	II-31
Gambar 2. 11 Pemantauan Kualitas Air Permukaan Manual dan Onlimo .	II-35
Gambar 2. 12 Aksi Jumat Bersih	II-36
Gambar 2. 13 Aplikasi SIPEKA	II-36
Gambar 2. 14 Pengisolasian Pencemaran	II-36
Gambar 2. 15 Pemulihan Lingkungan Terkontamintasi LB3	II-37

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Gambar 2. 16 Uji Kualitas Air Limbah Kegiatan Usaha	II-37
Gambar 2. 17 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025.....	II-39
Gambar 2. 18 Grafik Indeks Kualitas Air	II-43
Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025.....	II-46
Gambar 2. 20 Jumlah Industri Besar-Sedang Kota Pontianak Tahun 2022- 2025	II-48
Gambar 2. 21 Indeks Kualitas Udara Kota Pontianak Tahun 2021-2025..	II-51
Gambar 2. 22 ISPU Menunjukkan Kualitas Udara Tercatat Tidak Sehat	II-54
Gambar 2. 23 Alat Pemantauan (AQMS) dan Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara	II-56
Gambar 2. 24 Pemantauan Emisi Kegiatan Usaha	II-57
Gambar 2. 25 Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor	II-59
Gambar 2. 26 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025.....	II-60
Gambar 2. 27 Peta Rencana Pola Ruang	II-68
Gambar 2. 28 Peta Jaringan Drainase.....	II-70
Gambar 2. 29 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025.....	II-73
Gambar 2. 30 Grafik Pengelolaan Sampah Kota Pontianak	II-78
Gambar 2. 31 Armada Pengangkut Sampah	II-84
Gambar 2. 32 Bank Sampah di Kota Pontianak	II-86
Gambar 2. 33 TPST/TPS3R di Kota Pontianak.....	II-87
Gambar 2. 34 Fasilitas Biodisgester	II-88
Gambar 2. 35 Larva BSF	II-89
Gambar 2. 36 Bahan Bakar Hasil Pirolisis	II-89
Gambar 2. 37 Larangan Penggunaan Kantong Plastik	II-91
Gambar 2. 38 Kegiatan GALAHBUNGSAM.....	II-92
Gambar 2. 39 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025.....	II-95
Gambar 2. 40 Jumlah Industri Besar-Sedang Kota Pontianak Tahun 2022- 2025	II-97
Gambar 2. 41 Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor	II-106

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Gambar 2. 42 Penyerahan Penghargaan Proklamasi	II-107
Gambar 2. 41 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025...	II-110
Gambar 3. 1 Peta Pola Genangan di Kota Pontianak	III-20
Gambar 3. 2 Pengukuran Ketinggian Muka Air dengan <i>Peil Scale</i>	III-21
Gambar 3. 3 <i>Water Level Meter</i> Tahun 2025	III-21
Gambar 3. 4 Kondisi Saluran Drainase Kota Pontianak	III-23
Gambar 3. 5 Kegiatan Normalisasi Parit dan Drainase	III-25
Gambar 3. 6 Kegiatan Pembangunan Turap	III-25
Gambar 3. 7 Rekomendasi <i>Peil</i> Banjir Untuk Bangunan Baru	III-26
Gambar 3. 8 Standar Pembangunan Jembatan	III-27
Gambar 3. 9 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Drainase	III-28
Gambar 3. 10 Kegiatan Bersih Parit Bersama Masyarakat.....	III-28
Gambar 3. 11 Grafik Data Saluran Drainase Terbangun Kota Pontianak	III-34
Gambar 3. 12 Kondisi Saluran Drainase Sebelum Pemeliharaan dan Setelah Pemeliharaan.....	III-34
Gambar 3. 13 Kondisi Saluran/Parit Sebelum Normalisasi dan Setelah Normalisasi.....	III-34
Gambar 3. 14 Kondisi Saluran/Parit Sebelum Normalisasi dan Setelah Normalisasi.....	III-35
Gambar 3. 15 Operasional Pompa dan Pintu Air Saat Curah Hujan Meningkat	III-35
Gambar 3. 16 Pembangunan Turap dan Sheet Pile Mini Untuk Penanganan Jangka Panjang	III-35
Gambar 3. 17 Skema Rencana Sistem Polder di Kota Pontianak.....	III-46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan bagian dari hak dasar setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi negara. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang mengamanatkan agar setiap proses pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan fungsi lingkungan. Regulasi ini menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan daya dukung lingkungan sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah membangun mekanisme pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH). Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat juga merupakan perwujudan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Di tingkat daerah, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data lingkungan hidup dirumuskan dalam suatu dokumen resmi yang berfungsi sebagai instrumen evaluasi sekaligus rujukan dalam penyusunan kebijakan berbasis lingkungan.

Perjalanan penyusunan dokumen tersebut mengalami beberapa penyesuaian nomenklatur. Pada periode sebelum tahun 2017, pemerintah daerah menyusun dokumen dengan nama Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang berfokus pada penyajian gambaran kondisi lingkungan hidup secara umum. Memasuki tahun 2017, terjadi perubahan menjadi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), yang menitikberatkan pada evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah dalam

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan ini juga terintegrasi dengan sistem evaluasi tingkat nasional. Hingga tahun pelaporan 2024, penyusunan dokumen masih menggunakan nomenklatur DIKPLHD sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya, pada periode pelaporan tahun 2025 yang penyusunannya dilaksanakan pada tahun 2026, dilakukan penyesuaian kembali terhadap nomenklatur menjadi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Penyesuaian ini bertujuan untuk menyelaraskan format pelaporan dengan kebutuhan analisis kondisi lingkungan hidup yang lebih terstruktur, sekaligus tetap mempertahankan substansi evaluatif yang telah berkembang pada periode sebelumnya.

Penyusunan SLHD Kota Pontianak Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Pontianak dalam menyediakan informasi lingkungan hidup yang sistematis, mutakhir, dan sesuai dengan karakteristik wilayah perkotaan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan SLHD yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai dasar dalam penetapan struktur, substansi, dan indikator yang digunakan. SLHD Kota Pontianak Tahun 2026 menyajikan gambaran kondisi lingkungan hidup tahun sebelumnya, kecenderungan perubahannya, serta langkah-langkah pengelolaan yang telah dilakukan sebagai respons terhadap berbagai isu lingkungan strategis di daerah.

Dalam proses penyajian data, terdapat beberapa indikator yang tidak ditampilkan atau belum dapat disajikan secara lengkap. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan data sektoral tertentu maupun karena indikator yang dimaksud tidak relevan dengan karakteristik wilayah Kota Pontianak. Penyusunan dokumen ini tetap berpegang pada prinsip ketepatan, kesesuaian, dan kehati-hatian dalam menyajikan informasi agar substansi yang disampaikan tetap kontekstual dan dapat

dipertanggungjawabkan. Penyusunan SLHD Kota Pontianak Tahun 2026 telah diupayakan secara optimal melalui koordinasi intensif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Sinergi dalam penyediaan data dan informasi lintas sektor menjadi elemen penting dalam menghasilkan dokumen yang kredibel serta mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

1.2 Proses Penyusunan Dokumen SLHD

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan berbasis pada pendekatan analisis DPSIR (Driving Force–Pressure–State–Impact–Response) sebagaimana dianjurkan dalam pedoman penyusunan SLHD oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara faktor penggerak pembangunan, tekanan terhadap lingkungan, kondisi eksisting lingkungan hidup, dampak yang ditimbulkan, serta respons kebijakan dan program pengelolaan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tahapan penyusunan diawali dengan kegiatan inventarisasi dan pengumpulan data sebagai dasar penyusunan tabel utama SLHD. Tim Penyusun terlebih dahulu mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan sesuai struktur pedoman dan karakteristik wilayah Kota Pontianak. Data yang dihimpun mencakup indikator faktor penggerak seperti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi; indikator tekanan berupa timbulan sampah, peningkatan kebutuhan air bersih, beban pencemaran, dan perubahan penggunaan lahan; indikator kondisi yang menggambarkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan; indikator dampak terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem; serta indikator respons berupa kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui

koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, serta unit teknis terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Data primer diperoleh dari hasil pemantauan kualitas lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan sektoral dan dokumen resmi pemerintah daerah.

Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk tabel utama sebagai kompilasi awal untuk memastikan kelengkapan indikator, kejelasan sumber data, kesesuaian periode pelaporan, serta konsistensi satuan pengukuran. Setelah data terkumpul dan disusun dalam tabel utama, dilakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan data tersebut benar, lengkap, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya melalui pengecekan kesesuaian angka, pelengkapan data yang masih kurang dengan klarifikasi kepada instansi terkait, serta penyesuaian format penyajian sesuai pedoman penyusunan SLHD guna menjamin informasi yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil kompilasi dan pemeriksaan data tersebut, Tim Penyusun melaksanakan kegiatan perumusan isu lingkungan hidup strategis daerah. Perumusan isu dilakukan melalui forum diskusi dan koordinasi yang melibatkan unsur akademisi, perwakilan OPD terkait, serta organisasi masyarakat/LSM yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan hidup. Forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama, menentukan prioritas isu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya, serta memperoleh pandangan yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan. Hasil perumusan isu strategis selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut menggunakan kerangka DPSIR.

Tahap analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara faktor penggerak pembangunan dengan tekanan yang muncul terhadap lingkungan hidup, kondisi aktual kualitas lingkungan, dampak yang

ditimbulkan, serta respons kebijakan yang telah dilaksanakan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif dengan memperhatikan kecenderungan perubahan dari tahun ke tahun, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika lingkungan hidup di Kota Pontianak. Hasil analisis kemudian dituangkan ke dalam uraian naratif yang dilengkapi dengan tabel, grafik, dan peta tematik untuk memperjelas interpretasi data.

Penyusunan draf dokumen dilakukan sesuai sistematika pedoman SLHD dan selanjutnya dibahas dalam forum koordinasi internal guna memperoleh masukan perbaikan serta harmonisasi substansi antar perangkat daerah. Setelah melalui proses penyempurnaan, dokumen difinalisasi dan ditetapkan sebagai dokumen resmi pemerintah daerah. Seluruh rangkaian proses penyusunan SLHD Kota Pontianak Tahun 2026 dilaksanakan dengan menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif, serta kehati-hatian dalam penyajian data dan informasi, sehingga dokumen yang dihasilkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

1.3 Profil atau Keadaan Umum Daerah

Profil atau Keadaan Umum Daerah dalam dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 disajikan sebagai landasan untuk memahami kondisi dasar wilayah sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Bagian ini mencakup uraian mengenai kondisi ekologis, gambaran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta keterkaitannya dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga memberikan kerangka pemahaman yang utuh terhadap karakteristik wilayah dan isu lingkungan yang berkembang di Kota Pontianak.

1.3.1 Kondisi Ekologis

Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah sekitar 118,209 km² yang terbagi ke dalam 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Secara geografis, wilayah ini dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada pada koordinat antara 0°02'19,868" Lintang Utara hingga 0°05'53,292" Lintang Selatan, serta 109°16'22,758" hingga 109°23'9,618" Bujur Timur.

Berdasarkan luas wilayah administratifnya, Kecamatan Pontianak Utara menjadi kecamatan dengan cakupan wilayah terbesar, yaitu sekitar 34,77 persen dari total luas kota. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Pontianak Selatan sebesar 13,98 persen, Kecamatan Pontianak Barat sebesar 13,86 persen, Kecamatan Pontianak Tenggara sebesar 13,64 persen, Kecamatan Pontianak Kota sebesar 13,55 persen, dan Kecamatan Pontianak Timur sebagai wilayah dengan luas terkecil yaitu 10,20 persen. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki batas-batas wilayah administratif sebagaimana telah ditetapkan yaitu:

- Utara : - Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah
- Selatan : - Desa Pal IX dan Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
 - Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya; dan
 - Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah
- Timur : - Desa Mega Timur dan Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya; dan
 - Desa Kapur dan Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya
- Barat : - Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya; dan
 - Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah

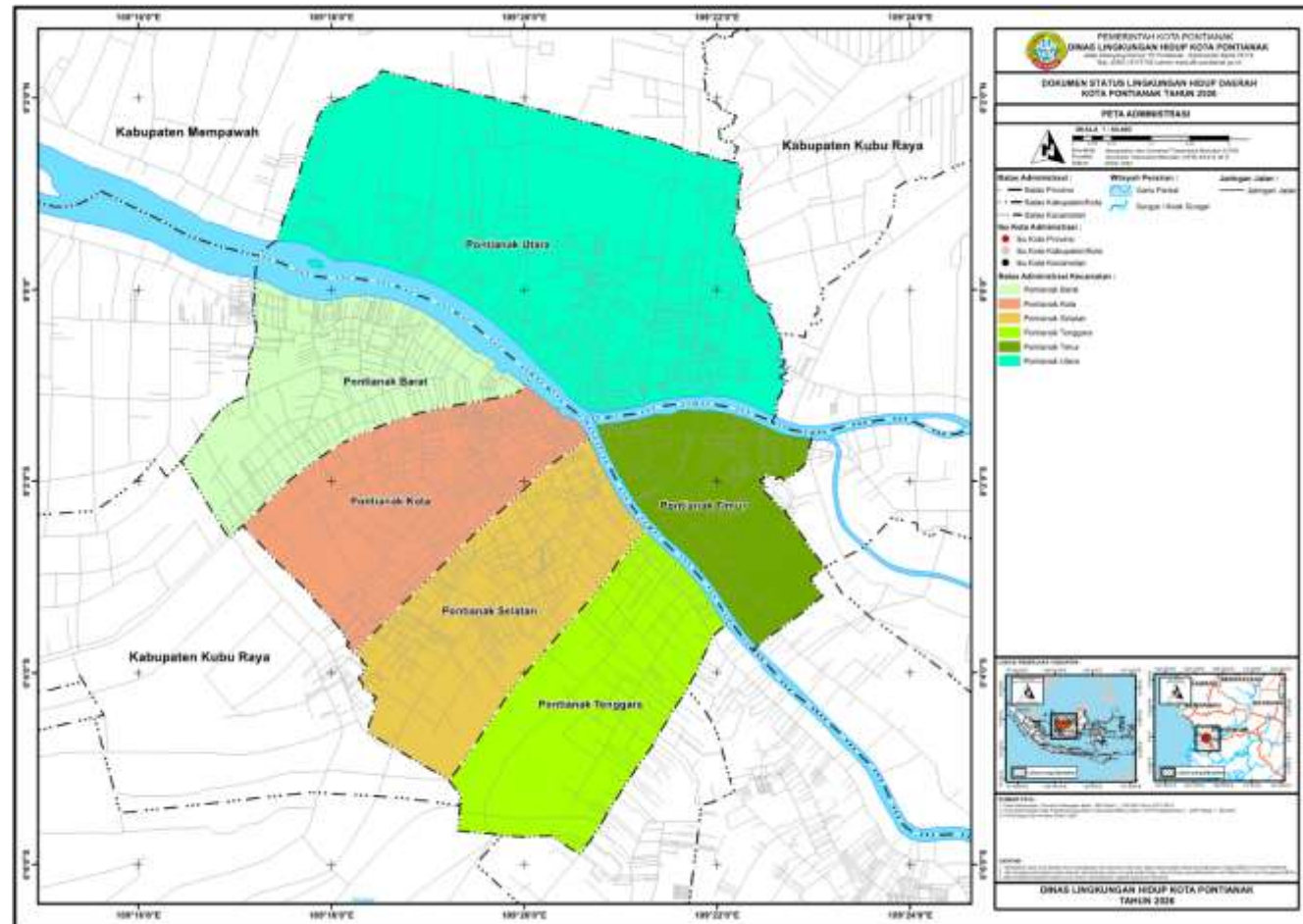
Tabel 1. 1 Luas Daerah Kota Pontianak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Pontianak Selatan	16,524
2	Pontianak Tenggara	16,127
3	Pontianak Timur	12,061
4	Pontianak Barat	16,383
5	Pontianak Kota	16,016
6	Pontianak Utara	41,097
Kota Pontianak		118,209

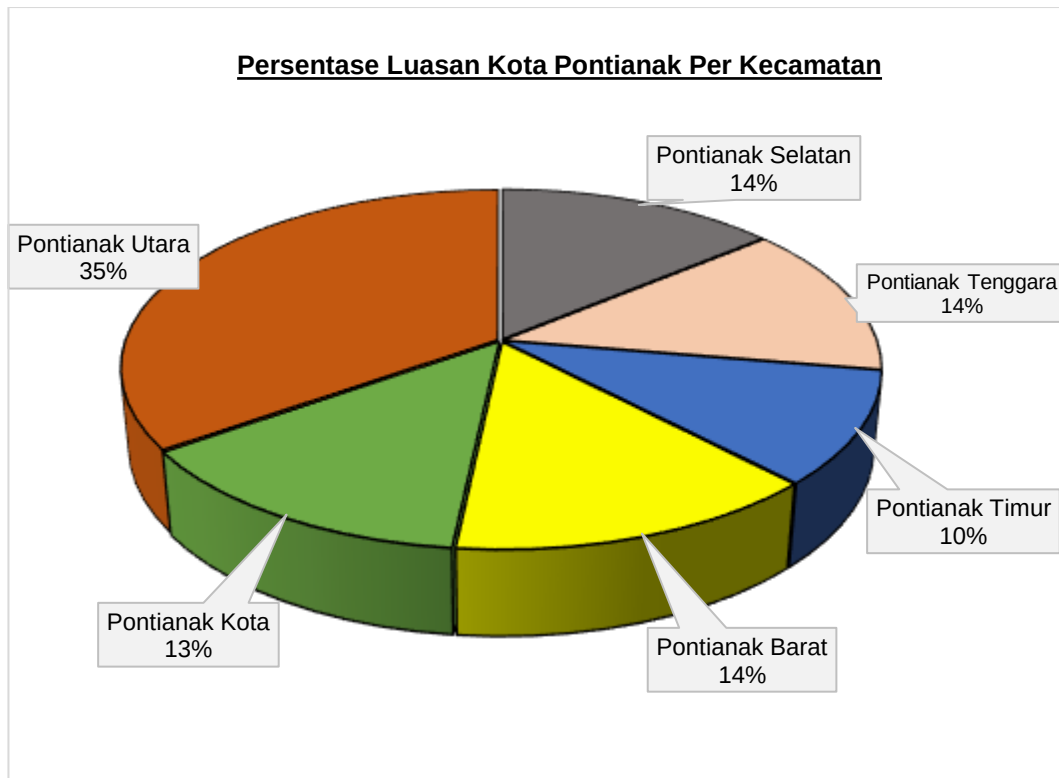
Sumber: Pontianak dalam Angka Tahun 2026

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2026



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kota Pontianak



Gambar 1. 2 Persentase Luasan Kota Pontianak per Kecamatan

1.3.1.1 Klimatologi

Berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kondisi klimatologis Kota Pontianak pada tahun 2025 menunjukkan karakteristik yang relatif konsisten sepanjang tahun. Suhu udara minimum rata-rata tercatat sebesar 23,15°C, sementara suhu maksimum mencapai 34,87°C. Kondisi tersebut didukung oleh tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 82,45%, serta tekanan udara rata-rata sebesar 1.009,31 milibar. Dari aspek dinamika angin, kecepatan angin rata-rata tercatat sebesar 1,67 knot, dengan kecepatan maksimum terjadi pada bulan September yang mencapai 47 knot.

Presipitasi sebagai salah satu unsur utama iklim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aktivitas, khususnya di bidang pertanian. Besar kecilnya curah hujan serta pola penyebarannya sangat menentukan

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

waktu tanam, pemilihan komoditas, pemanfaatan lahan, hingga ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi. Selain itu, akumulasi hujan yang tinggi dalam kurun waktu tertentu juga berpotensi menimbulkan genangan, terutama pada kawasan dengan karakteristik dataran rendah. Berdasarkan kecenderungan yang teridentifikasi, jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, Agustus, dan Oktober, masing-masing tercatat sebanyak 23 hari hujan. Adapun dari sisi intensitas, curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Agustus dengan jumlah mencapai 443,90 mm per bulan. Informasi mengenai suhu rata-rata dan curah hujan bulanan Kota Pontianak secara rinci disajikan pada **Tabel 1.2**.

**Tabel 1. 2 Rata-Rata Suhu Dan Rata-Rata Curah Hujan Bulanan
Kota Pontianak Tahun 2025**

No	Bulan	Rata-rata hari suhu (°C)	Rata-rata curah hujan per bulan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
1	Januari	26,79	382,20	23,00
2	Februari	27,35	165,80	10,00
3	Maret	27,64	361,90	18,00
4	April	27,67	178,80	19,00
5	Mei	29,02	170,30	17,00
6	Juni	28,64	236,50	17,00
7	Juli	28,95	45,80	9,00
8	Agustus	27,54	443,90	23,00
9	September	27,43	384,90	22,00
10	Oktober	27,50	410,90	23,00
11	November	27,65	224,90	18,00
12	Desember	27,63	153,40	16,00
Rata-Rata		27,82	263,28	17,92

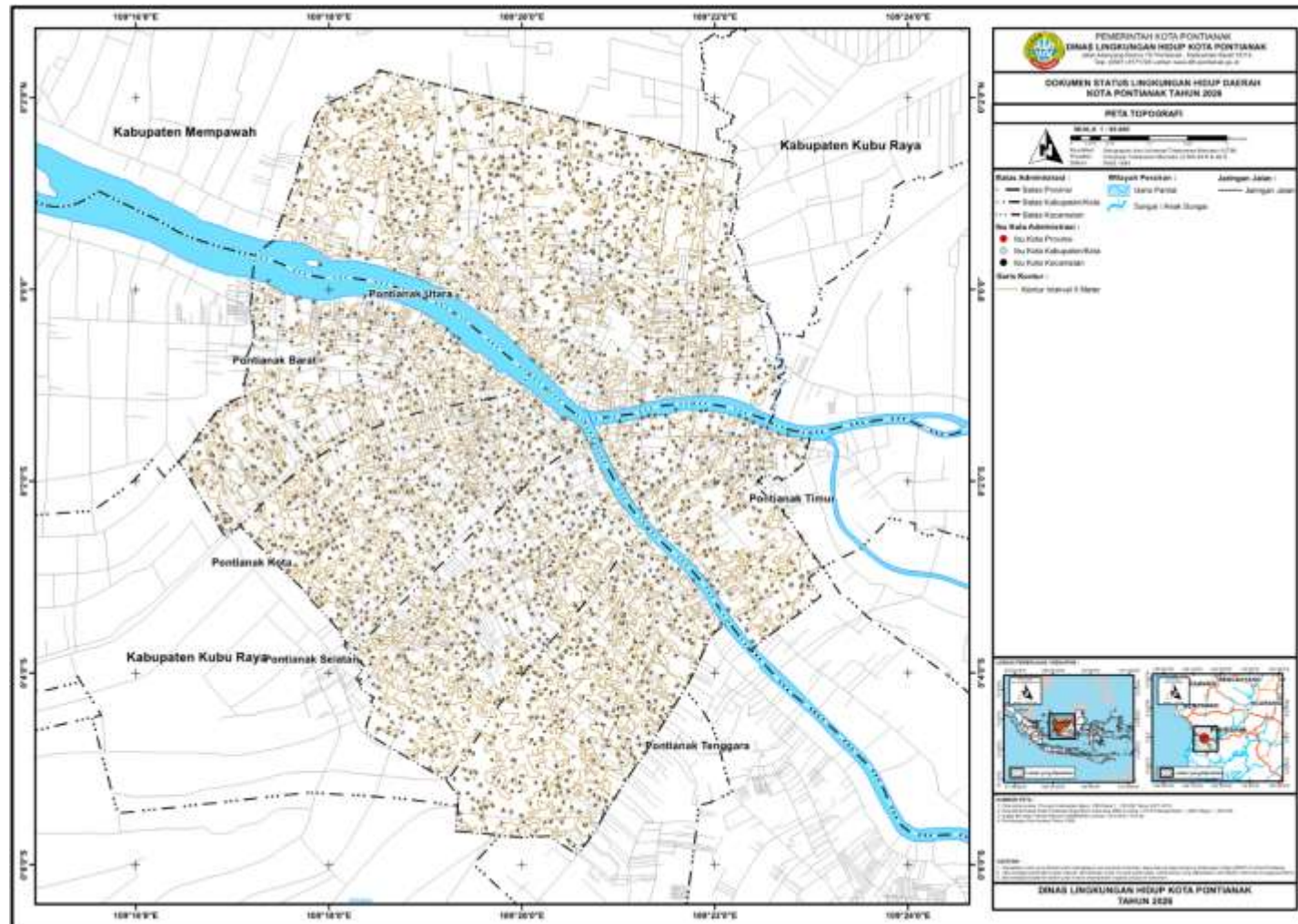
Sumber: Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, 2025

1.3.1.2 Topografi

Kota Pontianak berada pada kawasan delta Sungai Kapuas dengan kondisi topografi yang relatif datar. Ketinggian wilayahnya sangat rendah, berkisar antara 0,1 hingga 1,5 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah kota, khususnya dalam radius sekitar 15 km dari muara Sungai Landak, merupakan dataran rendah dengan elevasi rata-rata 1–2 meter serta kemiringan lahan kurang dari 2 persen. Karakteristik ini menyebabkan wilayah kota cukup rentan terhadap genangan, di mana tinggi muka air saat banjir umumnya mencapai sekitar 50 cm dari permukaan tanah. Hasil pengamatan pasang surut menunjukkan bahwa muka air pasang tertinggi mencapai 2,42 meter dan surut terendah sebesar 0,07 meter, dengan rata-rata muka laut maksimum sekitar 0,89 meter.

Secara morfologi, wilayah Kota Pontianak terbagi menjadi tiga bagian daratan yang dipisahkan oleh aliran Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Lebar sungai utama mencapai sekitar 400 meter dengan kedalaman berkisar antara 12 hingga 16 meter, sedangkan anak-anak sungainya memiliki lebar sekitar 250 meter. Keberadaan sungai-sungai tersebut tidak hanya membentuk batas fisik antar wilayah dengan karakteristik berbeda, tetapi juga berfungsi sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan Kota Pontianak dengan wilayah di sekitarnya.

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)
KOTA PONTIANAK TAHUN 2026



Gambar 1. 3 Peta Topografi Kota Pontianak

1.3.1.3 Kondisi Hidrologi

Kota Pontianak terbagi menjadi 3 bagian daratan oleh Sungai Kapuas Besar, Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Bagian utara meliputi Kecamatan Pontianak Utara, bagian timur meliputi Kecamatan Pontianak Timur dan bagian selatan meliputi Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat, serta bagian tenggara meliputi Kecamatan Pontianak Tenggara. Berikut persebaran sungai dan parit yang ada di Kota Pontianak.

Tabel 1. 3 Persebaran Sungai dan Parit di Kota Pontianak

No.	Nama Sungai/ Saluran	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)
Pontianak Barat			
	S. Nipah Kuning	4,2	16 – 5
	S. Serok	3,2	10 – 4
	Prt Tengah	2,2	-
	S. Beliung	1,8	6-2
Pontianak Kota			
	Sungai Jawi	6,6	15-12
	Prt Jl. Merdeka – Alianyang – Natakusuma	5,75	11,35 – 2,50
Pontianak Selatan			
	S. Raya Dalam	5,5	-
	Prt Besar – Jl. Sulung Lelanang	1,6	7,8 – 5,9
	Prt Tokaya	7,3	16 – 5
	Prt Bansir	7,4	16 – 5
	Prt Bangka	6,0	15,5 – 4,8
	Prt H Husin	5,8	16 – 5,2
	Prt Cahaya Baru	0,7	-
Pontianak Timur			
	Prt. Mayor	8,55	tad
	Prt. Yusuf Karim	0,25	tad
	Prt. Jl. Panglima Aim	3,62	tad
	Prt. Jl. Tani	3,7	tad
Pontianak Utara			
	S. Kunit Baru	4	14,7 – 4,6

BUKU II – LAPORAN UTAMA

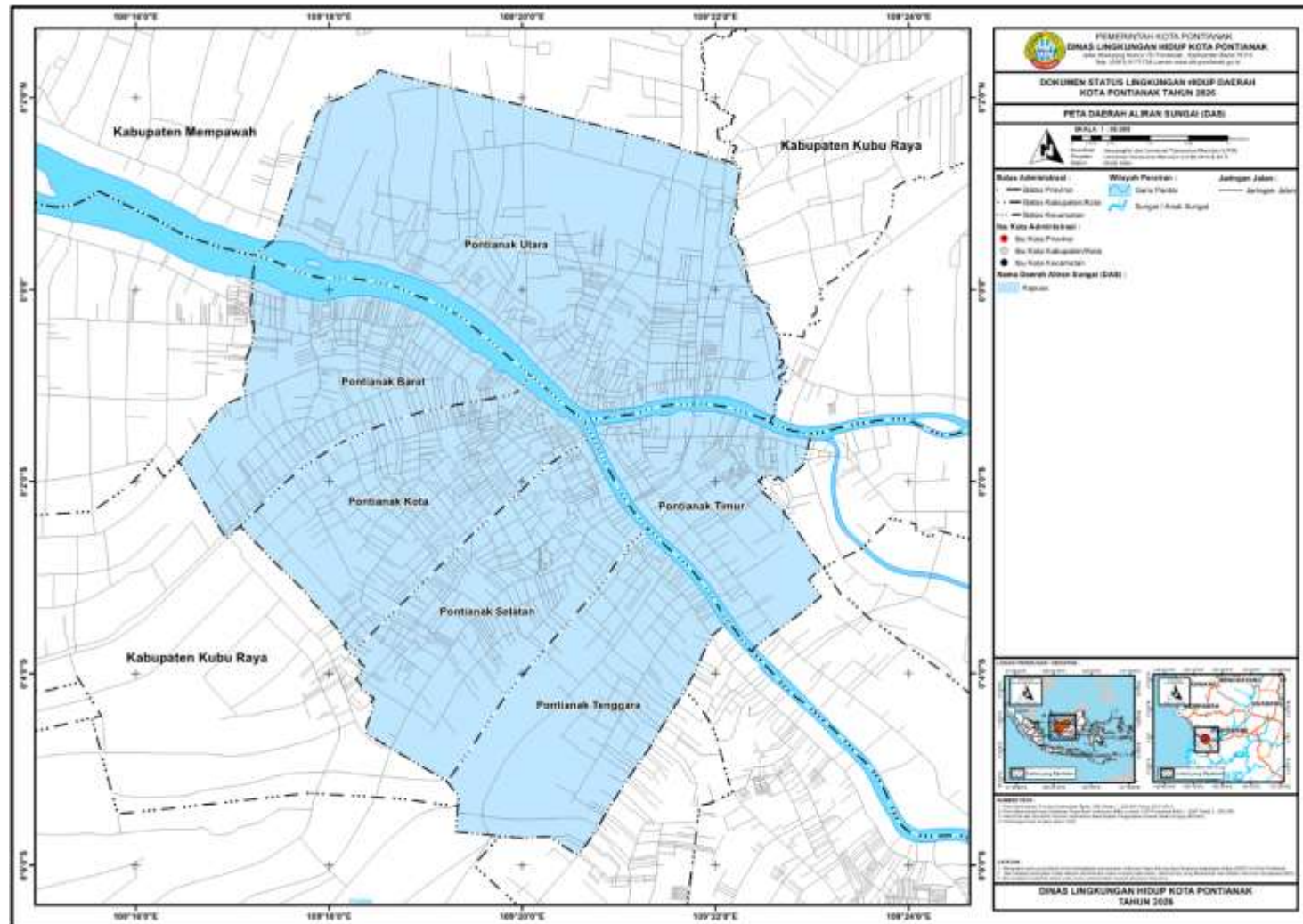
DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

No.	Nama Sungai/ Saluran	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)
	S. Kunyit	4	10 – 4
	Prt. Matua Kacong	4,8	10 – 4
	Prt. Madura	4,5	15 – 3,5
	S. Belanda	3	-
	S. Sahang	8,5	13,35 – 4,2
	S. Selamat	3,9	16 – 5
	S. Putat	4,2	14,60 – 4,20
	Prt. wan Salim	4,5	14,60 – 4,55
	Prt. Pekong	1,9	-
	Prt. Pangeran	4,1	13,35 – 4,20
	Prt. Nenas	3,8	14,60 – 4,55
	Prt. Makmur	1,2	7,95 – 3,20
	Prt. Norman	1,2	tad
	Prt. Malaya	4,1	tad

Sumber: Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025

BUKU II – LAPORAN UTAMA
DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)
KOTA PONTIANAK TAHUN 2026



Gambar 1. 4 Peta Hidrologi Kota Pontianak

1.3.1.4 Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi di Kota Pontianak termasuk ke dalam kategori wilayah peneplant dan sedimen alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas endapan lumpur sungai Kapuas. Dengan kondisi tersebut, tanah yang ada sangat labil dan mempunyai daya dukung sangat rendah.

Kondisi geologi di Kota Pontianak terdiri dari jenis batuan endapan Alluvium dan Litoral yang masing-masing memiliki karakteristik sedikit berbeda. Batuan endapan Alluvium tersusun dari *sediment, clastic* dan *alluvium* dan merupakan hasil dari endapan *terrestrial alluvium*. Sedangkan batuan endapan litoral tersusun dari *sediment, clastic* dan *fine* dan merupakan hasil dari endapan litoral dan *estuary*. Dari tabel dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah kota tersusun dari formasi jenis batuan alluvial, hanya bagian Pontianak Utara yang sebagian wilayahnya tersusun dari formasi tanah litoral.

Jenis-jenis tanah disepanjang sungai-sungai baru merupakan pengendapan yang menghasilkan daerah tropaquent dibarengi dengan *tropofluevent* dan dalam kondisi tersaturasi permanen *fluvaquent*. *Tropofluevent* dan *fluvaquent* berasal dari endapan akresi baru dari berbagai komposisi dan bentuk termasuk materi organik. Sabuk tropaquent melebar ke arah selatan mencapai pusat Kota Pontianak dan sungai Kapuas di dekatnya.

- Endapan Alluvium berasal dari sedimen klastik berukuran halus hingga kasar hasil pengendapan oleh aliran sungai (*terrestrial alluvium*).
- Endapan Litoral, di sisi lain, terbentuk dari sedimen yang lebih halus (*fine*) hasil pengendapan di wilayah pesisir dan estuari.

Sebagian besar wilayah Kota Pontianak tersusun dari formasi Alluvium, sementara formasi Litoral banyak ditemukan di sebagian wilayah Kecamatan Pontianak Utara. Selain itu, jenis tanah yang berkembang di

sepanjang daerah aliran sungai umumnya terdiri atas *tropaquent*, *tropofluevent*, dan *fluvaquent*.

- *Tropaquent* adalah tanah yang terbentuk di dataran rendah dengan drainase buruk,
- *Tropofluevent* berasal dari endapan baru sungai yang cenderung dangkal, dan
- *Fluvaquent* adalah tanah yang jenuh air secara permanen dan sering kali kaya akan material organik.

Jenis tanah lainnya di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian. Adapun karakteristik tanah di Kota Pontianak yaitu sebagai berikut.

a. Aluvial

Jenis tanah Aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, tekstur beraneka ragam, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur, serta konsistensinya keras waktu kering dan teguh waktu lembab.

Sifat kimia dari tanah jenis ini sedang sampai baik, reaksi tanahnya masam sampai netral, kandungan bahan organiknya rendah, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya, kesuburan tanahnya sedang sampai tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).

b. Organosol Gley Humus atau Tanah Gambut atau Tanah Organik

Jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat: tidak terjadi deferensiasi horizon secara jelas, ketebalan lebih dari 0.5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat-agak lekat, kandungan organik lebih dari 30% untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan unsur hara rendah. Berdasarkan penyebaran topografinya, tanah gambut dibedakan menjadi tiga yaitu:

- Gambut ombrogen: terletak di dataran pantai berawa, mempunyai ketebalan 0,5-16 m, terbentuk dari sisa tumbuhan hutan dan rumput rawa, hampir selalu tergenang air, bersifat sangat asam;
- Gambut pegunungan: terbentuk di daerah topografi pegunungan, berasal dari sisa tumbuhan yang hidupnya di daerah sedang (vegetasi spagnum).
- Gambut topogen: terbentuk di daerah cekungan (depresi) antara rawa-rawa di daerah dataran rendah dengan di pegunungan, berasal dari sisa tumbuhan rawa, mempunyai ketebalan 0.5-6 m, bersifat agak asam, kandungan unsur hara relatif lebih tinggi; dan

Berdasarkan susunan kimianya tanah gambut dibedakan menjadi:

- Gambut oligotrop, bersifat sangat asam, miskin O_2 , miskin unsur hara, biasanya selalu tergenang air;
- Gambut eutrop, bersifat agak asam, kandungan O_2 serta unsur haranya lebih tinggi;
- Gambut mesotrop, peralihan antara eutrop dan oligotrop.

Area sebaran jenis tanah menurut kecamatan di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 4 Jenis Tanah Kota Pontianak

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Alluvial	168.018,77	20
2	Alluvial & Gley Humus	185.2221,41	22
3	Organosol	472.870,19	55
4	Podsolik	21.892,77	3
5	Podsolik & Kamisol	6.918,96	1
Total		854.922,10	100

Sumber: Geoportal Kota Pontianak, 2023

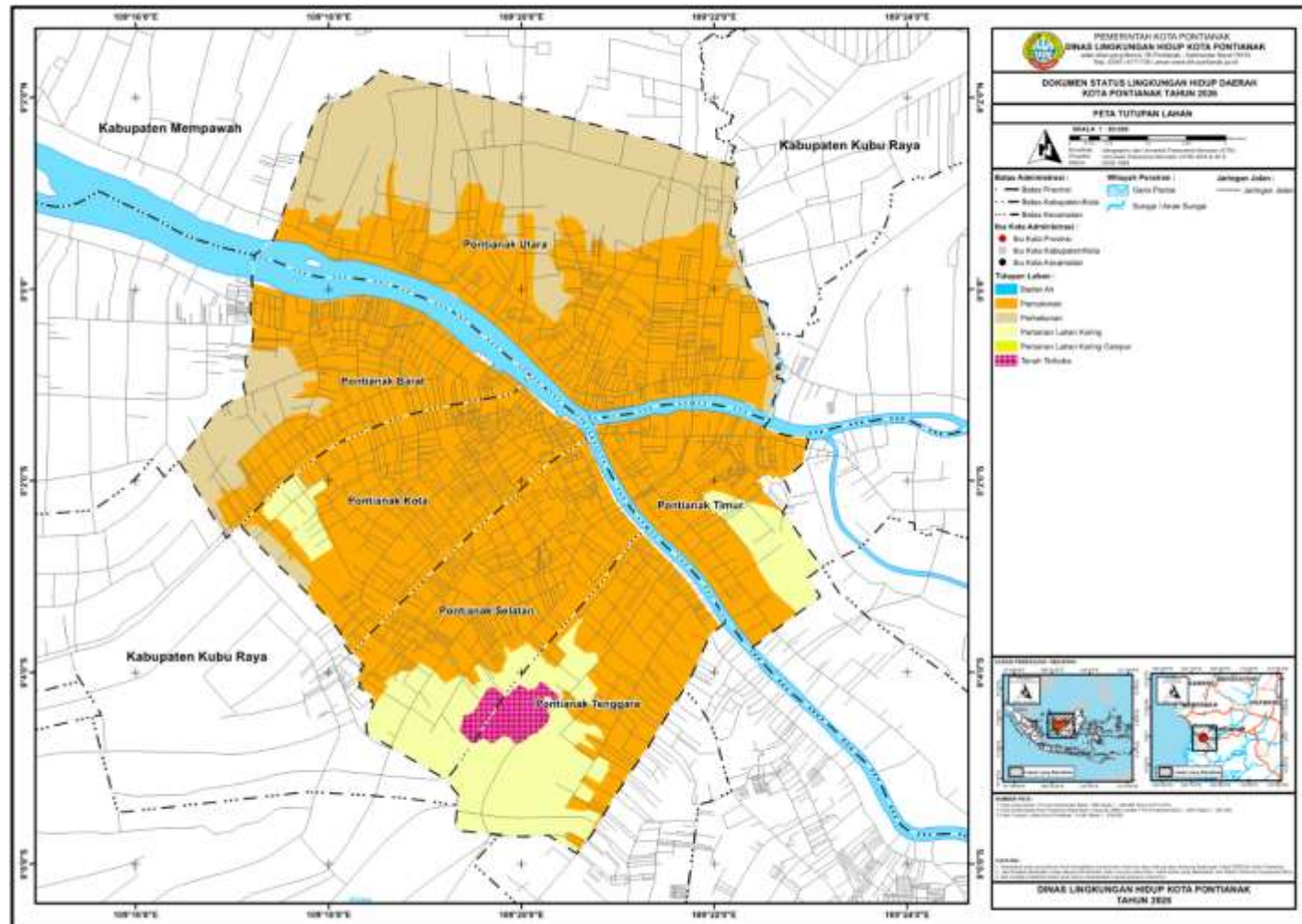
1.3.1.5 Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Kota Pontianak dianalisa menggunakan peta sekunder dari Kementerian Lingkungan Hidup skala 1:50.000. Berdasarkan analisa tersebut diperoleh bahwa kondisi tutupan lahan di Kota Pontianak didominasi oleh areal perkebunan. Berikut adalah tutupan lahan Kota Pontianak.

Tabel 1. 5 Tutupan Lahan Kota Pontianak

Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Perkebunan	2350,07	19,88
Permukiman	7338,13	62,07
Badan Air	662,03	1,23
Pertanian Lahan Kering	1325,59	5,61
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	0,02	11,22
Tanah Terbuka	145,03	0,02
Total	11820,87	100

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)
KOTA PONTIANAK TAHUN 2026



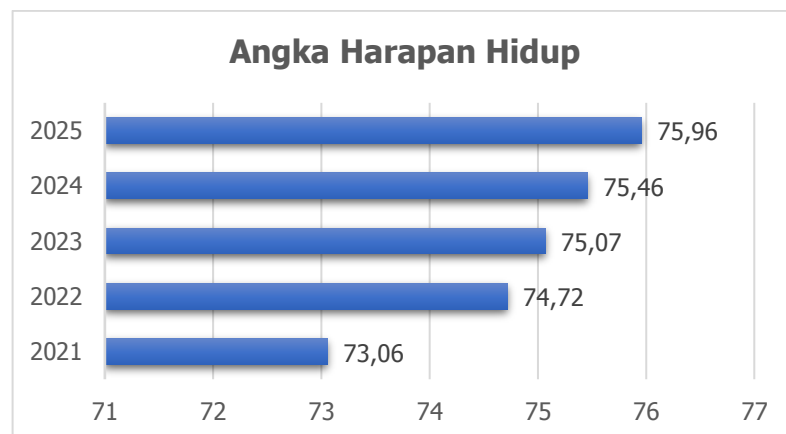
Gambar 1. 5 Peta Tutupan Lahan Kota Pontianak

1.3.1.6 Kawasan Hutan

Kawasan hutan di Kota Pontianak ditinjau dari Peta Fungsi Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, SK Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 Skala 1:250.000. Berdasarkan peta tersebut kawasan Kota Pontianak masuk didalam peruntukan lahan APL.

1.3.1.7 Kesehatan**a. Angka Usia Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang setelah mencapai usia tertentu, berdasarkan tingkat kematian yang berlaku di masyarakat tempat ia tinggal. Semakin tinggi angka kematian di suatu wilayah, maka semakin rendah Angka Harapan Hidup. Sebaliknya, semakin tinggi Angka Harapan Hidup, menunjukkan bahwa kualitas hidup dan kondisi kesehatan masyarakat cenderung lebih baik. Angka ini juga sering dijadikan sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi, karena mencerminkan tingkat kesejahteraan, akses terhadap layanan kesehatan, gizi, dan lingkungan hidup yang sehat. Dengan demikian, tingginya Angka Harapan Hidup menjadi cerminan positif terhadap kemajuan pembangunan di suatu wilayah. Berikut adalah angka usia harapan hidup Kota Pontianak :



Gambar 1. 6 Angka Usia Harapan Hidup Kota Pontianak

(Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026)

Selama periode Tahun 2021 hingga tahun 2025, angka usia harapan hidup Kota Pontianak menunjukkan tren peningkatan dari 73,06 di Tahun 2021 meningkat menjadi 75,96 di Tahun 2025. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pontianak.

b. Jumlah Kasus Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi di mana tubuh tidak mendapatkan atau tidak mampu menyerap cukup zat gizi esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh yang optimal. Kondisi ini umumnya muncul karena asupan makanan yang tidak seimbang atau tidak memadai, dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap pangan yang bergizi, pola makan yang tidak variatif, atau adanya penyakit yang mengganggu penyerapan zat-zat gizi. Berikut adalah jumlah kasus gizi buruk di Kota Pontianak.



Gambar 1. 7 Jumlah Kasus Gizi Buruk di Kota Pontianak

(Sumber: Profil Kesehatan Kota Pontianak, 2024)

Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024, jumlah kasus gizi buruk di Kota Pontianak pada tahun 2024 tercatat sebanyak 50 kasus dan seluruhnya telah mendapatkan perawatan. Dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 62 kasus, kondisi ini menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus pada tahun 2024.

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana Kesehatan di Kota Pontianak:

Tabel 1. 6 Jumlah Rumah Sakit Umum Kota Pontianak

Kecamatan	Rumah Sakit Umum	
	2024	2025
Pontianak Selatan	2	2
Pontianak Tenggara	4	4
Pontianak Timur	1	1
Pontianak Barat	1	1
Pontianak Kota	3	2
Pontianak Utara	1	2
Kota Pontianak	12	12

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Tabel 1. 7 Jumlah Puskesmas dan Klinik Pratama Kota Pontianak

Kecamatan	Puskesmas		Klinik Pratama	
	2024	2025	2024	2025
Pontianak Selatan	2	2	19	17
Pontianak Tenggara	2	2	16	19
Pontianak Timur	6	6	6	8
Pontianak Barat	4	4	8	8
Pontianak Kota	4	4	29	33
Pontianak Utara	5	5	3	3
Kota Pontianak	23	23	81	88

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Tabel 1. 8 Jumlah Posyandu dan Rumah Sakit Bersalin Kota Pontianak

Kecamatan	Posyandu		Rumah Sakit Bersalin	
	2024	2025	2024	2025
Pontianak Selatan	32	33	1	1
Pontianak Tenggara	19	20	-	-
Pontianak Timur	54	56	-	-
Pontianak Barat	48	54	-	-
Pontianak Kota	54	58	-	-
Pontianak Utara	93	93	-	-
Kota Pontianak	300	314	1	1

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Tabel 1. 9 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Pontianak

Tenaga Kesehatan		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dokter Umum	157	296	453
2	Dokter Spesialis	215	124	339
3	Dokter Gigi	45	147	192
4	Apoteker	69	279	348
5	Analisis Laboratorium	97	290	387
6	Fisioterapi	24	53	77
7	Asisten Apoteker	60	259	319
8	Bidan	-	620	620
9	Perawat	733	1.740	2.473
10	Perawat Gigi	30	117	147
11	Kesehatan Lingkungan	45	61	106
12	Ahli Gizi	13	120	133
13	Kesehatan Masyarakat	32	109	141
14	Radiografer	41	38	79

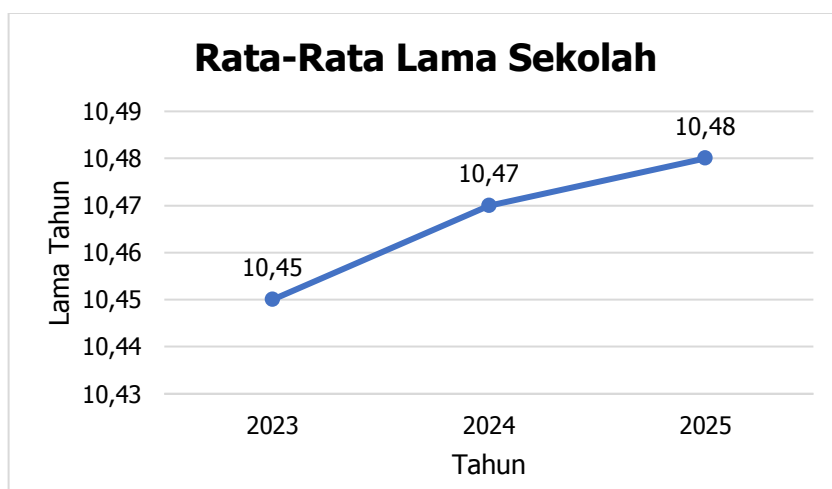
Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

1.3.1.8 Pendidikan**a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Indikator ini berfungsi untuk mengukur tingkat kualitas pendidikan di suatu wilayah. Dalam perhitungannya:

- Penduduk yang tamat Sekolah Dasar (SD) dianggap telah menempuh pendidikan selama 6 tahun.
- Penduduk yang tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dianggap menempuh pendidikan selama 9 tahun.
- Penduduk yang tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) dianggap menempuh pendidikan selama 12 tahun
- Perhitungan ini tidak mempertimbangkan apakah seorang individu pernah tinggal kelas atau tidak selama masa pendidikan.

Berdasarkan data resmi BPS, rata-rata lama sekolah Kota Pontianak pada tahun 2025 tercatat sebesar 10,48 tahun. Nilai ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 10,47 tahun, sehingga secara umum memperlihatkan kecenderungan peningkatan capaian pendidikan penduduk Kota Pontianak.

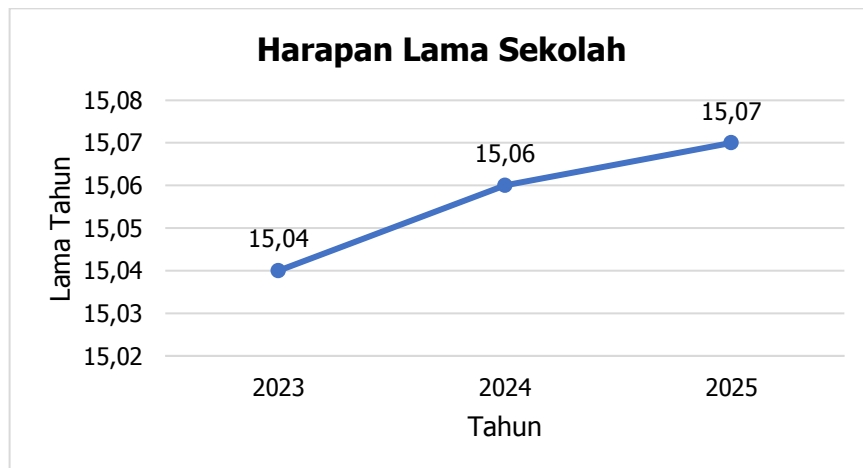


Gambar 1. 8 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pontianak

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka 2026

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamnya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun ke atas, dimana angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berikut adalah angka harapan lama sekolah Kota Pontianak selama tahun 2021 hingga 2025.



Gambar 1. 9 Harapan Lama Sekolah di Kota Pontianak

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Berdasarkan data BPS Kota Pontianak 2026, harapan lama sekolah Kota Pontianak pada tahun 2025 tercatat sebesar 15,07 tahun. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 15,06 tahun, sehingga menunjukkan kecenderungan peningkatan capaian pendidikan di Kota Pontianak. Berikut adalah sarana dan prasarana Pendidikan di Kota Pontianak:

Tabel 1. 10 Jumlah Satuan Pendidikan di Kota Pontianak

Kecamatan	Satuan Pendidikan		
	Negeri	Swasta	Jumlah
	2025/2026	2025/2026	2025/2026
Pontianak Selatan	31	62	94
Pontianak Tenggara	11	53	67
Pontianak Timur	31	39	70
Pontianak Barat	33	56	95
Pontianak Kota	29	94	127
Pontianak Utara	45	77	131
Kota Pontianak	180	381	584

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Tabel 1. 11 Jumlah Kepala Sekolah dan Pendidik di Kota Pontianak

Kecamatan	Kepala Sekolah dan Pendidik		
	Negeri	Swasta	Jumlah
	2025/2026	2025/2026	2025/2026
Pontianak Selatan	908	782	1.690
Pontianak Tenggara	182	689	871
Pontianak Timur	675	307	982
Pontianak Barat	973	467	1.440
Pontianak Kota	754	1.107	1.861
Pontianak Utara	1.001	659	1.660
Kota Pontianak	4.493	4.011	8.504

Sumber : Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Tabel 1. 12 Jumlah Peserta Didik di Kota Pontianak

Kecamatan	Peserta Didik		
	Negeri	Swasta	Jumlah
	2025/2026	2025/2026	2025/2026
Pontianak Selatan	17.755	12.774	30.529
Pontianak Tenggara	3.713	10.297	14.010
Pontianak Timur	13.889	4.768	18.657
Pontianak Barat	19.492	7.180	26.672
Pontianak Kota	15.317	18.171	33.488
Pontianak Utara	19.291	10.062	29.353
Kota Pontianak	89.457	63.252	152.709

Sumber : Kota Pontianak dalam Angka, 2026

1.3.1.9 Pertanian

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah merupakan salah satu indikator yang menggambarkan ketersediaan ruang produksi pangan di suatu wilayah. Keberadaan lahan sawah memiliki keterkaitan dengan kapasitas produksi pangan, sehingga informasi mengenai luasannya penting dalam melihat potensi ketahanan pangan lokal. Berdasarkan data publik resmi yang masih digunakan dalam rujukan statistik terbaru BPS Kota Pontianak, luas lahan sawah di Kota Pontianak tercatat sebesar 207 ha. Pada tingkat kecamatan, data BPS menunjukkan bahwa Kecamatan Pontianak Kota memiliki lahan sawah seluas 9 ha dan Kecamatan Pontianak Tenggara seluas 9 ha.

Tanaman pangan memiliki peranan penting sebagai sumber makanan pokok masyarakat, khususnya beras yang menjadi konsumsi utama penduduk. Namun, sebagai wilayah perkotaan, Kota Pontianak menghadapi keterbatasan dalam penyediaan pangan akibat terbatasnya lahan pertanian tanaman pangan. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pangan pokok

dengan berbagai strategi, seperti meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang ada serta menjalin kerja sama dan membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas pasokan pangan pokok bagi masyarakat Kota Pontianak.

Tabel 1. 13 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-Umbian Tahun 2023

Kecamatan	Serealia dan Umbi-Umbian		
	Padi	Ubi Kayu	Ubi Jalar
Pontianak Selatan	0	22	0
Pontianak Tenggara	0	22	0
Pontianak Timur	37	0	0
Pontianak Barat	403	1.355	0
Pontianak Kota	44	44	0
Pontianak Utara	184	162	192
Jumlah	668	1.605	192

Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2023

Berdasarkan hasil analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Pontianak Tahun 2024, rata-rata konsumsi beras penduduk tercatat sebesar 78,8 kg/kapita/tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa beras masih menjadi pangan pokok utama masyarakat Kota Pontianak. Namun demikian, kemampuan produksi pangan dari dalam wilayah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daerah, mengingat Kota Pontianak merupakan wilayah perkotaan dengan ketersediaan lahan tanaman pangan yang relatif terbatas. Kondisi ini tercermin dari luas tanaman padi yang masih terbatas, sehingga upaya peningkatan ketahanan pangan tidak hanya diarahkan pada produksi padi, tetapi juga melalui pengembangan komoditas pangan lain seperti sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian guna mendukung ketersediaan pangan yang lebih beragam.

**Tabel 1. 14 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan
(Kuintal) di Kota Pontianak 2022-2025**

Jenis Tanaman	2022	2023	2024	2025
Sayuran/Vegetables:				
Bawang Daun	1.212	420	604	564
Bawang Merah	-	-	-	-
Bawang Putih	-	-	-	-
Bayam	11.162,5	16.173	16.815	19.385
Buncis	835	-	-	-
Cabai Besar	-	60	40	-
Cabai Keriting	-	-	-	-
Cabai Rawit	441	1.567	4.700	4.453
Jamur Tiram	170	-	0,95	-
Jamur Merang	-	-	-	-
Jamur Lainnya	-	-	-	-
Kacang Panjang	1.656	15	-	-
Kangkung	22.946	22.192	19.335	37.538
Kembang Kol	-	-	-	-
Kentang	-	-	-	-
Ketimun	2.078	300	170	-
Kubis	-	-	-	-
Labu Siam	-	-	-	-
Petsai	17.210	19.579	23.265	23.457
Terung	1.354	-	-	-
Tomat	3.023	496	242	24
Wortel	-	-	-	-

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Jenis Tanaman	2022	2023	2024	2025
Buah-buahan				
Melon	-	-	-	-
Semangka	550	80	-	-

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Pada tahun 2025, populasi ternak sapi potong mencapai 1.525 ekor, sapi perah 4 ekor, kambing 2.595 ekor dan babi 335 ekor. Untuk ternak unggas, ayam pedaging merupakan populasi yang terbanyak dibandingkan dengan unggas lainnya, yaitu mencapai 7.562.344 ekor, sedangkan ayam kampung, ayam petelur dan itik masing-masing sebanyak 36.212 ekor, 28.442 ekor dan 2.500 ekor.

Tabel 1. 15 Produksi Daging, Telur, Susu dan Kulit di Kota Pontianak 2023-2025

Jenis Ternak	2023	2024	2025
I. Daging (Kg)	16.875.820	16.420.743	13.023.851
1. Sapi	518.538	520.812	450.816
2. Kambing	135.385	151.922	135.285
3. Ayam (Ras+Buras)	15.006.750	14.634.651	11.505.976
4. Itik	165.961	161.094	120.791
5. Babi	1.049.185	952.264	810.983
II. Telur (Butir)	66.900	200.700	200.700
1. Ayam Buras	—	—	—
2. Ayam Ras Petelur	66.900	200.700	200.700
3. Itik	—	—	—
4. Burung Puyuh	—	—	—
III. Susu (Liter)	—	—	—
1. Sapi Perah	—	—	—

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Jenis Ternak	2023	2024	2025
IV. Kulit (Lembar)	–	–	–
1. Sapi	–	–	–
2. Kambing	–	–	–

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

**Tabel 1. 16 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) di Kota Pontianak
2021-2024**

Jenis Ikan	2023	2024	2025
Alu-Alu	13,20	13,50	16,25
Baung	–	28	18,83
Biji Nangka / Sabun-Sabun	0,60	–	–
Biji Nangka Karang	6,50	–	–
Cumi-Cumi	–	12	13,32
Daun Bambu / Talang-Talang	11,9	–	–
Ekor Kuning / Pisang-Pisang	46,80	47,60	34,53
Gulamah / Tigawaja	19,70	9,40	1,80
Juara	–	–	67,26
Kakap Merah	–	158	167,64
Kakap Merah / Bambang	126,40	–	–
Kakap Putih	0,80	2,00	24,50
Kerapu Karang	47,10	41,10	25,10
Kerapu Sunu	60,00	51,30	43,20
Keting	–	47,24	38,95
Kuniran	9,20	15,80	14,40
Kuwe / Manyok	8,90	20,50	34,22
Lais	–	18,18	14,54
Lencam	29,00	41,30	55,53
Manyung Besar / Otek	26,60	26,90	18,70
Mata Besar / Swanggi / Gentong	2,10	–	7,58
Pari	0,10	–	–
Seluang	–	6,30	5,60
Talang	–	12	63,20
Tenggiri	46,80	37,70	29,47
Tilan	–	10	6,42
Tongkol	–	–	18,27

Jenis Ikan	2023	2024	2025
Tongkol Abu-Abu	19,90	21,80	–
Udang Galah	20,80	9,51	11,12
Salab / Lampan	30,50	32,41	21,71

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

1.3.1.10 Industri Energi Listrik

Listrik merupakan komoditas vital yang menunjang hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia modern. Keberadaannya sangat penting tidak hanya bagi rumah tangga, tetapi juga bagi sektor industri, perdagangan, perkantoran, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Tanpa pasokan energi listrik yang memadai dan berkelanjutan, berbagai aktivitas sosial dan ekonomi akan terganggu, bahkan dapat lumpuh total. Di sisi lain, keterbatasan pasokan listrik juga dapat berdampak pada iklim investasi di suatu daerah. Banyak investor yang mengurungkan niat untuk menanamkan modalnya karena khawatir terhadap kestabilan pasokan energi, terutama untuk jenis usaha yang membutuhkan konsumsi energi listrik yang besar. Oleh karena itu, ketersediaan dan keandalan energi listrik menjadi salah satu faktor strategis yang sangat menentukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah secara menyeluruh. Berikut adalah daya terpasang, produksi dan distribusi listrik PT.PLN (Persero) pada cabang/ranting PLN menurut kecamatan di Kota Pontianak:

Tabel 1. 17 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN menurut Bulan di Kota Pontianak, 2025

Bulan	Daya Terpasang (kW)	Produksi Listrik (kWh)	Listrik Terjual (kWh)	Dipakai Sendiri (kWh)	Susut/Hilang (kWh)
Januari	454.565	69.575.058	60.090.603	259.793	-5.175.596
Februari	456.417	69.175.067	61.087.362	236.070	-1.652.721
Maret	457.714	78.313.628	60.854.541	262.174	6.276.759

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Bulan	Daya Terpasang (kW)	Produksi Listrik (kWh)	Listrik Terjual (kWh)	Dipakai Sendiri (kWh)	Susut/Hilang (kWh)
April	459.217	74.943.630	54.812.156	254.806	6.839.632
Mei	461.878	88.573.744	62.946.690	264.706	9.050.227
Juni	464.504	82.418.815	60.961.724	266.539	6.155.417
Juli	467.732	81.674.965	63.831.485	267.661	3.514.489
Agustus	471.017	80.728.499	61.702.483	268.642	4.196.262
September	473.389	80.411.516	60.679.805	421.073	4.485.895
Oktober	476.334	81.411.385	63.880.960	287.868	4.688.114
November	478.186	80.370.450	63.220.233	297.492	4.553.163
Desember	480.897	84.214.297	63.817.002	309.458	4.669.372
Rata-rata	466.820,83	79.317.587,83	61.490.420,33	283.023,50	3.966.751,08

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Pada tahun 2025, kondisi ketenagalistrikan PLN di Kota Pontianak menunjukkan bahwa rata-rata daya terpasang mencapai 466.820,83 kW per bulan. Rata-rata produksi listrik tercatat sebesar 79.317.587,83 kWh per bulan, dengan rata-rata listrik terjual kepada konsumen sebesar 61.490.420,33 kWh per bulan. Sementara itu, rata-rata energi listrik yang dipakai sendiri untuk kebutuhan operasional internal PLN sebesar 283.023,50 kWh per bulan, sedangkan rata-rata energi yang mengalami susut atau hilang selama proses distribusi sebesar 3.966.751,08 kWh per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem ketenagalistrikan di Kota Pontianak pada tahun 2025 tetap didukung oleh kapasitas daya dan produksi listrik yang cukup besar untuk melayani kebutuhan pelanggan. Penataan kelembagaan pelayanan juga terus berlangsung, yang antara lain ditunjukkan oleh bergabungnya Unit Layanan Pelanggan (ULP) Siantan ke dalam Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mempawah sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelayanan distribusi dan pengelolaan energi listrik di wilayah tersebut.

1.3.1.11 Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Kota Pontianak dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.704,897 miliar pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi Rp1.816,643 miliar pada tahun 2023, Rp1.937,675 miliar pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi Rp2.149,733 miliar pada tahun 2025. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh kenaikan pada komponen Dana Perimbangan, yang selama periode tersebut tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap total pendapatan daerah, yakni dari Rp945,665 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp1.160,305 miliar pada tahun 2025. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp537,797 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp782,950 miliar pada tahun 2025, yang mencerminkan semakin menguatnya kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, komponen pendapatan lain-lain yang sah berfluktuasi, dari Rp221,434 miliar pada tahun 2022 naik menjadi Rp251,184 miliar pada tahun 2023, namun kemudian menurun menjadi Rp207,933 miliar pada tahun 2024 dan Rp206,477 miliar pada tahun 2025. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Pontianak semakin meningkat dengan kontribusi utama yang masih ditopang oleh dana transfer, disertai penguatan PAD sebagai sumber penerimaan daerah. Realisasi pendapatan daerah Kota Pontianak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. 18 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak
(dalam Rp. Miliar)

Jenis Pendapatan		2022	2023	2024	2025
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	537,797	574,727	593,772	782,950
2.	Dana Perimbangan	945,665	990,731	1.135,969	1.160,305

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Jenis Pendapatan		2022	2023	2024	2025
3.	Pendapatan Lain-lain yang Sah	221,434	251,184	207,933	206,477
Total		1.704,897	1.816,643	1.937,675	2.149,733

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Pengukuran kinerja APBD suatu daerah juga dapat dilihat dari besaran realisasi belanja daerah yang telah terserap selama Tahun anggaran APBD bersangkutan. Semakin banyak yang terserap maka semakin bagus pula kinerja suatu daerah. Penting bagi suatu daerah untuk merasionalisasikan belanja yang dikeluarkan agar belanja dapat efektif dan efisien, maka dormulasi kebijakan umum belanja daerah harus diarahkan pada program prioritas baik dalam rangka pemenuhan atas mandatory yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maupun belanja prioritas lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan daerah pencapaian target kinerja lainnya yang telah direncanakan. Berikut data realisasi belanja daerah Kota Pontianak dari Tahun 2022-2025 sebagai berikut.

Tabel 1. 19 Realisasi Belanja Daerah Kota Pontianak (dalam Rp. Miliar)

Jenis Pendapatan		2022	2023	2024	2025
1.	Belanja Operasi	1.221,444	1.256,314	1.391,705	1.551,085
2.	Belanja Modal	446,328	447,356	533,193	537,952
3.	Belanja Tidak Terduga	0,621	1,467	3,862	6,953
4.	Belanja Transfer	0,100	-	-	0,150
Total		1.668,494	1.705,137	1.928,760	2.055,991

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Tabel 1. 20 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pontianak (dalam Rp. Miliar)

Jenis Pendapatan		2022	2023	2024	2025
1.	Penerimaan Pembiayaan	32,781	23,009	59,111	60,543
2.	Pengeluaran Pembiayaan	46,180	75,438	7,5	15,5
Total		-13,398	-52,428	51,661	45,043

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

1.3.1.12 Pariwisata

Sektor pariwisata Kota Pontianak pada tahun 2025 didukung oleh ketersediaan sarana akomodasi dan mobilitas masyarakat yang cukup aktif. Hotel sebagai salah satu fasilitas penunjang utama kegiatan pariwisata menunjukkan tingkat pemanfaatan yang cukup baik, dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang mencapai 56,82 persen, sedangkan hotel nonbintang sebesar 31,54 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas kunjungan dan kebutuhan akomodasi di Kota Pontianak masih berjalan relatif stabil, terutama pada segmen hotel berbintang yang memiliki tingkat hunian lebih tinggi.

Dari aspek pergerakan orang, data Kantor Imigrasi Pontianak pada tahun 2025 mencatat jumlah kedatangan dari luar negeri sebesar 34.342 orang, sedangkan jumlah keberangkatan ke luar negeri mencapai 40.786 orang. Data tersebut menunjukkan adanya mobilitas internasional yang cukup tinggi, yang secara tidak langsung turut menggambarkan keterhubungan Kota Pontianak dengan aktivitas perjalanan lintas negara. Sementara itu, penerbitan paspor pada tahun 2025 tercatat sebanyak 42.431 paspor. Meskipun demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 33,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sektor pariwisata Kota Pontianak pada tahun 2025 masih ditopang oleh fungsi kota sebagai tujuan perjalanan dan simpul mobilitas masyarakat. Keberadaan fasilitas perhotelan dengan tingkat hunian yang cukup baik serta arus kedatangan dan keberangkatan internasional menjadi indikator bahwa aktivitas pariwisata dan perjalanan di Kota Pontianak tetap berlangsung, meskipun terdapat penurunan pada jumlah penerbitan paspor dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1. 21 Obyek Wisata di Kota Pontianak

Nama Obyek Wisata	Lokasi
Tugu Khatulistiwa	Pontianak Utara
Masjid Jami' Sultan Syarif Abdurrahman	Pontianak Timur
Keraton Kadriah	Pontianak Timur
Makam Kesultanan Batu Layang	Pontianak Utara
Taman Alun Kapuas	Pontianak Kota
Rumah Betang Radakng	Pontianak Kota
Klenteng Thian Hou Keng	Pontianak Kota
Museum Negeri Kalimantan Barat	Pontianak Selatan
Masjid Raya Mujahidin	Pontianak Selatan
<i>Waterfront City</i> Pontianak	Pontianak Selatan

1.3.1.13 Transportasi

Sektor transportasi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Kota Pontianak, terutama dalam memperlancar pergerakan orang, barang, dan jasa antarwilayah. Keberadaan prasarana transportasi yang memadai menjadi faktor utama dalam menunjang aktivitas perekonomian serta memperkuat keterhubungan antarbagian wilayah kota. Dalam konteks tersebut, jalan dan jembatan menjadi infrastruktur dasar yang sangat menentukan kelancaran sistem transportasi, karena berfungsi sebagai penghubung utama dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Pada tahun 2025, panjang jalan menurut jenis permukaan di Kota Pontianak tercatat mencapai 304,70 km. Dari jumlah tersebut, jalan dengan permukaan aspal mendominasi sepanjang 216,38 km, diikuti jalan dengan permukaan kerikil sepanjang 10,44 km, permukaan tanah sepanjang 12,29 km, dan jenis permukaan lainnya sepanjang 65,59 km. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa jaringan jalan di Kota Pontianak pada umumnya telah didominasi oleh permukaan jalan yang lebih memadai untuk mendukung mobilitas perkotaan.

Apabila ditinjau berdasarkan kondisi jalan, sebagian besar ruas jalan di Kota Pontianak berada dalam kondisi yang relatif baik. Pada tahun 2025, sebanyak 81,33 persen jalan berada dalam kondisi baik, 10,01 persen dalam kondisi sedang, 3,84 persen dalam kondisi rusak, dan 4,82 persen dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan di Kota Pontianak secara umum masih mampu mendukung kelancaran transportasi dan distribusi wilayah, meskipun tetap diperlukan upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas pada ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan agar fungsi pelayanan transportasi dapat terus optimal.

Tabel 1. 22 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Pontianak (km), 2023-2025

Jenis Permukaan Jalan	2023	2024	2025
Aspal	209,02	206,37	216,38
Kerikil	13,95	14,53	10,44
Tanah	10,72	11,50	12,29
Lainnya	71,01	72,30	65,59
Jumlah	304,70	304,70	304,70

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Tabel 1. 23 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Pontianak (km), 2023-2025

Kondisi Jalan	2023	2024	2025
Baik	251,65	247,06	247,80
Sedang	24,33	29,11	30,51
Rusak	14,89	13,91	11,71
Rusak Berat	13,82	14,62	14,69
Jumlah	304,70	304,70	304,70

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

1.3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kota Pontianak memiliki luas wilayah $\pm 118,209 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam 6 (enam) kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan. Berdasarkan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2025, kapasitas ekologis wilayah secara umum masih mampu menopang aktivitas pembangunan sehingga secara agregat kondisi daya dukung lingkungan hidup belum terlampaui. Namun demikian, tekanan terhadap kapasitas ekologis wilayah mulai meningkat seiring dengan dominasi kawasan terbangun serta tingginya intensitas pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan.

Secara ekoregional, wilayah Kota Pontianak didominasi oleh kompleks dataran gambut dengan karakter lahan rawa dan dataran rendah. Komposisi vegetasi alami didominasi oleh vegetasi terna tepian sungai payau sebesar $\pm 86,3\%$ dan vegetasi terna rawa gambut sebesar $\pm 13,67\%$. Struktur ekologis tersebut menjadikan fungsi pengaturan tata air sebagai fungsi utama yang menentukan stabilitas lingkungan kota. Kondisi lahan gambut yang sensitif terhadap perubahan tutupan lahan menyebabkan wilayah ini memiliki kerentanan terhadap genangan, penurunan daya dukung tanah, serta potensi kebakaran lahan pada musim kemarau.

Analisis DDDTLH dilakukan terhadap 14 (empat belas) jenis jasa ekosistem yang mencakup jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa

pendukung, dan jasa budaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar jasa ekosistem di Kota Pontianak berada pada kategori rendah hingga sedang. Tekanan terbesar terjadi pada jasa penyediaan dan jasa pengaturan, terutama yang berkaitan dengan penyediaan pangan, pengaturan tata aliran air, serta pengaturan iklim mikro perkotaan.

Pada aspek penyediaan pangan, luas lahan sawah di Kota Pontianak hanya berkisar antara ± 162 hingga ± 182 hektar atau kurang dari 2% dari total luas wilayah kota. Proporsi ini menunjukkan bahwa daya dukung pangan lokal relatif rendah. Produksi padi yang dihasilkan belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk yang terus meningkat sehingga ketergantungan terhadap pasokan pangan dari wilayah sekitar masih cukup tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa kapasitas jasa penyediaan pangan secara ekologis berada pada tingkat terbatas serta rentan terhadap tekanan perubahan penggunaan lahan.

Dari sisi tata ruang, kawasan permukiman dan kawasan terbangun lainnya telah mencapai sekitar $\pm 34,2\%$ dari total luas wilayah. Tingginya proporsi lahan terbangun secara langsung mengurangi kapasitas resapan air dan meningkatkan limpasan permukaan. Dalam konteks hidrologi perkotaan, kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya risiko genangan dan banjir, terutama pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Kota Pontianak juga memiliki potensi bencana utama berupa banjir, cuaca ekstrem, kebakaran lahan, dan kekeringan. Tekanan terhadap daya tampung air hujan dan sistem drainase menunjukkan bahwa kapasitas lingkungan dalam menyerap beban hidrometeorologis berada pada tingkat sensitif.

Pada aspek pengaturan iklim dan kualitas udara, keterbatasan ruang terbuka hijau serta vegetasi alami menyebabkan kapasitas penyerapan karbon dan pengendalian suhu mikro perkotaan menjadi terbatas. Peningkatan kepadatan bangunan, aktivitas transportasi, serta konsumsi energi di kawasan perkotaan turut meningkatkan tekanan terhadap kualitas

udara dan kenyamanan termal lingkungan. Apabila luasan ruang terbuka hijau tidak ditingkatkan secara signifikan, maka kapasitas jasa ekosistem dalam mengatur iklim mikro perkotaan berpotensi terus menurun seiring dengan pertumbuhan pembangunan.

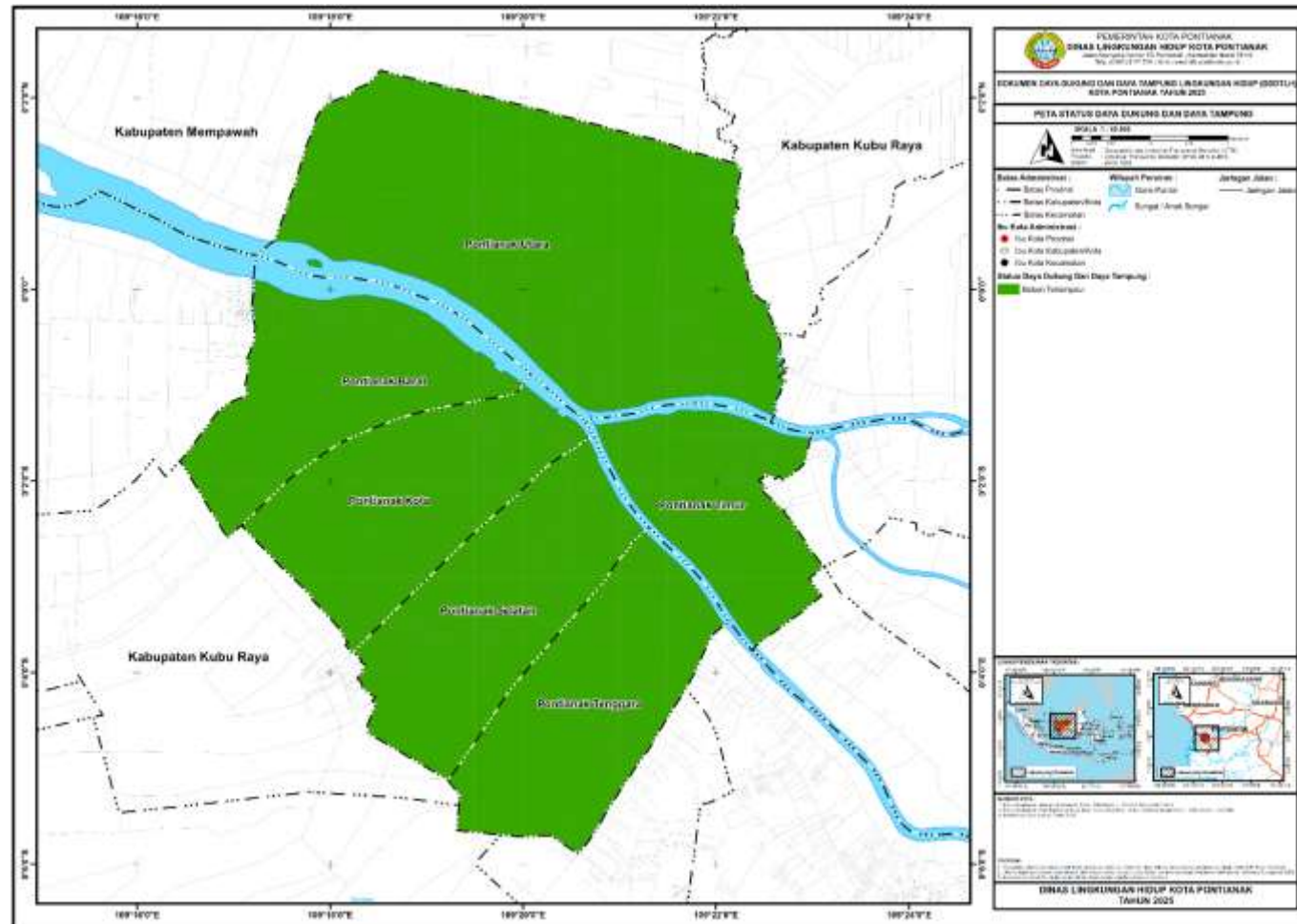
Dalam jasa budaya, khususnya pada fungsi rekreasi dan ekowisata, kapasitas wilayah juga sebagian besar berada pada kategori rendah hingga sedang. Hal ini menunjukkan keterbatasan kawasan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik berbasis lingkungan. Oleh karena itu, penguatan ruang terbuka hijau perkotaan menjadi penting tidak hanya untuk menjaga fungsi ekologis tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil kajian DDDTLH menunjukkan bahwa meskipun kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Pontianak secara umum masih berada dalam batas yang memungkinkan pembangunan berlangsung, namun margin kapasitas ekologis wilayah cenderung semakin menyempit. Keterbatasan lahan pangan yang kurang dari 2% dari luas wilayah, dominasi kawasan terbangun sekitar 34,2%, serta karakteristik lahan gambut yang sensitif terhadap perubahan tutupan lahan menunjukkan bahwa pembangunan tambahan tanpa pengendalian yang memadai berpotensi melampaui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di masa mendatang. Oleh karena itu, arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kota Pontianak ke depan perlu menekankan beberapa hal berikut:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang berbasis kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
2. Peningkatan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau serta kawasan resapan air di wilayah perkotaan.
3. Perlindungan terhadap lahan pertanian yang masih tersisa guna menjaga ketahanan pangan lokal.

4. Penguatan sistem drainase perkotaan dan pengelolaan air berbasis ekosistem untuk mengurangi risiko genangan dan banjir.
5. Integrasi hasil kajian DDDTLH ke dalam kebijakan tata ruang, perizinan, serta perencanaan pembangunan infrastruktur.
6. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana hidrometeorologis sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan Kota Pontianak. Hasil kajian ini memberikan peringatan sekaligus arahan bahwa pembangunan wilayah ke depan perlu dilaksanakan secara lebih terkendali, adaptif, dan berbasis pada batas kemampuan ekologis wilayah agar keberlanjutan lingkungan hidup tetap terjaga.



Gambar 1. 10 Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Pontianak

1.3.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Salah satu dokumen yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi isu lingkungan hidup strategis di Kota Pontianak adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2013–2033. KLHS tersebut disusun untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang tertuang dalam RTRW telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta perlindungan lingkungan hidup. Melalui kajian ini dilakukan penilaian terhadap keterkaitan antara rencana pemanfaatan ruang dengan kondisi lingkungan hidup, potensi dampak pembangunan, serta rekomendasi pengelolaan lingkungan yang perlu diintegrasikan dalam kebijakan tata ruang daerah. Berdasarkan hasil analisis dalam dokumen KLHS RTRW Kota Pontianak, dari 11 (sebelas) kelompok isu pembangunan yang dianalisis terdapat 5 (lima) isu pembangunan berkelanjutan yang dikategorikan sebagai isu strategis, yaitu :

1. Banjir dan genangan,
2. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
3. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
4. Pengelolaan kota berkelanjutan, serta
5. Penataan perkotaan dan tata ruang.

Penilaian terhadap isu-isu tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 10 muatan lingkungan hidup, yang meliputi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi dampak dan risiko lingkungan, kinerja jasa ekosistem, cakupan wilayah bencana alam, kondisi sumber daya alam, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat, serta perlindungan kawasan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa isu banjir dan genangan memperoleh skor tertinggi yang menunjukkan bahwa isu tersebut memiliki tingkat keterkaitan paling tinggi dengan berbagai aspek lingkungan hidup

dan pembangunan wilayah. Kondisi ini berkaitan dengan karakteristik wilayah Kota Pontianak yang berada pada dataran rendah dan dilalui oleh beberapa sungai besar sehingga sangat dipengaruhi oleh dinamika pasang surut air sungai. Pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang bersamaan dengan pasang air sungai, beberapa wilayah kota berpotensi mengalami genangan dan banjir. Selain itu, potensi bencana lain yang teridentifikasi di wilayah Kota Pontianak antara lain cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan.

Secara umum kondisi lingkungan hidup Kota Pontianak menunjukkan bahwa status daya dukung dan daya tampung lingkungan masih berada dalam kondisi belum terlampaui, sehingga lingkungan masih memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya alam serta menyerap dampak aktivitas pembangunan. Namun demikian, tekanan terhadap lingkungan diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, serta peningkatan aktivitas pembangunan yang memerlukan ruang untuk permukiman, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi.

Analisis terhadap kebijakan, rencana, dan program pembangunan dalam KLHS RTRW juga menunjukkan bahwa beberapa sektor pembangunan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi lingkungan hidup. Sebagai contoh, pengelolaan kawasan badan air dan kawasan lindung gambut memberikan dampak positif tertinggi terhadap lingkungan, sedangkan pembangunan badan jalan memiliki potensi dampak negatif tertinggi terhadap lingkungan yang apabila tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perkotaan perlu diimbangi dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, KLHS RTRW Kota Pontianak memberikan beberapa rekomendasi pengelolaan lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan wilayah, antara lain

1. Penerapan konsep *Water Sensitive Urban Design* (WSUD) dalam perencanaan tata ruang untuk meningkatkan pengelolaan sistem air perkotaan,
2. Penyediaan zona penyangga hijau di sekitar sungai dan kawasan rawan banjir, serta peningkatan proporsi ruang terbuka hijau perkotaan hingga minimal 30% dari luas wilayah kota.
3. Pembangunan kawasan juga diarahkan untuk menerapkan konsep *Low Impact Development* (LID) guna menjaga keseimbangan siklus hidrologi, melakukan rehabilitasi minimal 10% dari kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan,
4. Mendorong penerapan konsep *green living* pada kawasan permukiman melalui efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang lebih baik.
5. Pada sektor industri dan kegiatan ekonomi, direkomendasikan penerapan teknologi bersih (*clean technology*) dengan target pengurangan emisi polutan udara hingga sekitar 50% serta pengurangan emisi karbon sekitar 40% melalui efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan.
6. Pembangunan wilayah diarahkan untuk menerapkan pendekatan *land sharing*, yaitu memadukan kegiatan pembangunan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis dan produktivitas lahan.

Temuan dalam KLHS RTRW tersebut menunjukkan bahwa isu banjir, perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan perkotaan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Kota Pontianak.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 dimaksudkan sebagai sarana penyediaan informasi lingkungan hidup daerah yang disusun berdasarkan data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen ini memuat gambaran kondisi lingkungan hidup, kecenderungan perubahannya, serta keterkaitannya dengan aktivitas pembangunan di Kota Pontianak. Adapun tujuan penyusunan SLHD adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mengolah data lingkungan hidup untuk menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup serta mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang di Kota Pontianak.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan tekanan terhadap lingkungan hidup serta menelaah kecenderungan perubahan tekanan tersebut dalam kurun waktu tertentu.
3. Menilai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan langkah pengendalian guna meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi potensi pencemaran maupun kerusakan lingkungan.
4. Memberikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan agenda pengelolaan lingkungan hidup daerah pada periode selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 mencakup pembahasan mengenai kondisi lingkungan hidup daerah berdasarkan data periode pelaporan, serta analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kota Pontianak. Penulisan dokumen ini disusun secara terstruktur sesuai kerangka analisis yang digunakan, sehingga setiap bagian

saling berkaitan dan memberikan gambaran yang utuh. Cakupan pembahasan dalam dokumen ini meliputi:

1. Gambaran umum wilayah Kota Pontianak yang berkaitan dengan karakteristik fisik, sosial, dan dinamika pembangunan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.
2. Identifikasi dan analisis faktor penggerak serta sumber tekanan terhadap lingkungan hidup, termasuk kecenderungan perkembangannya dalam periode pelaporan.
3. Penyajian status kualitas lingkungan hidup berdasarkan indikator yang relevan dengan kondisi daerah, antara lain kualitas air, kualitas udara, pengelolaan persampahan, serta perubahan penggunaan lahan.
4. Uraian mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sebagai akibat dari tekanan yang terjadi.
5. Pembahasan mengenai kebijakan dan langkah pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan sebagai respons terhadap isu dan permasalahan lingkungan yang diidentifikasi.

Ruang lingkup penulisan ini disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan dan keandalan data serta kesesuaian indikator dengan karakteristik Kota Pontianak, sehingga dokumen yang dihasilkan mampu memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup secara proporsional dan kontekstual.

BAB II

ANALISIS ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Perubahan kualitas lingkungan hidup di Kota Pontianak tidak dari akumulasi dari berbagai dinamika pembangunan yang terus berkembang. Pertumbuhan penduduk, peningkatan kepadatan kawasan, serta perkembangan aktivitas ekonomi menjadi faktor utama yang memicu intensifikasi pemanfaatan ruang dan sumber daya alam (*Driving force*). Seiring meningkatnya kebutuhan perumahan, transportasi, konsumsi energi, dan layanan perkotaan, tekanan terhadap lingkungan pun semakin besar. Kondisi tersebut tercermin pada bertambahnya volume limbah domestik, meningkatnya produksi sampah, serta terjadinya perubahan penggunaan lahan yang berimplikasi pada berkurangnya fungsi ekologis wilayah. Situasi ini semakin kompleks apabila tidak diimbangi dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tekanan (*Pressure*) terhadap lingkungan merupakan konsekuensi logis dari aktivitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Setiap bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, baik melalui kegiatan transportasi, perdagangan dan jasa, konstruksi, industri, maupun ekspansi kawasan permukiman yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan apabila tidak dikelola secara bijak. Tekanan tersebut dapat mempengaruhi sistem hidrologi, kualitas udara ambien, struktur tanah, serta keseimbangan ekosistem perkotaan. Dalam jangka panjang, tekanan yang tidak terkendali akan mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Pontianak.

Kondisi aktual lingkungan hidup (*State*) menggambarkan hasil interaksi antara faktor pemicu dan tekanan yang berlangsung dalam periode tertentu. Evaluasi terhadap kondisi ini dilakukan dengan menelaah berbagai

indikator, seperti mutu perairan, kualitas udara, dinamika tutupan lahan, kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi, serta perubahan karakter kawasan perkotaan. Gambaran kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan situasi terkini, tetapi juga memberikan indikasi arah perubahan di masa mendatang. Oleh karena itu, analisis kondisi lingkungan menjadi elemen penting dalam menentukan langkah korektif maupun preventif dalam kebijakan pembangunan daerah.

Dampak lingkungan (*Impact*) merupakan bentuk nyata dari perubahan kondisi yang terjadi. Dampak tersebut dapat dirasakan secara ekologis maupun sosial-ekonomi, seperti meningkatnya risiko banjir akibat perubahan tata guna lahan, gangguan kesehatan akibat penurunan kualitas udara, atau bertambahnya beban ekonomi masyarakat akibat kerusakan lingkungan. Dengan memahami dampak secara komprehensif, hubungan antara aktivitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat dapat dijelaskan secara lebih terukur dan sistematis.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan melakukan berbagai langkah penanganan (*Response*). Respons yang diberikan dapat berupa penguatan regulasi, implementasi program teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat. Respons tersebut diarahkan tidak hanya untuk mengatasi dampak yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah munculnya tekanan baru di masa depan.

Analisis isu lingkungan hidup Kota Pontianak menggunakan kerangka D-P-S-I-R (*Driving Force, Pressure, State, Impact, Response*) untuk memastikan keterkaitan antar-komponen dapat dipahami secara runtut dan logis. Pendekatan ini menempatkan faktor pemicu sebagai awal dari rangkaian proses yang menghasilkan tekanan, membentuk kondisi lingkungan

tertentu, menimbulkan dampak, dan akhirnya memerlukan tindakan penanganan.

Lima komponen yang dianalisis dalam kerangka tersebut meliputi:

1. **Faktor pemicu (*Driving Force*)**, yaitu dinamika sosial, ekonomi, dan kependudukan yang mendorong peningkatan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam.
2. **Tekanan (*Pressure*)**, yaitu bentuk gangguan atau beban terhadap lingkungan yang muncul akibat aktivitas tersebut.
3. **Kondisi (*State*)**, yaitu gambaran mutu dan ketersediaan sumber daya alam pada periode pelaporan.
4. **Dampak (*Impact*)**, yaitu konsekuensi ekologis dan sosial yang timbul akibat perubahan kondisi lingkungan.
5. **Respons (*Response*)**, yaitu kebijakan, strategi, dan tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan tekanan serta memperbaiki kualitas lingkungan.

Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab-akibat antara faktor pendorong pembangunan, tekanan yang ditimbulkan terhadap lingkungan, kondisi eksisting lingkungan hidup, dampak yang muncul, serta respons kebijakan dan program yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Melalui analisis yang sistematis dan berbasis data, dokumen ini menjadi instrumen strategis dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan Kota Pontianak yang berorientasi pada keberlanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa pertumbuhan kota tetap sejalan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.

Analisis dilakukan terhadap delapan matra lingkungan hidup, yaitu:

1. Keanekaragaman Hayati
2. Kualitas Air
3. Laut, Pesisir dan Pantai
4. Kualitas Udara

5. Lahan dan Hutan
6. Pengelolaan Sampah dan Limbah
7. Perubahan Iklim
8. Risiko Bencana

Setiap matra dianalisis secara sistematis dengan dukungan data spasial dan tabular yang mengacu pada daftar tabel utama Buku III. Data yang digunakan merupakan data mutakhir periode pelaporan Tahun 2026 serta tren minimal lima tahun terakhir untuk melihat dinamika perubahan kondisi lingkungan hidup Kota Pontianak.

2.1 Keanekaragaman Hayati

Kota Pontianak sebagai wilayah perkotaan dengan karakteristik lahan rawa, sempadan sungai, dan kawasan terbangun memiliki kondisi keanekaragaman hayati yang khas. Keberadaan flora dan fauna perkotaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan ruang terbuka hijau, vegetasi alami, serta kawasan lindung lokal yang masih tersisa. Dalam konteks Kota Pontianak, keanekaragaman hayati tidak bertumpu pada hutan alam, tetapi lebih pada keberadaan habitat-habitat kecil seperti sempadan Sungai Kapuas dan Sungai Landak, taman kota, vegetasi rawa, serta ruang terbuka hijau lainnya.

A. Driving Force

Perubahan kondisi keanekaragaman hayati di Kota Pontianak terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan wilayah mendorong kebutuhan lahan untuk permukiman, perdagangan, jasa, dan infrastruktur. Akibatnya, ruang terbuka dan vegetasi alami yang sebelumnya berfungsi sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna semakin tertekan.

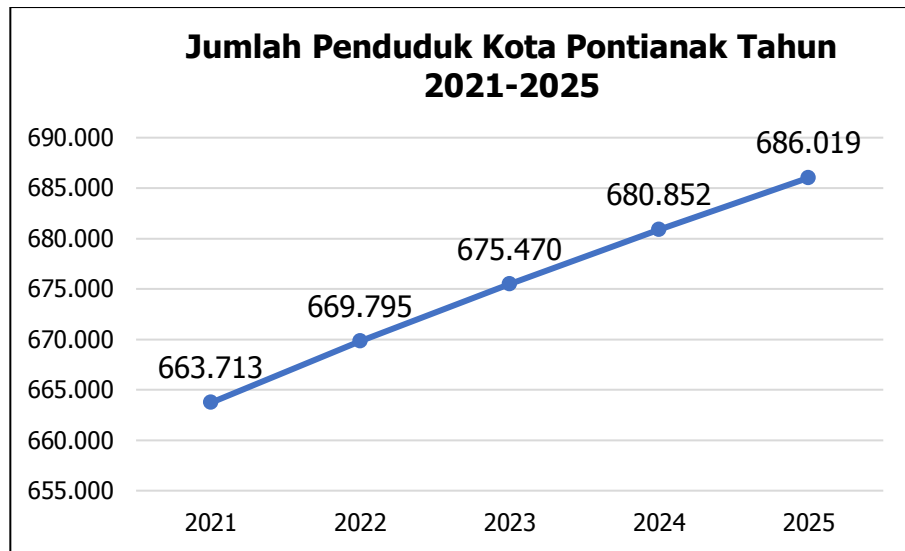
1) Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Kebutuhan Ruang

Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2025 tercatat mencapai 686.019 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 5.803 jiwa per kilometer persegi. Sebaran kepadatan antar kecamatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan, di mana Kecamatan Pontianak Timur memiliki kepadatan tertinggi sebesar 9.468 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan wilayah dengan kepadatan terendah sebesar 3.050 jiwa/km². Dalam periode 2020–2025, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,86 persen per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Pontianak Timur sebesar 1,62 persen per tahun. Komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan juga relatif seimbang, yang tercermin dari rasio jenis kelamin sebesar 99,92.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
1	Pontianak Selatan	16,524	91.483	0,15	5.536
2	Pontianak Tenggara	16,127	49.189	0,03	3.050
3	Pontianak Timur	12,061	114.199	1,62	9.468
4	Pontianak Barat	16,383	152.877	0,87	9.331
5	Pontianak Kota	16,016	124.282	0,21	7.760
6	Pontianak Utara	41,097	153.989	1,54	3.747
Kota Pontianak		118,209	686.019	0,86	5.803

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026



Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026

Kondisi tersebut sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.1** menunjukkan bahwa peningkatan jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk menjadi faktor pendorong (*driving force*) yang signifikan terhadap meningkatnya kebutuhan ruang perkotaan, yang pada akhirnya memberikan tekanan terhadap ketersediaan ruang terbuka serta berimplikasi pada berkurangnya habitat alami di wilayah perkotaan.

2) Pertumbuhan Ekonomi Memperluas Kawasan Terbangun

Perkembangan kegiatan ekonomi mempercepat ekspansi kawasan terbangun untuk mendukung aktivitas perdagangan, jasa, dan kegiatan usaha lainnya. Perkembangan ekonomi tersebut tercermin dalam yang tercermin dalam Tabel dibawah ini, dimana produk domestik bruto mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Tabel 2. 2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

No	Uraian	Dua Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)
1.	a. Pertanian Sempit	545,70	572,44
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2.	Pertambangan dan Penggalan	-	-
3.	Industri Pengolahan	7.956,95	8.560,22
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	258,98	108,77
5.	Bangunan	7.969,18	8.879,30
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	9.488,37	11.843,49
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	7.524,3	8120,49
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5.884,41	6276,88
9.	Jasa-Jasa	5.684,23	
	– Jasa Pendidikan		3.085,99
	– Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		2.276,75
	– Jasa lainnya		848,53
10.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.401,26	4.690,65
11.	Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	157,16	163,26
Produk Domestik Bruto		51.349,89	55.426,77
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas		-	-

Sumber : Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Tabel 2. 3 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

No	Uraian	Dua Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)
1.	a. Pertanian Sempit	389,44	395,73
	– Tanaman Bahan Makanan	-	
	– Tanaman Perkebunan	-	
	– Peternakan dan Hasil-hasilnya	-	

BUKU II – LAPORAN UTAMA**DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)****KOTA PONTIANAK TAHUN 2026**

	b. Kehutanan	-	
	c. Perikanan	-	
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3.	Industri Pengolahan	4.440,73	4470,56
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	172,92	55,23
5.	Bangunan	3.882,36	4 262,08
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5.417,29	6.667,79
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4.977,86	5 347,18
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.409,09	3.586,32
9.	Jasa-Jasa	3.564,06	
	– Jasa Pendidikan		1.859,16
	– Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		1.290,36
	– Jasa lainnya		637,78
10.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.577,03	1.627,59
11.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	120,21	121,98
Produk Domestik Bruto		27.950,99	30.321,76
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas		-	-

Sumber : Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Peningkatan nilai PDRB menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang semakin kuat di Kota Pontianak. Kenaikan ini mencerminkan berkembangnya sektor perdagangan, jasa, dan konstruksi yang mendorong kebutuhan ruang untuk berbagai kegiatan. Pertumbuhan tersebut turut memperluas kawasan terbangun dan meningkatkan pemanfaatan lahan. Perkembangan ini menjadi bagian dari dinamika pembangunan wilayah yang terus berlangsung. Dengan demikian, tren PDRB yang meningkat berperan sebagai penggerak utama perubahan dalam sistem lingkungan perkotaan.

B. Pressure

Tekanan terhadap keanekaragaman hayati di Kota Pontianak tercermin dari perubahan penggunaan lahan dan fluktuasi nilai IKTL. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan kualitas tutupan vegetasi dan ruang

hidup flora fauna. Hal tersebut juga terjadi pada sempadan Sungai Kapuas dan Sungai Landak sebagai koridor ekologis.

1) Perubahan Penggunaan Lahan Menjadi Pemukiman

Perubahan penggunaan lahan di Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 2.4 dimana menunjukkan ruang terbuka dan lahan vegetatif terus mengalami tekanan akibat perluasan kawasan terbangun.

Tabel 2. 4 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

Kota	Luas Lahan Kering Campur Semak (Ha)	Luas Lahan Terbuka (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Pemukiman (Ha)	Luas Tubuh Air (Ha)
Kota Pontianak	0,02	145,03	1.181,10	2.345,46	7.487,82	662,07

Sumber : BPKH Wilayah III Kota Pontianak, 2026

Berdasarkan **Tabel 2.4**, penggunaan lahan di Kota Pontianak didominasi oleh kawasan permukiman seluas 7.487,82 Ha dan perkebunan sebesar 2.345,46 Ha, sedangkan luas lahan terbuka relatif terbatas yaitu 145,03 Ha. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan ruang alami yang berfungsi sebagai habitat flora dan fauna. Dominasi pemanfaatan lahan tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang hidup alami serta menurunnya fungsi vegetasi penyangga di wilayah perkotaan.

2) Fluktuasi Nilai Indeks Kinerja Tutupan Lahan

Perubahan tutupan lahan di wilayah Kota Pontianak menunjukkan adanya dinamika yang mempengaruhi kondisi vegetasi dan ketersediaan habitat alami. Variasi nilai Indeks Kinerja Tutupan Lahan (IKTL) mencerminkan fluktuasi kualitas tutupan vegetasi dari waktu ke waktu. Kondisi ini menggambarkan adanya perubahan yang berpengaruh terhadap keberlanjutan fungsi ekologis di kawasan perkotaan.

Tabel 2. 5 Indeks Kinerja Tutupan Lahan (IKTL)

No	Tahun	IKTL	Selisih dengan tahun sebelumnya
1	2021	29,52	-4,03
2	2022	27,64	-1,88
3	2023	37,75	10,11
4	2024	23,75	-14
5	2025	41,24	17,49

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2026

Keterangan: Terjadi perubahan rumus di tahun 2025

Berdasarkan **Tabel 2.5**, nilai Indeks Kinerja Tutupan Lahan (IKTL) mencerminkan kualitas tutupan vegetasi dalam mendukung fungsi ekologis wilayah, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kondisi vegetasi yang lebih baik dan sebaliknya nilai rendah menunjukkan penurunan kualitas tutupan lahan. Pada periode 2021 hingga 2022 terjadi penurunan nilai IKTL dari 29,52 menjadi 27,64 yang mengindikasikan berkurangnya kualitas vegetasi. Nilai IKTL kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 37,75, namun kembali menurun secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 23,75 yang menunjukkan penurunan kondisi tutupan lahan dalam waktu singkat. Pada tahun 2025, nilai IKTL meningkat menjadi 41,24 meskipun terdapat perubahan metode perhitungan yang perlu diperhatikan dalam interpretasinya. Secara keseluruhan, fluktuasi nilai IKTL tersebut menunjukkan dinamika kualitas vegetasi yang berimplikasi pada perubahan kondisi habitat dan keterhubungan ruang hidup flora dan fauna di Kota Pontianak.

C. State

Kondisi keanekaragaman hayati di Kota Pontianak dapat dilihat dari keberadaan ruang terbuka hijau, kawasan lindung, vegetasi perkotaan, serta jenis flora dan fauna yang masih tercatat. Kota Pontianak memang

tidak memiliki hutan alam, namun masih memiliki elemen-elemen ekologis penting seperti Taman Kehati, sempadan sungai, kawasan lindung, dan vegetasi pada ruang terbuka hijau. Kondisi ini menjadi dasar dalam melihat sejauh mana biodiversitas perkotaan masih dapat dipertahankan.

1) Kondisi Keanekaragaman Hayati Kalbar

Karena belum tersedia data keanekaragaman hayati yang spesifik untuk Kota Pontianak tahun 2025, maka kondisi state kehati masih mengacu pada data Kalimantan Barat. Data ini menunjukkan bahwa Kalimantan Barat memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Namun, kondisi Kota Pontianak yang lebih didominasi kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati di wilayah kota cenderung lebih terbatas dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Barat yang masih memiliki habitat alami lebih luas.

Tabel 2. 6 Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Jenis Tahun 2025

Jenis	Jumlah
Flora	1751
Mamalia	114
Avifauna (burung)	546
Ikan	420
Amfibi	67
Reptiliaia	85
Serangga	200
Jamur	57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar, 2025

2) Kondisi Keanekaragaman Hayati Komoditas Perkotaan

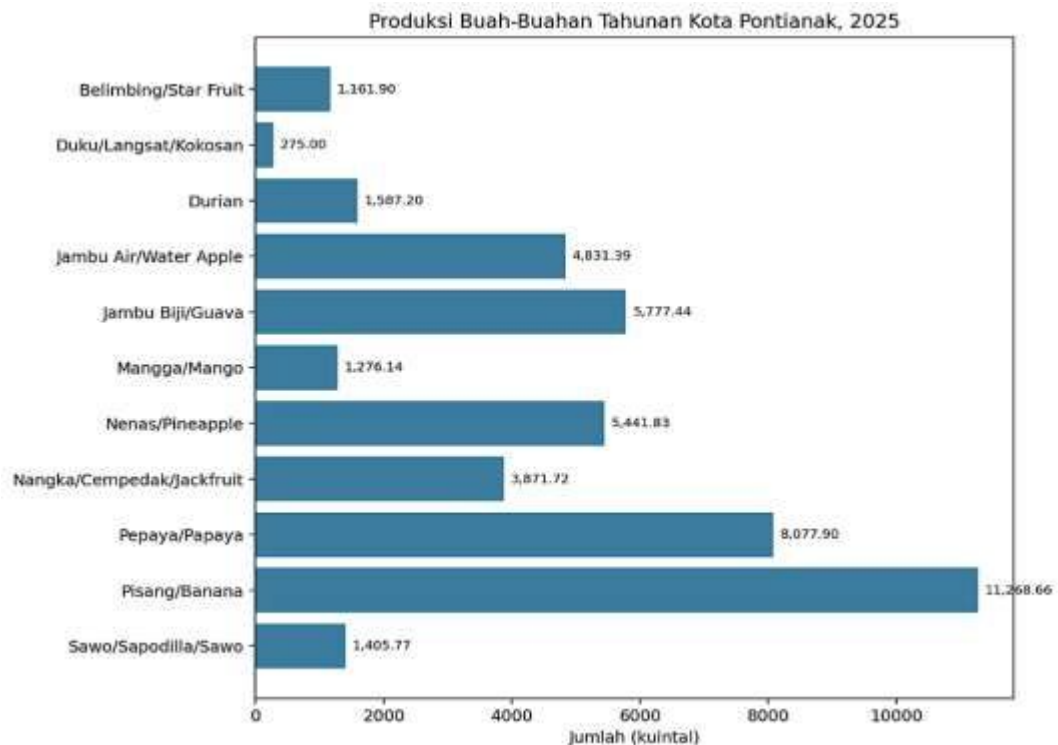
Kondisi keanekaragaman hayati Kota Pontianak tahun 2025 dapat dilihat secara terbatas dari keberadaan komoditas hayati perkotaan, meskipun belum menggambarkan keseluruhan jenis flora dan fauna secara spesifik. Produksi sayuran didominasi oleh kangkung sebesar 37.538,52 kuintal sedangkan produksi buah-buahan terbesar adalah

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

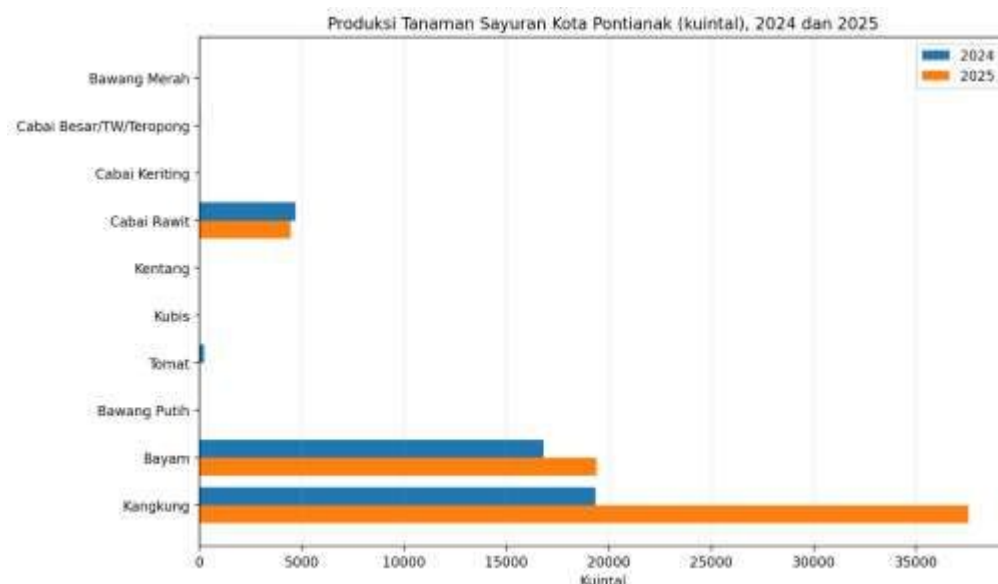
KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

pisang sebesar 11.268,66 kuintal. Pada kelompok biofarmaka, lidah buaya masih menjadi komoditas utama yang produksinya mencapai 1.754.324 kg. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur keanekaragaman hayati budidaya di Kota Pontianak masih ada, namun pada beberapa komoditas telah mengalami penurunan.



Gambar 2. 2 Produksi Buah-Buahan Kota Pontianak, 2025

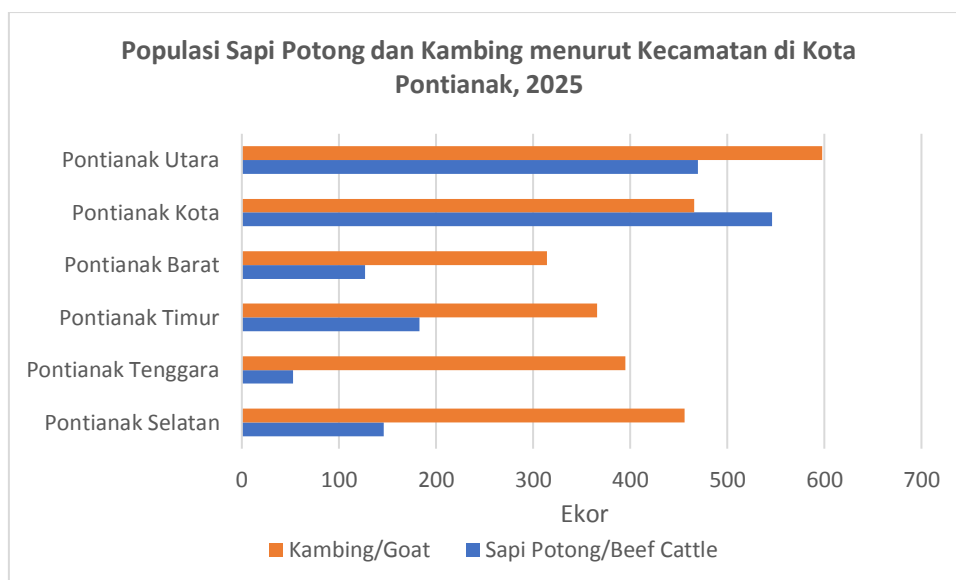
Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

**Gambar 2. 3 Produksi Sayuran Kota Pontianak, 2025**

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026

3) Kondisi Keanekaragaman Hayati Komoditas Ternak

Komponen hayati di Kota Pontianak masih terlihat dari keberadaan ternak dan unggas budidaya. Populasi ternak tercatat mencapai sapi potong, ekor kambing, dan 335 ekor babi. Pada kelompok unggas, populasi terbesar adalah ayam pedaging sebanyak 7.562.344 ekor, diikuti ayam kampung 36.212 ekor, ayam petelur 28.442 ekor, dan itik 2.500 ekor. Kondisi ini menunjukkan bahwa komponen hayati budidaya di Kota Pontianak pada tahun 2025 masih cukup dominan, terutama pada subsektor unggas.



Gambar 2. 4 Populasi Unggas di Kota Pontianak, 2025

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026

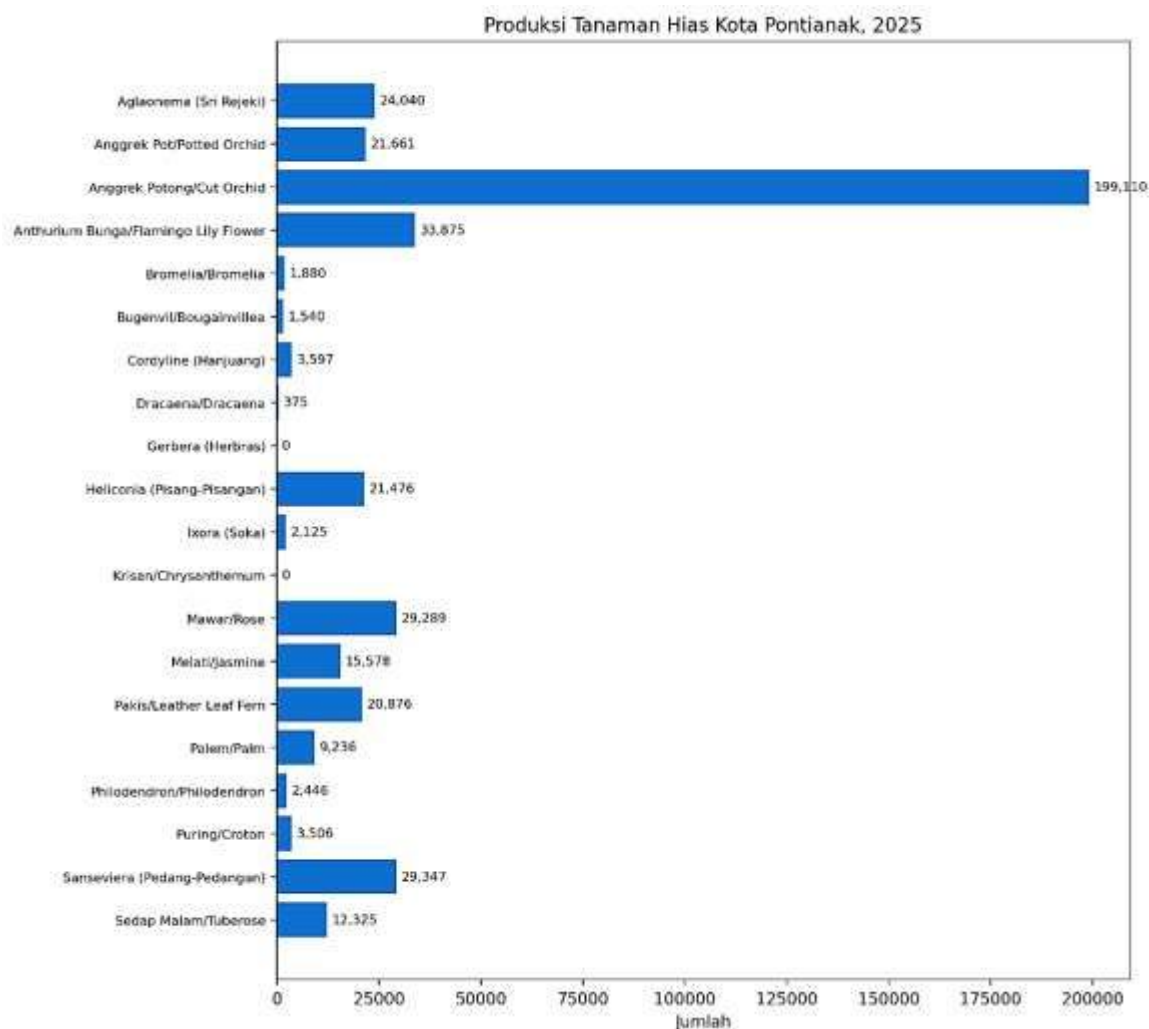
4) Kondisi Keanekaragaman Hayati Komoditas Budidaya

Keanekaragaman hayati budidaya di Kota Pontianak juga tercermin dari komoditas tanaman hias yang masih dibudidayakan masyarakat. Beberapa jenis tanaman hias dengan jumlah tertinggi pada tahun 2025 antara lain Aglaonema 24.040, Anthurium 33.875, Heliconia 21.476, Mawar 29.289, Pakis 20.876, dan Sansevieria 29.347. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur hayati budidaya di Kota Pontianak pada tahun 2025 masih cukup beragam, meskipun didominasi oleh jenis tanaman hias tertentu dan lebih mencerminkan karakter lingkungan perkotaan.

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026



Gambar 2. 5 Produksi Tanaman Hias Kota Pontianak, 2025

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026

D. Impact

Penurunan kualitas keanekaragaman hayati di Kota Pontianak berdampak pada melemahnya fungsi ekologis lingkungan perkotaan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh flora dan fauna, tetapi juga oleh masyarakat yang bergantung pada kenyamanan dan kualitas lingkungan kota.

- 1) Berkurangnya ruang hidup flora dan fauna menunjukkan adanya penurunan daya dukung habitat perkotaan.

- 2) Penurunan kualitas tutupan lahan pada **Tabel 2.5** berdampak pada menurunnya fungsi vegetasi dalam menjaga tata air, menahan limpasan, dan memperbaiki kualitas udara.
- 3) Keterbatasan RTH dan vegetasi pada wilayah perkotaan berpotensi meningkatkan suhu mikro.
- 4) Berkurangnya vegetasi dan habitat alami menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan dalam mengatur suhu, menyerap air hujan, dan menjaga kualitas udara serta menurunkan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat
- 5) Melemahnya fungsi ekologis sempadan Sungai Kapuas dan Sungai Landak juga dapat memperbesar tekanan terhadap kualitas lingkungan riparian dan keseimbangan ekosistem lokal.

E. Response

Upaya menjaga keanekaragaman hayati di Kota Pontianak dilakukan melalui perlindungan habitat perkotaan, penguatan ruang terbuka hijau, dan pengelolaan kawasan lindung. Pendekatan yang dilakukan lebih diarahkan pada konservasi skala lokal, perlindungan ruang ekologis, dan penguatan vegetasi perkotaan. Kebijakan ini penting karena Kota Pontianak tidak bertumpu pada hutan alam, tetapi pada kualitas elemen-elemen ekologis perkotaan yang masih tersedia.

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
 - Melaksanakan Kegiatan Adiwiyata di Lingkungan Sekolah Kota Pontianak
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan rutin anggota Saka Kalpataru dalam pelaksanaan 3 (tiga) Krida yaitu Krida 3R, Krida Perubahan Iklim dan Krida Keanekaragaman Hayati serta keikutsertaan aktif diberbagai kegiatan/event besar lingkungan.

- Kegiatan dalam rangka memperingati *Earth Hour* yang diselenggarakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Tujuan peringatan *Earth Hour* ini bagi peserta kegiatan adalah sharing informasi bagaimana cara memaknai *Earth Hour* di kehidupan sehari-hari menjaga bumi dari kerusakan lingkungan.

2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

- Sosialisasi Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata bagi SD dan SMP Swasta di Kota Pontianak untuk membantu sekolah peserta sosialisasi menjadi sekolah adiwiyata.



Gambar 2. 6 Sosialisasi Sekolah Adiwiyata

- Sosialisasi Konsep Baru Adipura. Sosialisasi ditujukan kepada peserta yang merupakan pihak yang menjadi titik pantau adipura.



Gambar 2. 7 Sosialisasi Konsep Baru Adipura

- *Focus Group Discussion* Kolaborasi Pemerintah dan Penggiat Lingkungan di Kota Pontianak untuk Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, komunitas yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang ada di Kota Pontianak untuk saling berdiskusi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kota Pontianak



Gambar 2. 8 FGD Kolaborasi pemerintah dan Penggiat Lingkungan

3) Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi

Kegiatan penghijauan dan reboisasi yang dilakukan Kota Pontianak sebagaimana tercantum pada **Tabel 2.7** berperan dalam meningkatkan kualitas vegetasi dan memperluas fungsi ekologis kawasan kota.

Tabel 2. 7 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi Kota Pontianak

No	Lokasi Penanaman	Penghijauan			
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (Batang)
1	Jl. dr. Soedarso	1	0,4	89	89 (Ketapang Kencana Variegata)
2	Jl. Median Ahmad Yani	2	1,11	500	500 (Tekoma)
3	Jl. Median Paralel Sungai Jawi	0,55	0,19	500	500 (Tekoma)
4	Jl. Median Husein Hamzah	1	0,5	170	170 (Tekoma)
5	Jl. Ampera	1	0,29	50	50 (Tekoma)

Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025

4) Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013–2033, pengembangan kawasan lindung, ruang terbuka hijau, dan sempadan sungai yang terdiri dari Kawasan lindung gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter tercatat sekitar 641 hektar, sedangkan total kawasan lindung gambut mencapai sekitar 1.607 hektar atau 14,9% dari luas wilayah kota. RTH publik Kota Pontianak seluas 20,16 km² dari total wilayah 107,82 km², yang terdiri atas taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, pemakaman umum, hutan kota, dan agrowisata/KSA.

Tabel 2. 8 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Pontianak

No	Jenis RTH	Luas		Persentase
		Wilayah Kota (Km ²)	RTH (Km ²)	
1	Taman Kota	107,82	4,9	4,5
2	Jalur Hijau	107,82	1,6	1,5
3	Lapangan Olahraga	107,82	0,65	0,6
4	Pemukaman Umum	107,82	0,45	0,4
5	Hutan Kota	107,82	2,56	2,4

No	Jenis RTH	Luas		Persentase
		Wilayah Kota (Km ²)	RTH (Km ²)	
6	Agrowisata/KSA	107,82	10	9,3
Jumlah		107,82	20,16	1,7

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2024

5) Pengelolaan RTH Publik dan RTH Privat

Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013–2033, RTH di Kota Pontianak dibagi menjadi dua jenis, yaitu RTH publik dan RTH privat. RTH publik mencakup taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, jalur hijau di median jalan atau tepi jalan, pemakaman umum, serta kawasan agrowisata atau sentra agro bisnis. Sedangkan RTH privat meliputi halaman rumah, pekarangan kantor, area sekitar fasilitas umum, taman atap bangunan, dan halaman pertokoan atau tempat usaha. Kota Pontianak sendiri memiliki beberapa lokasi hutan kota yang berfungsi sebagai RTH publik dengan total luas mencapai sekitar 2,56 km². Lokasi-lokasi tersebut antara lain terdapat di area:

- Pendopo Gubernur Kalimantan Barat
- Arboretum Universitas Tanjungpura
- Hutan Kota di kawasan Siantan Hulu dan Siantan Hilir
- Hutan Kota Batu Layang.
- Rencana Hutan Kota delta bekas Sungai Malaya
- Rencana Hutan Kota Bukit Reel,
- Rencana Hutan Kota Kelurahan Parit Mayor.

6) Pengelolaan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di Kota Pontianak diarahkan agar tetap sesuai RTRW 2013–2033 untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan lingkungan. Pemanfaatannya didominasi lahan pertanian sekitar 49,9% dari luas wilayah kota, diikuti kawasan perumahan dan

permukiman sekitar 34,2%, sedangkan sekitar 15,9% lainnya diperuntukkan bagi fasilitas pendukung seperti perkantoran, pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, dan infrastruktur lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang kota masih didominasi fungsi budidaya yang mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan penduduk.

7) Pengembangan dan Pengelolaan Taman Kehati

Pengembangan dan pengelolaan Taman Kehati pada **Tabel 2.9** juga menjadi salah satu bentuk perlindungan biodiversitas perkotaan yang spesifik dan relevan dengan kondisi Kota Pontianak, terutama dalam menjaga keberadaan vegetasi lokal, memperkuat fungsi ekologis kawasan kota, dan mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati pada ruang terbuka hijau yang masih tersedia.

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Tabel 2. 9 Data Taman Kehati

No	Nama Taman Keanekaragaman Hayati	Lokasi (Nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Posisi Geografis	Luas Area	Jenis Tanaman Endemik	Spesies Kunci Merujuk Rantai Ekosistem	Pemanfaatan Taman Keanekaragaman Hayati	Pemanfaatan Tanaman Endemik	Pengelola	Pihak Lain Yang Dilibatkan Dalam Pengelolaan
1	Belum Ada Nama	Kawasan Kolam Renang Ampara, Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Provinsi Kalimantan Barat	Terletak di antara 0o 02' 35" - 0o 02' 45" Lintang Selatan dan antara 109o 17'20" E - 109o 17' 30" Bujur Timur	1,96 Ha	1. Pohon Angsana 2. Pohon Mahoni 3. Anggrek Merpati 4. Kelapa 5. Pohon Karet 6. Pohon Leban 7. Pohon Mahang 8. Pohon Baruh 9. Pohon Pulau	a. Satwa Penyerbuk: 1. Burung Madu Sriganti 2. Burung Madu Polos 3. Burung Madu Kelapa 4. Burung Madu Sepah Raja 5. Burung Pijantung Kecil b. Satwa Pemencar Biji atau Benih: 1. Burung Merbah Corok-Corok 2. Burung Merbah Belukar 3. Burung Merbah Gunung 4. Burung Merbah Kacamata 5. Burung Cucak Kuricang 6. Burung Rumbai Tungging 7. Burung Cucak Kutilang 8. Burung Bentet Loreng 9. Burung Bondol Kalimantan 10. Burung Bubut Alang-Alang 11. Burung Cabai Bunga Api 12. Burung Cinenen Kelabu 13. Burung Cinenen Merah 14. Burung Kancilan	a. Fungsi Konservasi (Pelestarian) b. Fungsi Edukasi dan Penelitian c. Fungsi Jasa Lingkungan dan Ekologis d. Fungsi Rekreasi dan Jasa Budaya e. Pemanfaatan Ekonomi Lokal	a. Konservasi (Pelestarian) b. Kesehatan (Obat-Obatan) c. Lingkungan d. Ekonomi dan Edukasi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak	1. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Pontianak 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

No	Nama Taman Keanekaragaman Hayati	Lokasi (Nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Posisi Geografis	Luas Area	Jenis Tanaman Endemik	Spesies Kunci Merujuk Rantai Ekosistem	Pemanfaatan Taman Keanekaragaman Hayati	Pemanfaatan Tanaman Endemik	Pengelola	Pihak Lain Yang Dilibatkan Dalam Pengelolaan
						Kalimantan 15. Burung Kipasan Belang 16. Burung Ciungair Coreng Kalimantan 17. Musang 18. Kelelawar c. Satwa Pengendali Hama dan Penyakit 1. Ular Sanca Kembang 2. Biawak Air				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

2.2 Kualitas Air

Air merupakan komponen lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Kota Pontianak, terutama karena keberadaan Sungai Kapuas dan Sungai Landak sebagai sistem perairan utama kota. Kedua sungai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber air baku, tetapi juga menjadi sarana transportasi, drainase alami, dan penerima beban pencemar dari berbagai aktivitas perkotaan. Oleh karena itu, kualitas air di Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan pengelolaan lingkungan di sepanjang sistem Sungai Kapuas, Sungai Landak, dan jaringan parit yang terhubung dengannya.

A. Driving Force

Penurunan kualitas air di Kota Pontianak didorong oleh meningkatnya kebutuhan air dan bertambahnya aktivitas yang menghasilkan limbah cair. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan meningkatkan interaksi langsung masyarakat dengan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di sisi lain, perkembangan ekonomi juga memperbesar potensi timbulan limbah dari kegiatan domestik maupun usaha.

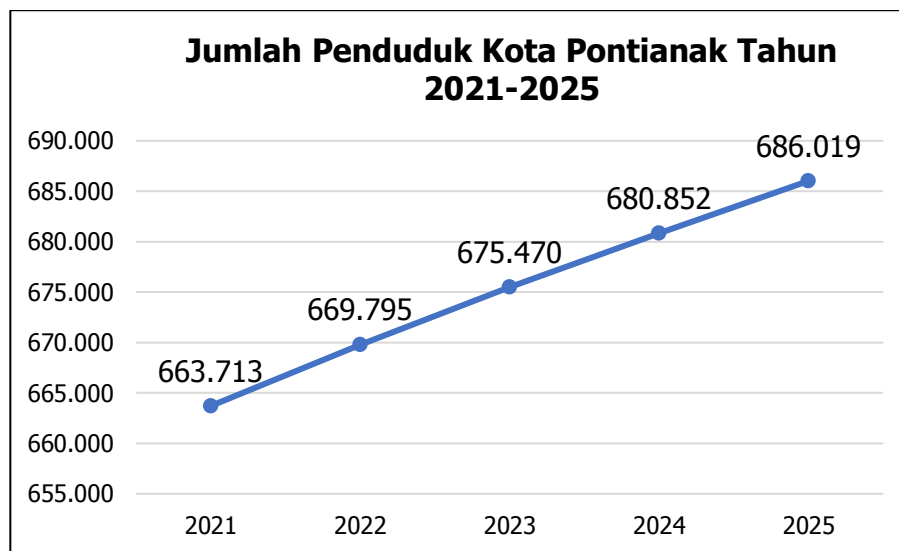
1) Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Timbulan Limbah Cair

Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2025 tercatat mencapai 686.019 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 5.803 jiwa per kilometer persegi. Sebaran kepadatan antar kecamatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan, di mana Kecamatan Pontianak Timur memiliki kepadatan tertinggi sebesar 9.468 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan wilayah dengan kepadatan terendah sebesar 3.050 jiwa/km². Dalam periode 2020–2025, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,86 persen per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Pontianak Timur sebesar 1,62 persen per tahun.

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
1	Pontianak Selatan	16,524	91.483	0,15	5.536
2	Pontianak Tenggara	16,127	49.189	0,03	3.050
3	Pontianak Timur	12,061	114.199	1,62	9.468
4	Pontianak Barat	16,383	152.877	0,87	9.331
5	Pontianak Kota	16,016	124.282	0,21	7.760
6	Pontianak Utara	41,097	153.989	1,54	3.747
Kota Pontianak		118,209	686.019	0,86	5.803

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026



Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Pontianak mencerminkan bertambahnya aktivitas domestik dan kebutuhan ruang perkotaan. Kondisi ini berimplikasi pada peningkatan kebutuhan air, timbunan

air limbah domestik, serta limpasan permukaan yang berpotensi memengaruhi kualitas air badan air. Keterkaitan tersebut semakin kuat pada kawasan permukiman yang berkembang dan terhubung langsung ke sungai sehingga air limbah cair rumah tangga pada sebagian kawasan masih berpotensi masuk ke badan air tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor pendorong penting yang memengaruhi dinamika kualitas air permukaan di Kota Pontianak, khususnya pada Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

2) Pertumbuhan Ekonomi Menambah Beban Pencemar Sektor Usaha/Jasa

Perkembangan kegiatan ekonomi di Kota Pontianak mendorong peningkatan intensitas pemanfaatan ruang untuk perdagangan, jasa, permukiman, dan berbagai kegiatan usaha lainnya. Dalam konteks kualitas air, pertumbuhan tersebut berkaitan dengan meningkatnya aktivitas yang berpotensi menambah timbunan air limbah domestik dan beban pencemar ke badan air permukaan, terutama pada kawasan yang berkembang di sekitar Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pontianak dalam dua tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

No	Uraian	Dua Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)
1.	a. Pertanian Sempit	545,70	572,44
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

No	Uraian	Dua Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)
	c. Perikanan		
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3.	Industri Pengolahan	7.956,95	8.560,22
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	258,98	108,77
5.	Bangunan	7.969,18	8.879,30
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	9.488,37	11.843,49
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	7.524,3	8120,49
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5.884,41	6276,88
9.	Jasa-Jasa	5.684,23	
	– Jasa Pendidikan		3.085,99
	– Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		2.276,75
	– Jasa lainnya		848,53
10.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.401,26	4.690,65
11.	Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	157,16	163,26
Produk Domestik Bruto		51.349,89	55.426,77
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas		-	-

*Sumber : Kota Pontianak dalam Angka, 2026***Tabel 2. 12 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan**

No	Uraian	Dua Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)
1.	a. Pertanian Sempit	389,44	395,73
	– Tanaman Bahan Makanan	-	
	– Tanaman Perkebunan	-	
	– Peternakan dan Hasil-hasilnya	-	
	b. Kehutanan	-	
	c. Perikanan	-	
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3.	Industri Pengolahan	4.440,73	4470,56
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	172,92	55,23
5.	Bangunan	3.882,36	4 262,08

BUKU II – LAPORAN UTAMA**DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)****KOTA PONTIANAK TAHUN 2026**

6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5.417,29	6.667,79
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4.977,86	5 347,18
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.409,09	3.586,32
9.	Jasa-Jasa	3.564,06	
	– Jasa Pendidikan		1.859,16
	– Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		1.290,36
	– Jasa lainnya		637,78
10.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.577,03	1.627,59
11.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	120,21	121,98
Produk Domestik Bruto		27.950,99	30.321,76
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas		-	-

Sumber : Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Peningkatan nilai PDRB menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Pontianak terus berkembang. Kondisi ini mencerminkan bertambahnya kegiatan perdagangan, jasa, dan usaha perkotaan yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan kebutuhan air, volume air limbah domestik per hari, serta intensitas pemanfaatan lahan pada kawasan perkotaan. Dalam kaitannya dengan kualitas air permukaan, perkembangan tersebut juga dapat dilihat dari keberadaan usaha di sempadan sungai dan distribusi kawasan padat penduduk di sekitar Sungai Kapuas dan Sungai Landak, yang berpotensi memperbesar tekanan terhadap badan air. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan usaha menjadi salah satu faktor pendorong utama yang memengaruhi dinamika kualitas air di Kota Pontianak.

B. Pressure

Tekanan terhadap kualitas air di Kota Pontianak terutama berasal dari limbah domestik, limbah usaha, dan limpasan permukaan dari kawasan terbangun. Sungai Kapuas dan Sungai Landak menerima akumulasi

beban pencemar dari berbagai aktivitas di daratan, baik secara langsung maupun melalui jaringan parit. Tekanan ini meningkat ketika sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi belum sepenuhnya mampu menahan masuknya pencemar ke badan air.

1) Keterbatasan sumber air bersih

Kondisi akses air bersih pada **Tabel 2.13** menunjukkan bahwa masih terdapat tekanan terhadap kualitas air di Kota Pontianak

Tabel 2. 13 Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Bersih

Kota	Mata Air	Ledeng/PAM	Sumur	Air Permukaan	Hujan	Kemasan (Liter)	Lainnya
Kota Pontianak	TAD	139,325	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Tekanan terhadap kualitas air di Kota Pontianak terlihat dari tingginya ketergantungan masyarakat terhadap air ledeng/PAM sebagai sumber utama air bersih, sedangkan sumber air lainnya tidak tercatat dalam data. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan mutu air baku akan langsung memengaruhi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat karena alternatif sumber air yang dimanfaatkan relatif terbatas.

2) Limpasan Air Hujan dari Kawasan Terbangun

Limpasan hujan dari kawasan terbangun membawa sedimen, minyak, dan bahan organik ke badan air, terutama pada kawasan dengan permukaan kedap air yang tinggi.

3) Limbah Cair Industri dan Budidaya Pertanian

Buangan dari kegiatan industri khususnya yang berada di sekitar badan air ataupun membuang limbah cair ke badan air dapat menjadi salah satu sumber utama penurunan mutu air apabila hasil samping proses produksinya dilepas ke sungai, parit, atau badan air lainnya tanpa penanganan terlebih dahulu.

Kegiatan budidaya pertanian turut berpotensi memengaruhi kualitas air melalui sisa penggunaan bahan kimia pertanian, seperti pupuk dan pestisida. Bahan tersebut dapat terbawa limpasan air ke perairan sekitar dan menurunkan kondisi mutu air secara bertahap.

C. State

Kondisi kualitas air di Kota Pontianak dapat dilihat dari status mutu air permukaan yang digunakan masyarakat. Indeks kualitas air adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Air (IKA) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut, parameter yang dijadikan acuan meliputi Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform. Standar baku mutu untuk parameter-parameter tersebut mengacu pada kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI.

1) Nilai Indeks Kualitas Air di Kota Pontianak

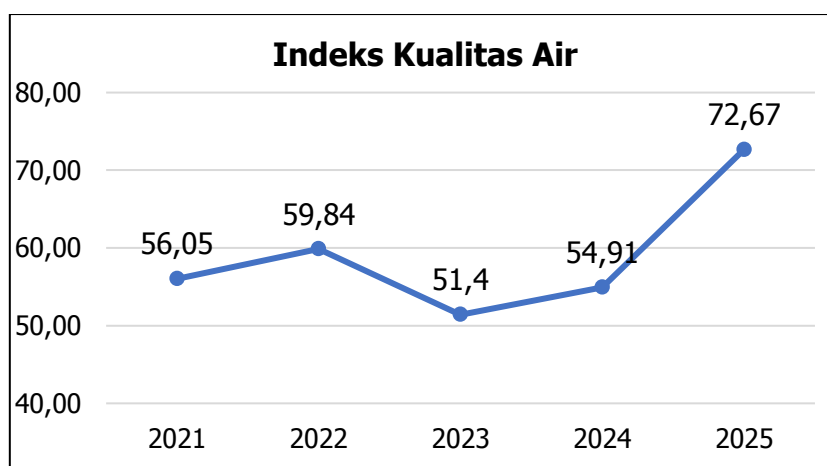
Nilai Indeks Kualitas Air pada **Tabel 2.14** memberikan gambaran umum mengenai status kualitas air di Kota Pontianak.

Tabel 2. 14 Indeks Kualitas Air

No	Tahun	IKA	Kategori
1	2021	56,05	Sedang
2	2022	59,84	Sedang
3	2023	51,4	Sedang
4	2024	54,91	Sedang
5	2025	72,67	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

catatan: terjadi perubahan rumus di tahun 2025



Gambar 2. 10 Grafik Indeks Kualitas Air

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.14**, nilai Indeks Kualitas Air Kota Pontianak selama tahun 2021–2025 berada pada kategori sedang. Nilai IKA berfluktuasi dari 56,05 pada tahun 2021, meningkat menjadi 59,84 pada tahun 2022, menurun menjadi 51,4 pada tahun 2023, kemudian naik kembali menjadi 54,91 pada tahun 2024 dan 72,67 pada tahun 2025. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kota Pontianak masih berada pada tingkat yang perlu mendapat perhatian, karena belum menunjukkan kondisi yang baik secara konsisten sehingga upaya pengendalian dan pengelolaan kualitas air tetap perlu diperkuat.

2) Kualitas Air Permukaan di Kota Pontianak

Parameter kualitas air seperti BOD, COD, dan TSS pada **Tabel 2.15** menunjukkan tingkat beban pencemar yang masuk ke badan air utama, termasuk Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

Tabel 2. 15 Kualitas Air Sungai

Nama Sungai	Suhu (°C)	pH	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas	T-P (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal Coliform
Sungai Landak	28,3	8	81	65	3,0	0,53	41	0,047	0,02	0,256	0,056	54
	28,5	7	90	59	3,0	0,88	40	<0,011	0,01	0,066	0,056	12
	28,5	5	137	84	3,0	0,7	24	0,032	0,01	0,052	0,05	12

BUKU II – LAPORAN UTAMA**DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)****KOTA PONTIANAK TAHUN 2026**

Nama Sungai	Suhu (°C)	pH	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas	T-P (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal Coliform
	28,9	5	58	64	3,0	0,53	31	0,052	0,01	0,127	0,051	<1,8
	29,2	5	65	60	3,0	0,35	41	0,054	0,03	0,073	0,05	17
	30,1	5	95	57	4,0	0,7	40	0,025	0,02	0,078	0,05	<1,8
	29,3	5	83	78	4,0	1,05	26	0,026	0,02	0,056	0,037	<1,8
	30,1	5	67	72	4,0	1,05	56	0,228	0,02	0,297	0,036	<1,8
	29,8	5	76	51	3,0	1,93	40	0,051	0,01	0,042	0,038	<1,8
Sungai Kapuas Kecil	29,5	6	98	56	4	0,88	6	0,036	0,02	0,072	0,048	2
	30	6	52	53	5	0,53	8	0,042	0,04	0,178	0,05	2
	29,7	6	58	62	5	1,58	13	0,05	0,03	0,07	0,05	20
	29,6	6	53	66	4	1,76	11	0,039	0,02	0,083	0,048	<1,8
	30,1	6	115	51	4	0,35	5	0,039	0,02	0,094	0,049	<1,8
	30,1	6	65	60	4	0,7	8	0,04	0,01	0,072	0,048	2
	30	6	52	69	4	0,35	4	0,016	0,01	0,077	0,049	2
	29,4	6	67	63	4	0,18	5	<0,011	0,03	0,074	0,056	<1,8
	29,7	6	57	64	5	0,88	5	0,053	0,01	0,083	0,056	54
Sungai Kapuas Besar	30,1	8	69	45	4,0	0,530	12	0,108	0,020	0,099	0,066	39
	30	7	55	49	4,0	0,88	28	0,014	0,01	0,073	0,064	12
	29,7	7	58	44	4,0	0,7	19	0,04	0,02	0,068	0,065	4
	30	7	58	49	4,0	0,88	22	0,038	0,02	0,079	0,056	2
	30,5	7	60	53	4,0	0,35	34	0,02	0,02	0,061	0,056	4
	30,1	7	80	33	4,0	1,23	29	0,277	0,03	0,093	0,066	28
	30,1	7	55	59	4,0	0,53	20	0,046	0,03	0,068	0,056	33
	30,3	7	53	41	4,0	0,18	12	0,023	0,03	0,07	0,057	54
	30,5	7	47	43	5,0	1,93	15	0,032	0,02	0,059	0,049	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

Kualitas air pada sungai-sungai utama di Kota Pontianak masih menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian. Sungai Landak cenderung mengalami tekanan kualitas air yang lebih besar yang terlihat dari nilai TSS dan COD yang relatif tinggi serta kadar DO yang rendah, sehingga mengindikasikan adanya beban pencemar dari padatan tersuspensi dan bahan organik. Sungai Kapuas Kecil memperlihatkan kondisi yang relatif lebih baik pada beberapa parameter, namun masih menunjukkan adanya tekanan dari TSS, BOD, serta fecal coliform pada titik-titik tertentu yang mengarah pada pengaruh aktivitas domestik dan sanitasi lingkungan. Sementara itu, Sungai Kapuas Besar berada pada kondisi yang juga

masih tertekan, terutama ditunjukkan oleh keberadaan COD, amonia, dan fecal coliform pada beberapa lokasi pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa badan air di Kota Pontianak masih menghadapi tekanan pencemaran yang berasal dari aktivitas di wilayah perkotaan, sehingga pengelolaan kualitas air, pengendalian limbah domestik, serta perbaikan sanitasi lingkungan di kawasan sekitar sungai perlu terus diperkuat.

D. Impact

Penurunan kualitas air di Kota Pontianak memberikan dampak langsung terhadap fungsi Sungai Kapuas dan Sungai Landak sebagai sumber air baku dan bagian dari sistem ekologis kota. Apabila kualitas air kedua sungai tersebut menurun, maka biaya pengolahan air meningkat dan risiko kesehatan masyarakat juga bertambah. Dampak ini juga dirasakan pada kualitas lingkungan permukiman yang berada di sepanjang sungai dan parit.

- 1) Penurunan mutu air berimplikasi terhadap terganggunya keseimbangan ekosistem perairan serta menurunnya fungsi ekologis badan air, termasuk berkurangnya kualitas habitat biota perairan di Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar dan saluran air perkotaan lainnya.
- 2) Pencemaran pada badan air dan parit menurunkan kenyamanan lingkungan permukiman, yang ditandai oleh timbulnya bau, perubahan warna, dan meningkatnya kekeruhan air sehingga memengaruhi kualitas lingkungan sekitar secara visual maupun fungsional.
- 3) Akumulasi sampah dan limbah dalam saluran air dapat menghambat aliran air dan menurunkan kapasitas drainase, sehingga meningkatkan potensi genangan dan banjir, terutama pada periode curah hujan tinggi.

- 4) Kondisi kualitas air yang menurun dan sanitasi lingkungan perairan yang buruk dapat mendorong berkembangnya vektor penyakit, seperti nyamuk dan lalat, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, terutama penyakit yang berkaitan dengan air dan sanitasi lingkungan.

Tabel 2. 16 Penyakit Utama yang Diderita Masyarakat

Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
Kota Pontianak	Essential (primary) hypertension	54.409
	Acute nasopharyngitis (common cold)	44.912
	Dyspepsia	28.448
	Acute upper respiratory infection, unspecified	20.575
	Non-insulin-dependent diabetes melitus	19.522
	Acute pharyngitis	15.004
	Acute upper respiratory infection of multiple and unspecified sites	14.889
	Myalgia	13.329
	Fever, unspecified	12.535
	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	11.652

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2025

Data penyakit tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Pontianak masih dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Dalam kaitannya dengan matra kualitas air, gangguan kesehatan yang paling relevan umumnya berkaitan dengan penyakit berbasis air dan sanitasi, seperti diare dan penyakit kulit, meskipun jenis penyakit tersebut tidak tampak dominan pada tabel. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kualitas air dan sanitasi lingkungan tetap penting untuk mencegah berkembangnya risiko kesehatan masyarakat.

E. Response

Upaya pengendalian kualitas air di Kota Pontianak diarahkan pada pengurangan beban pencemar ke Sungai Kapuas dan Sungai Landak serta peningkatan pengelolaan limbah domestik dan non-domestik. Pengelolaan kualitas air tidak hanya dilakukan melalui pengawasan teknis, tetapi juga melalui penguatan sanitasi, edukasi masyarakat, dan penegakan regulasi. Upaya yang dilakukan untuk pengendalian pencemaran air adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
 - Kegiatan pemantauan terhadap kualitas air permukaan secara manual dan menggunakan alat pemantauan air (WQMS dan Onimo) di 3 Lokasi (Intake PDAM, Sungai Jawi dan taman Alun Kapuas)



Gambar 2. 11 Pemantauan Kualitas Air Permukaan Manual dan Onlmo

- Aksi Jumat Bersih yaitu kegiatan bersih parit yang melibatkan OPD, Masyarakat, dan Kegiatan Usaha



Gambar 2. 12 Aksi Jumat Bersih

- 2) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat melalui aplikasi SIPEKA (Sistem Pemantauan Kualitas Air) yang memuat data hasil pemantauan kualitas air permukaan



Gambar 2. 13 Aplikasi SIPEKA

- 3) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada media tanah dan air



Gambar 2. 14 Pengisolasian Pencemaran

- 4) Melakukan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota berupa penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar dan pemulihan lingkungan terkontaminasi LB3



Gambar 2. 15 Pemulihan Lingkungan Terkontaminasi LB3

- 5) Memberikan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH untuk Kegiatan Usaha
- 6) Memberikan pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan berupa pengawasan, pembinaan, dan labelisasi kegiatan usaha



Gambar 2. 16 Uji Kualitas Air Limbah Kegiatan Usaha

- 7) Penataan turap di lokasi drainase wilayah Kota Pontianak
- 8) Memberikan sosialisasi atau kampanye keliling di sepanjang bantaran Sungai Kapuas
- 9) Kegiatan pengendalian sungai dan parit seperti dilakukan pembangunan dan penataan *waterfront city* di sepanjang bantaran Sungai Kapuas
- 10) Pemasangan banner/spanduk/baliho untuk larangan membuang sampah di lahan kosong/saluran/parit/sungai
- 11) Melaksanakan program animas dan kotakau dalam pembangunan IPAL Komunal skala permukiman dan kawasan
- 12) Rencana pembangunan SPALD-T di dua lokasi Nipah Kuning dan Martapura
- 13) Kegiatan normalisasi parit dan sungai yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.3 Laut, Pesisir, dan Pantai

Kota Pontianak secara administratif tidak termasuk dalam wilayah laut, pesisir, dan pantai, sehingga tidak memiliki ekosistem pesisir secara langsung seperti mangrove, terumbu karang, dan kawasan pantai. Wilayah kota didominasi oleh sistem perairan darat yang terdiri dari Sungai Kapuas, Sungai Landak, dan jaringan parit yang bermuara ke wilayah hilir di luar batas administrasi kota. Oleh karena itu, analisis matra ini di Kota Pontianak lebih ditekankan pada kontribusi kualitas air Sungai Kapuas dan Sungai Landak terhadap kondisi perairan hilir, dengan harapan bahwa pengelolaan kualitas air sungai yang baik akan mencegah pencemaran yang lebih lanjut hingga ke wilayah muara dan laut.

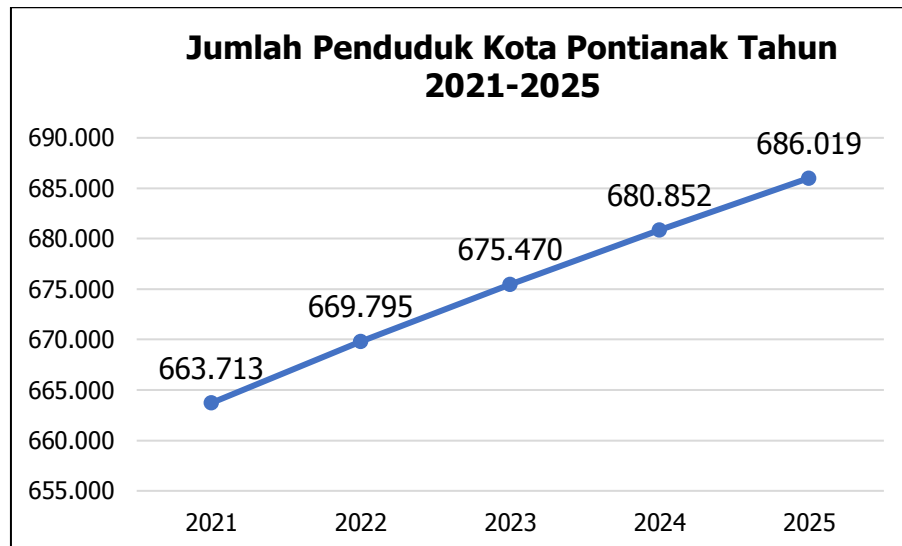
A. Driving Force

Keterkaitan Kota Pontianak dengan wilayah pesisir lebih bersifat tidak langsung, yaitu melalui sistem aliran sungai yang menuju ke hilir. Aktivitas penduduk dan kegiatan ekonomi di Kota Pontianak tetap

berpengaruh terhadap kualitas lingkungan perairan di luar wilayah administrasinya. Dengan demikian, faktor pendorong pada matra ini tetap berasal dari perkembangan perkotaan dan tekanan terhadap sistem Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

1) Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Kebutuhan Air Bersih

Pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan air bersih, aktivitas domestik, serta timbulan air limbah dan sampah rumah tangga. Peningkatan aktivitas tersebut berimplikasi pada semakin besarnya beban buangan yang masuk ke sistem aliran Sungai Kapuas dan Sungai Landak sebagai badan air utama di Kota Pontianak. Mengingat kedua sungai tersebut bermuara ke wilayah perairan yang lebih luas, kondisi ini memengaruhi tekanan terhadap kualitas lingkungan perairan sungai dan kawasan hilir yang terhubung dengan muara.



**Gambar 2. 17 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun
2021-2025**

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026

2) Perkembangan Ekonomi Mendorong Timbulan Limbah Cair Kegiatan Usaha

Perkembangan aktivitas ekonomi berkontribusi terhadap meningkatnya intensitas pemanfaatan ruang dan sumber daya air di Kota Pontianak. Kegiatan perdagangan, jasa, permukiman, dan usaha lainnya berpotensi menambah timbulan limbah cair, sampah, serta residu kegiatan yang dapat masuk ke badan air. Kondisi tersebut pada akhirnya memperbesar potensi beban pencemar yang terbawa melalui sistem perairan Sungai Kapuas dan Sungai Landak menuju wilayah hilir dan kawasan muara.

3) Pengaruh Ekologis Aktivitas Perkotaan Ke Sistem Perairan Hilir

Keterhubungan hidrologis Kota Pontianak dengan wilayah muara menyebabkan aktivitas di kota tetap memiliki pengaruh ekologis terhadap sistem perairan hilir.

B. Pressure

Tekanan terhadap sistem pesisir dari wilayah Kota Pontianak terjadi melalui aliran bahan pencemar yang dibawa oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak menuju wilayah hilir. Meskipun kota ini tidak memiliki wilayah pantai, tekanan terhadap ekosistem hilir tetap terbentuk apabila kualitas air sungai dari wilayah kota menurun. Tekanan tersebut terutama berkaitan dengan limbah domestik, limpasan permukaan, dan sedimen.

1) Limbah Rumah Tangga dan Kegiatan Usaha di Sempadan Sungai

Limbah rumah tangga dan kegiatan usaha di sekitar sungai memperbesar kandungan bahan organik dan pencemar lainnya yang terbawa ke wilayah muara. Tekanan ini bersifat kumulatif karena semua aliran dari wilayah kota pada akhirnya bermuara ke luar wilayah administrasi Kota Pontianak

2) Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan pada **Tabel 2.17** memperbesar limpasan permukaan yang membawa sedimen dan polutan ke Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

**Tabel 2. 17 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan
Utama**

Kota	Luas Lahan Kering Campur Semak (Ha)	Luas Lahan Terbuka (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Pemukiman (Ha)	Luas Tubuh Air (Ha)
Kota Pontianak	0,02	145,03	1.181,10	2.345,46	7.487,82	662,07

Sumber : BPKH Wilayah III Kota Pontianak, 2026

Berdasarkan **Tabel 2.17**, penggunaan lahan di Kota Pontianak didominasi oleh kawasan permukiman seluas 7.487,82 Ha dan perkebunan sebesar 2.345,46 Ha, sedangkan luas lahan terbuka relatif terbatas yaitu 145,03 Ha. Kondisi ini menunjukkan semakin dominannya kawasan terbangun dan area budidaya dibandingkan ruang terbuka alami.

C. State

Kota Pontianak tidak memiliki data langsung mengenai ekosistem mangrove, terumbu karang, dan kualitas air laut dalam wilayah administrasinya. Oleh karena itu, Tabel 23, Tabel 25, dan Tabel 26 tetap dapat dicantumkan sebagai rujukan matra, namun pada praktiknya tidak terisi atau tidak relevan secara langsung untuk wilayah kota. Kondisi yang paling relevan untuk dianalisis adalah kualitas air Sungai Kapuas dan Sungai Landak sebagai penghubung utama ke wilayah hilir dan pesisir.

1) Terdapat Indikator Tidak Sesuai Kondisi Kota Pontianak

Indikator yang termasuk ke dalam komponen state adalah indikator yang menggambarkan kondisi eksisting kualitas lingkungan. Dari daftar tabel utama dokumen SLHD, yang dapat dikategorikan sebagai kondisi laut, pesisir, dan pantai yaitu:

- Tabel 22. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
- Tabel 23. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
- Tabel 24. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
- Tabel 25. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
- Tabel 26. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
- Tabel 27. Kelimpahan Mikroplastik di Permukaan Air Laut dan Sedimen Pantai

Namun demikian, sesuai dengan kondisi Kota Pontianak, data pada Tabel 23, 24, 25, 26, dan 27 tidak tersedia atau tidak relevan, karena indikator tersebut berkaitan langsung dengan ekosistem laut dan pesisir, sedangkan Kota Pontianak tidak memiliki wilayah laut, pantai, padang lamun, maupun terumbu karang.

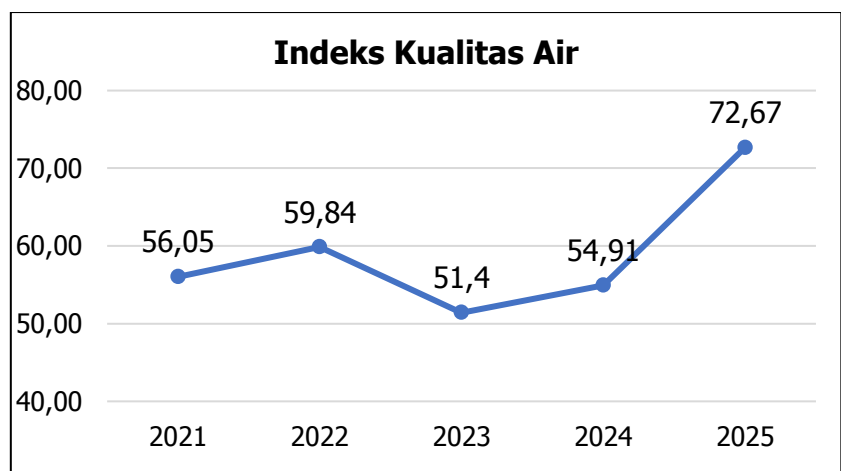
2) Kondisi Indeks Kualitas Air di Kota Pontianak

Sebagai penggambaran kondisi kualitas air permukaan di Kota Pontianak, dapat dilihat melalui Nilai Indeks Kualitas Air pada **Tabel 2.18** yaitu menunjukkan kondisi perairan yang berpotensi mempengaruhi kualitas perairan hilir.

Tabel 2. 18 Indeks Kualitas Air

No	Tahun	IKA	Kategori
1	2021	56,05	Sedang
2	2022	59,84	Sedang
3	2023	51,4	Sedang
4	2024	54,91	Sedang
5	2025	72,67	Sedang

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025
catatan: terjadi perubahan rumus di tahun 2025*



Gambar 2. 18 Grafik Indeks Kualitas Air

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

3) Kondisi Kualitas Air Permukaan Di Kota Pontianak

Parameter kualitas air seperti BOD, COD, dan TSS pada **Tabel 2.19** menunjukkan tingkat beban pencemar yang masuk ke badan air utama, termasuk Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

Tabel 2. 19 Kualitas Air Sungai

Nama Sungai	Suhu (°C)	pH	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas	T-P (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal Coliform
Sungai Landak	28,3	8	81	65	3,0	0,53	41	0,047	0,02	0,256	0,056	54
	28,5	7	90	59	3,0	0,88	40	<0,011	0,01	0,066	0,056	12
	28,5	5	137	84	3,0	0,7	24	0,032	0,01	0,052	0,05	12
	28,9	5	58	64	3,0	0,53	31	0,052	0,01	0,127	0,051	<1,8
	29,2	5	65	60	3,0	0,35	41	0,054	0,03	0,073	0,05	17
	30,1	5	95	57	4,0	0,7	40	0,025	0,02	0,078	0,05	<1,8
	29,3	5	83	78	4,0	1,05	26	0,026	0,02	0,056	0,037	<1,8
	30,1	5	67	72	4,0	1,05	56	0,228	0,02	0,297	0,036	<1,8
	29,8	5	76	51	3,0	1,93	40	0,051	0,01	0,042	0,038	<1,8
Sungai Kapuas Kecil	29,5	6	98	56	4	0,88	6	0,036	0,02	0,072	0,048	2
	30	6	52	53	5	0,53	8	0,042	0,04	0,178	0,05	2
	29,7	6	58	62	5	1,58	13	0,05	0,03	0,07	0,05	20
	29,6	6	53	66	4	1,76	11	0,039	0,02	0,083	0,048	<1,8
	30,1	6	115	51	4	0,35	5	0,039	0,02	0,094	0,049	<1,8
	30,1	6	65	60	4	0,7	8	0,04	0,01	0,072	0,048	2
	30	6	52	69	4	0,35	4	0,016	0,01	0,077	0,049	2
	29,4	6	67	63	4	0,18	5	<0,011	0,03	0,074	0,056	<1,8
	29,7	6	57	64	5	0,88	5	0,053	0,01	0,083	0,056	54

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Nama Sungai	Suhu (°C)	pH	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas	T-P (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal Coliform
Sungai Kapuas Besar	30,1	8	69	45	4,0	0,530	12	0,108	0,020	0,099	0,066	39
	30	7	55	49	4,0	0,88	28	0,014	0,01	0,073	0,064	12
	29,7	7	58	44	4,0	0,7	19	0,04	0,02	0,068	0,065	4
	30	7	58	49	4,0	0,88	22	0,038	0,02	0,079	0,056	2
	30,5	7	60	53	4,0	0,35	34	0,02	0,02	0,061	0,056	4
	30,1	7	80	33	4,0	1,23	29	0,277	0,03	0,093	0,066	28
	30,1	7	55	59	4,0	0,53	20	0,046	0,03	0,068	0,056	33
	30,3	7	53	41	4,0	0,18	12	0,023	0,03	0,07	0,057	54
	30,5	7	47	43	5,0	1,93	15	0,032	0,02	0,059	0,049	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

D. Impact

Dampak pada matra ini bersifat tidak langsung, yaitu melalui pengaruh kualitas air Sungai Kapuas dan Sungai Landak terhadap kondisi wilayah hilir dan muara. Apabila kualitas air sungai dari wilayah Kota Pontianak menurun, maka bahan pencemar yang terbawa berpotensi mempengaruhi kualitas perairan di luar wilayah kota. Dengan demikian, dampak utama yang perlu ditekankan adalah potensi kontribusi Kota Pontianak terhadap pencemaran lingkungan perairan yang lebih luas.

- 1) Kualitas air sungai pada **Tabel 2.19** berpotensi membawa beban pencemar ke wilayah estuari dan laut melalui aliran Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Pengelolaan kualitas air sungai di Kota Pontianak memiliki peran penting dalam mencegah pencemaran yang lebih luas hingga ke wilayah laut.
- 2) Akumulasi sedimen dan limbah dari wilayah kota dapat mempengaruhi kualitas perairan hilir meskipun lokasi dampak akhirnya berada di luar administrasi Kota Pontianak.
- 3) Potensi pencemaran tersebut dapat berdampak pada habitat biota perairan, kekeruhan air, dan menurunnya kualitas ekosistem muara.

E. Response

Respons terhadap matra ini diarahkan pada penguatan pengendalian kualitas air Sungai Kapuas dan Sungai Landak sebagai jalur utama aliran ke wilayah hilir. Karena Kota Pontianak tidak memiliki wilayah pesisir langsung, maka bentuk respons yang paling relevan adalah mengendalikan sumber pencemar di wilayah kota. Upaya ini menjadi penting agar kualitas air yang mengalir keluar wilayah tetap terjaga dan tidak mencemari wilayah muara maupun laut.

- 1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha perlu diarahkan untuk memastikan memiliki sistem pengolahan limbah sehingga limbah tidak dibuang ke badan air tanpa pengelolaan yang memadai.
- 2) Peningkatan sanitasi masyarakat dan pengurangan limpasan pencemar dari kawasan terbangun merupakan langkah utama untuk menekan beban pencemaran menuju hilir.
- 3) Edukasi kepada masyarakat di sepanjang bantaran sungai perlu diperkuat agar pengelolaan lingkungan di tingkat lokal dapat mendukung kualitas perairan secara regional.

2.4 Kualitas Udara

Kualitas udara di Kota Pontianak dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas transportasi, kegiatan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan perubahan tata ruang perkotaan. Sebagai kota yang terus berkembang, meningkatnya mobilitas masyarakat dan penggunaan kendaraan bermotor menjadi faktor dominan dalam pembentukan emisi pencemar udara. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas udara menjadi penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan hidup di kawasan perkotaan.

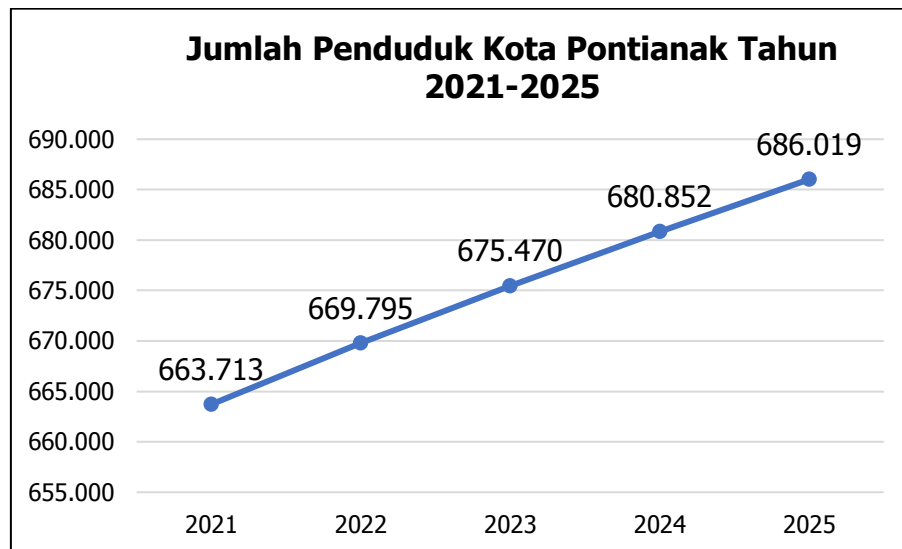
A. Driving Force

Perubahan kualitas udara di Kota Pontianak dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan meningkatnya

mobilitas harian masyarakat. Perkembangan kota yang semakin dinamis menjadikan kualitas udara perlu dianalisis sebagai bagian dari kinerja lingkungan perkotaan.

1) Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Kebutuhan Transportasi

Peningkatan jumlah penduduk pada **Gambar 2.9** mendorong peningkatan mobilitas masyarakat yang berimplikasi pada kenaikan kebutuhan transportasi harian.



Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026

2) Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan Penggunaan Kendaraan Bermotor

Perkembangan ekonomi meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, dan distribusi barang yang berkontribusi terhadap emisi dari sektor transportasi dan kegiatan usaha. Pertumbuhan ekonomi juga mendorong naiknya penggunaan kendaraan bermotor, konsumsi bahan bakar, dan aktivitas perkotaan lainnya yang menghasilkan emisi. Jumlah kendaraan bermotor pada **Tabel 2.20** menunjukkan adanya sumber emisi yang terus berkembang di wilayah Kota Pontianak.

Tabel 2. 20 Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
1.	Sepeda Motor	822.466	-	-	-
2.	Mobil Penumpang	90.735	-	-	-
3.	Mobil Bus	605	-	-	-
4.	Mobil Barang	45.282	-	-	-
5.	Kendaraan Khusus	385	-	-	-

*Keterangan: Menurut PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan**Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pontianak, 2025*

3) Adanya Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan

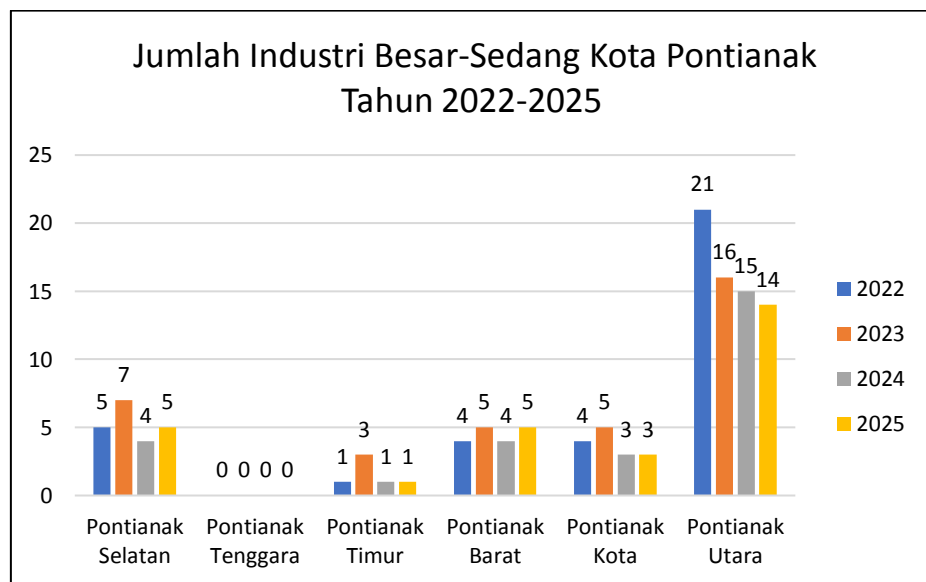
Salah satu tekanan terhadap kualitas udara Kota Pontianak berasal dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah sekitar di Kalimantan Barat. Pada tahun 2025, kualitas udara di Kota Pontianak pada periode tertentu tercatat tidak sehat bahkan sempat memburuk hingga mencapai ISPU 364. Dalam klasifikasi ISPU nasional, kategori tidak sehat berada pada rentang 101–200, kategori sangat tidak sehat pada rentang 201–300, dan nilai ≥ 300 termasuk berbahaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap kualitas udara Kota Pontianak tidak hanya berada pada tingkat tidak sehat, tetapi pada saat tertentu telah melampaui ambang tersebut. Penurunan kualitas udara ini terutama berkaitan dengan meningkatnya konsentrasi partikel halus dan partikulat, khususnya PM_{2,5} dan PM₁₀, yang umum menjadi parameter dominan saat terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

B. Pressure

Tekanan terhadap kualitas udara di Kota Pontianak terutama berasal dari emisi kendaraan, debu konstruksi, dan sumber pencemar lain yang berhubungan dengan aktivitas perkotaan. Tekanan ini bersifat kumulatif karena terjadi secara terus-menerus di pusat-pusat aktivitas masyarakat.

1) Penggunaan Bahan Bakar Sektor Industri

Penggunaan bahan bakar pada sektor industri besar dan sedang sebagaimana tercantum pada **Gambar 2.10** turut menyumbang emisi gas pencemar udara. Pemakaian energi berbahan bakar pada rumah tangga, usaha skala kecil, dan kegiatan ekonomi perkotaan turut memberikan tekanan terhadap kualitas udara. Aktivitas tersebut menghasilkan zat pencemar yang terakumulasi di udara, khususnya pada kawasan dengan konsentrasi kegiatan yang tinggi.



Gambar 2. 20 Jumlah Industri Besar-Sedang Kota Pontianak Tahun 2022-2025

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026

2) Pembangunan Fisik dan Infrastruktur Kota

Pelaksanaan pembangunan fisik dan penambahan infrastruktur kota ikut memperburuk kondisi udara melalui peningkatan debu di area kegiatan yang mempengaruhi kualitas udara ambien.

3) Penambahan Jaringan Jalan Menambah Intensitas dan Mobilitas Kendaraan

Perluasan jaringan jalan pada **Tabel 2.21** juga memperkuat intensitas lalu lintas serta mobilitas kendaraan di dalam kota. Ruas

jalan dengan arus lalu lintas yang padat menjadi sumber tekanan utama terhadap kualitas udara. Tingginya pergerakan kendaraan roda dua dan roda empat, serta mobilitas dari dalam dan luar kota, memperbesar tekanan terhadap mutu udara ambien.

Tabel 2. 21 Perubahan Ruas Jalan

No	Kelas Jalan	Panjang Jalan dua tahun terakhir	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jalan Bebas Hambatan	-	-
2	Jalan Raya	-	-
3	Jalan Sedang	-	-
4	Jalan Kecil	-	-
5	Jalan Nasional	2.287,52 km	2.287,52 km
6	Jalan Provinsi	-	-

Keterangan: Sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 31 ayat 3 menyatakan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil

Sumber: BPJN KALBAR, 2025

C. State

Kondisi kualitas udara di Kota Pontianak dapat dilihat melalui indikator mutu udara ambien dan nilai indeks kualitas udara. Parameter tersebut memberikan gambaran kondisi udara yang dihirup masyarakat.

1) Kondisi Kualitas Udara Ambien Kota Pontianak

Pemantauan kualitas udara ambien di Kota Pontianak dilakukan dengan hasil pada **Tabel 2.22** yang meliputi parameter seperti PM_{2.5}, PM₁₀, SO₂, dan NO₂, menggambarkan konsentrasi polutan yang ada di atmosfer.

Tabel 2. 22 Kualitas Udara Ambien Kota Pontianak

Lokasi	Lama Pengukuran	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)	PM ₁₀ (µg/Nm ³)	PM _{2,5} (µg/Nm ³)
Kecamatan Pontianak Tenggara	1 Tahun	39,93	545,59	21,52	46,61	4,43	15,24	15,79

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

Walaupun kualitas udara ambien Kota Pontianak secara umum masih relatif baik, kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena berpotensi menurun pada musim kemarau akibat asap kebakaran hutan dan lahan dari wilayah sekitar. Peningkatan konsentrasi polutan juga dapat terjadi pada jam-jam sibuk, terutama pada ruas jalan dengan lalu lintas padat, sehingga pemantauan dan pengendalian kualitas udara tetap menjadi hal yang penting.

2) Kondisi Indeks Kualitas Udara Kota Pontianak

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator yang menggambarkan capaian pengelolaan lingkungan hidup melalui tiga komponen utama, yaitu:

- Indeks Kualitas Air
- Indeks Kualitas Udara, dan
- Indeks Kualitas Lahan yang dihitung dari indeks kualitas tutupan lahan.

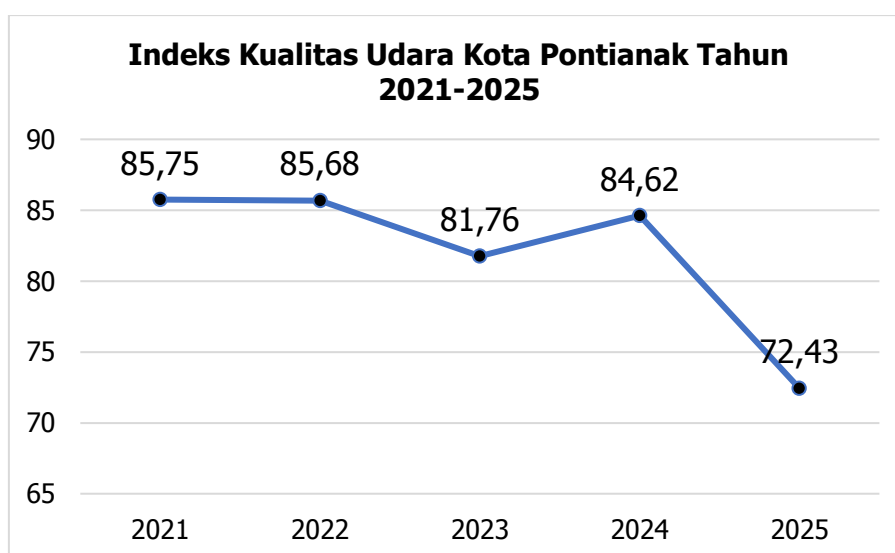
Indeks ini digunakan untuk menilai kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada suatu wilayah, baik di tingkat daerah maupun nasional, sekaligus menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah daerah.

Dalam konteks matra kualitas udara, komponen yang paling relevan adalah Indeks Kualitas Udara (IKU), karena nilai tersebut secara khusus menunjukkan kondisi mutu udara ambien dan menjadi dasar untuk melihat sejauh mana pengelolaan kualitas udara telah berjalan. Dengan demikian, IKU berperan penting dalam menyediakan informasi bagi perumusan kebijakan, menunjukkan akuntabilitas kinerja pengelolaan lingkungan kepada masyarakat, serta mengukur keberhasilan pemerintah dalam menjaga kualitas udara di Kota Pontianak. Nilai Indeks Kualitas Udara ditunjukkan pada **Tabel 2.23**

Tabel 2. 23 Indeks Kualitas Udara Kota Pontianak

Tahun	IKU	Kategori
2021	85,75	Baik
2022	85,68	Baik
2023	81,76	Baik
2024	84,62	Baik
2025	72,43	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025



Gambar 2. 21 Indeks Kualitas Udara Kota Pontianak Tahun 2021-2025

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.23**, Indeks Kualitas Udara Kota Pontianak selama tahun 2021–2024 berada pada kategori baik, dengan nilai berkisar antara 81,76 hingga 85,75. Pada tahun 2025, nilai IKU menurun menjadi 72,43 sehingga masuk kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Pontianak secara umum masih relatif baik dalam beberapa tahun terakhir, namun pada tahun 2025 terjadi penurunan mutu udara yang perlu menjadi perhatian. Dalam konteks matra kualitas udara, penurunan tersebut mengindikasikan adanya tekanan yang semakin besar terhadap

kondisi udara ambien, sehingga upaya pengendalian pencemaran udara tetap perlu diperkuat.

D. Impact

Penurunan kualitas udara di Kota Pontianak berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat perkotaan secara umum.

- 1) Perubahan iklim dan pemanasan global tidak terlepas dari memburuknya kualitas udara akibat meningkatnya pencemaran. Salah satu sumber utamanya berasal dari emisi kendaraan bermotor yang menghasilkan karbon dioksida (CO₂) dalam jumlah besar. Gas tersebut menumpuk di atmosfer dan menghambat pelepasan panas bumi ke luar angkasa, sehingga suhu permukaan bumi terus mengalami kenaikan. Kenaikan suhu ini, apabila berlangsung dalam jangka panjang, akan memicu perubahan pada pola iklim dan cuaca.

Tabel 2. 24 Suhu Udara Rata-Rata Bulanan

Nama Stasiun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Stasiun Meteorologi Maritim	26.8	27.2	27.6	27.7	29	28.5	28.8	27.4	27.5	27.4	27.6	27.5

Sumber: Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, 2025

Tabel 2. 25 Curah Hujan Rata-Rata Bulanan

Nama Stasiun	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan (mm)											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Stasiun Meteorologi Maritim	368.3	165.2	378.3	168.6	166.7	236.5	45.8	446	384.6	60.7	224.7	184.9

Sumber: Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, 2025

Kondisi iklim Kota Pontianak selama tahun 2025 ditandai oleh suhu udara rata-rata bulanan yang relatif tinggi dan stabil, yaitu berkisar

antara 26,8°C hingga 29,0°C, serta curah hujan bulanan yang berfluktuasi cukup besar, yaitu antara 45,8 mm hingga 446 mm. Suhu tertinggi tercatat pada bulan Mei, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus.

Kondisi suhu yang relatif tinggi dapat memperkuat pembentukan dan penyebaran pencemar tertentu di udara ambien, terutama pada saat aktivitas perkotaan meningkat. Umumnya curah hujan yang tinggi pada periode tertentu dapat membantu mengurangi konsentrasi partikulat di udara melalui proses pencucian alami atmosfer, namun pada periode curah hujan rendah atau musim kemarau, kualitas udara berpotensi menurun akibat akumulasi polutan dari lalu lintas, aktivitas perkotaan, maupun pengaruh asap kebakaran hutan dan lahan dari wilayah sekitar.

- 2) Terjadi penurunan kualitas udara akibat kabut asap Karhutla yang menyebabkan tingginya konsentrasi parameter $PM_{2,5}$ sehingga tercatat dalam kategori “TIDAK SEHAT” pada ISPU melalui alat pemantauan AQMS.

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2026



Gambar 2. 22 ISPU Menunjukkan Kualitas Udara Tercatat Tidak Sehat

- 3) Penurunan kualitas udara, terutama akibat meningkatnya partikulat dan gas pencemar, dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Gangguan kesehatan masyarakat dapat dilihat **Tabel 2.26**, terutama kasus ISPA dan gangguan pernapasan lain yang berpotensi dipengaruhi oleh paparan polutan udara.

Tabel 2. 26 Penyakit Utama Yang Diderita Masyarakat

Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
Kota Pontianak	Essential (primary) hypertension	54.409
	Acute nasopharyngitis (common cold)	44.912
	Dyspepsia	28.448
	Acute upper respiratory infection, unspecified	20.575
	Non-insulin-dependent diabetes melitus	19.522
	Acute pharyngitis	15.004
	Acute upper respiratory infection of multiple and unspecified sites	14.889
	Myalgia	13.329
	Fever, unspecified	12.535
	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	11.652

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2025

Beberapa jenis penyakit seperti ISPA tidak spesifik, ISPA, salesma/flu biasa, dan radang tenggorokan dapat dikaitkan dengan paparan udara yang kurang baik, terutama apabila masyarakat terpapar debu, asap, partikulat, dan polutan udara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan kualitas udara berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, khususnya gangguan pada saluran pernapasan.

E. Response

Pengendalian kualitas udara di Kota Pontianak dilakukan melalui pendekatan pengurangan emisi dan peningkatan kapasitas lingkungan dalam menyerap polutan. Upaya ini memerlukan dukungan kebijakan, pengawasan, dan peran aktif masyarakat. Dengan demikian, respons terhadap persoalan kualitas udara perlu diarahkan pada sumber emisi utama sekaligus penguatan kualitas lingkungan kota.

- 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
 - Pemantauan terhadap kualitas udara ambien dengan metode *pasive sampler*
 - Kegiatan pemantauan terhadap kualitas udara ambien dengan menggunakan alat pemantauan *Air Quality Monitoring System* (AQMS)



Gambar 2. 23 Alat Pemantauan (AQMS) dan Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara

- 2) Memberikan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH untuk Kegiatan Usaha
Pengendalian kualitas udara turut diperkuat melalui pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap pelaku usaha melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan dokumen lingkungan sebagai dasar pengelolaan dan pemantauan dampak kegiatan.

- 3) Memberikan pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan

Pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara, seperti penggunaan boiler, genset, dan peralatan industri lainnya. Para pelaku usaha didorong untuk beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menciptakan udara yang lebih bersih dan sehat untuk seluruh warga Kota Pontianak.



Gambar 2. 24 Pemantauan Emisi Kegiatan Usaha

- 4) Sosialisasi dan Kampanye Lingkungan: Kolaborasi untuk Udara Lebih Bersih di Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak aktif melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam pengendalian pencemaran udara. Kegiatan sosialisasi dan kampanye lingkungan dilaksanakan dengan melibatkan komunitas, organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pihak sekolah. Contoh nyata dari kegiatan tersebut antara lain adalah sosialisasi Program Kampung Iklim dan Program Adiwiyata, yang bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia pendidikan dalam menghadapi perubahan iklim serta membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini.

5) Program Penghijauan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau

Upaya perbaikan kualitas udara didukung melalui penyediaan dan penguatan ruang terbuka hijau di berbagai bagian Kota Pontianak mencakup kawasan permukiman, lingkungan industri, sekolah, perkantoran pemerintah, dan area komersial. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga dan memperkuat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan yang berlaku. Meskipun capaian tersebut telah terpenuhi, penambahan vegetasi tetap terus dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon.

Tabel 2. 27 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi Kota Pontianak

No	Lokasi Penanaman	Penghijauan			
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (Batang)
1	Jl. dr. Soedarso	1	0,4	89	89 (Ketapang Kencana Variegata)
2	Jl. Median Ahmad Yani	2	1,11	500	500 (Tekoma)
3	Jl. Median Paralel Sungai Jawi	0,55	0,19	500	500 (Tekoma)
4	Jl. Median Husein Hamzah	1	0,5	170	170 (Tekoma)
5	Jl. Ampera	1	0,29	50	50 (Tekoma)

Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025

6) Pelaksanaan *Car Free Day*

Pengurangan tekanan terhadap kualitas udara juga dilakukan melalui penerapan kawasan bebas kendaraan bermotor pada waktu tertentu melalui kegiatan *Car Free Day*. Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas di lingkungan yang lebih rendah emisi, sekaligus mendorong pengurangan ketergantungan terhadap kendaraan bermotor. Di samping itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya perkotaan yang lebih sehat, nyaman, dan ramah lingkungan.

7) Pelaksanaan kegiatan uji emisi

Pelaksanaan uji emisi kendaraan dan pengendalian pembakaran terbuka menjadi langkah penting untuk mengurangi sumber tekanan utama terhadap kualitas udara.



Gambar 2. 25 Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor

2.5 Lahan dan Hutan

Kondisi lahan di Kota Pontianak didominasi oleh kawasan terbangun yang berkembang seiring dengan pertumbuhan kota, sehingga fungsi ekologis lahan sangat dipengaruhi oleh dinamika pemanfaatan ruang perkotaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemanfaatan lahan perlu diarahkan agar selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan ruang berlangsung secara tertib, sesuai fungsi peruntukan, dan mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah. Melalui penataan ruang yang baik, fungsi lahan dapat tetap terjaga, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dapat dikendalikan, dan potensi kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

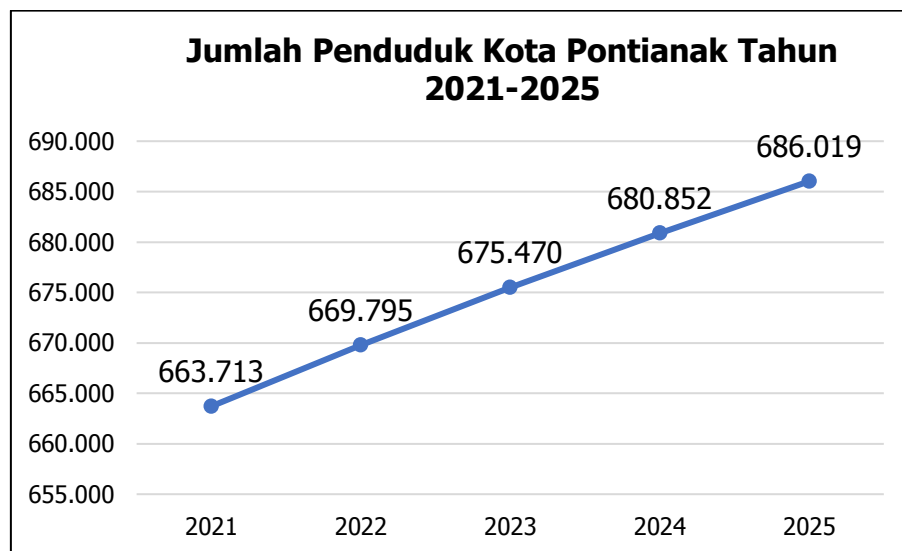
A. Driving Force

Perubahan kondisi lahan di Kota Pontianak dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan peningkatan kebutuhan ruang untuk aktivitas perkotaan. Semakin berkembangnya kota mendorong perubahan penggunaan lahan dari fungsi terbuka atau

vegetatif menjadi kawasan terbangun. Proses ini berlangsung seiring dengan ekspansi permukiman, perdagangan, jasa, dan infrastruktur.

1) Pertumbuhan Penduduk Mendorong Pemanfaatan Lahan Secara Intensif

Pertumbuhan jumlah penduduk pada **Gambar 2.12** mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan, fasilitas infrastruktur, serta kegiatan ekonomi lainnya sehingga mendorong pemanfaatan lahan secara lebih intensif.



Gambar 2. 26 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Berdasarkan grafik, perkembangan penduduk Kota Pontianak menunjukkan kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini memberikan tekanan yang semakin besar terutama terhadap kemampuan lingkungan dalam mendukung aktivitas penduduk dan menampung beban yang ditimbulkan. Dinamika jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk, yang selanjutnya turut memengaruhi pola pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan di wilayah kota.

2) Pertumbuhan Ekonomi Mendorong Perubahan Tata Guna Lahan

Perkembangan ekonomi mempercepat ekspansi kawasan perdagangan, jasa, dan pusat aktivitas yang membutuhkan lahan baru. Di sisi lain, peran Kota Pontianak sebagai pusat pendidikan, mulai dari jenjang sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi, turut meningkatkan daya tarik kota sebagai tempat tinggal dan pusat aktivitas masyarakat. Perkembangan tersebut pada akhirnya mendorong perubahan tata guna lahan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang untuk permukiman, sarana pendidikan, serta berbagai kegiatan ekonomi perkotaan seperti usaha kuliner, kafe, restoran, dan fasilitas rekreasi yang tumbuh mengikuti perubahan pola hidup masyarakat.

B. Pressure

Tekanan terhadap lahan di Kota Pontianak muncul dalam bentuk alih fungsi lahan, penurunan tutupan vegetasi, dan meningkatnya permukaan kedap air. Tekanan ini memperlemah fungsi ekologis lahan, terutama dalam hal resapan air dan pengaturan tata air perkotaan. Dalam konteks Kota Pontianak, tekanan tersebut sangat relevan karena wilayah ini berada pada dataran rendah yang sensitif terhadap genangan.

1) Perubahan Penggunaan Lahan Menjadi Pemukiman

Perubahan penggunaan lahan di Kota Pontianak dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.28** yang menunjukkan bahwa ruang terbuka dan lahan vegetatif terus mengalami tekanan akibat perluasan kawasan terbangun.

Tabel 2. 28 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

Kota	Luas Lahan Kering Campur Semak (Ha)	Luas Lahan Terbuka (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Pemukiman (Ha)	Luas Tubuh Air (Ha)
Kota Pontianak	0,02	145,03	1.181,10	2.345,46	7.487,82	662,07

Sumber : BPKH Wilayah III Kota Pontianak, 2026

Berdasarkan **Tabel 2.28**, penggunaan lahan di Kota Pontianak didominasi oleh kawasan permukiman seluas 7.487,82 ha dan perkebunan sebesar 2.345,46 ha, sedangkan luas lahan terbuka hanya 145,03 ha. Komposisi ini menunjukkan bahwa ruang kota semakin didominasi oleh pemanfaatan terbangun dan budidaya, sementara ruang terbuka yang berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan relatif terbatas.

- 2) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah menegaskan bahwa perkembangan permukiman yang berlangsung tanpa pengendalian dapat menjadi kendala dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kondisi tersebut berimplikasi pada perubahan fungsi lahan, termasuk berkurangnya lahan produktif yang kemudian dimanfaatkan untuk kawasan permukiman dan penggunaan terbangun lainnya.
- 3) Pemanfaatan Sempadan Sungai Untuk Bangunan Usaha
Pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Kapuas dan Sungai Landak juga masih menunjukkan adanya bangunan dan kegiatan usaha di tepian sungai. Keberadaan aktivitas tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pontianak Tahun 2021–2041, yang mengarahkan kawasan sempadan sungai sebagai jalur hijau dan jalan paralel di sepanjang bantaran sungai.

4) Pembangunan Jaringan Jalan Perkotaan

Pembangunan jaringan jalan sebagai sarana perkotaan pada **Tabel 2.29** ikut membentuk perubahan struktur ruang dan arah perkembangan kawasan terbangun.

Tabel 2. 29 Perubahan Ruas Jalan

No	Kelas Jalan	Panjang Jalan dua tahun terakhir	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jalan Bebas Hambatan	-	-
2	Jalan Raya	-	-
3	Jalan Sedang	-	-
4	Jalan Kecil	-	-
5	Jalan Nasional	2.287,52 km	2.287,52 km
6	Jalan Provinsi	-	-

Keterangan: Sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 31 ayat 3 menyatakan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil

Sumber: BPJN KALBAR, 2025

C. State

Kondisi lahan di Kota Pontianak dapat dibaca melalui struktur penggunaan lahan, kualitas tutupan lahan, dan keberadaan kawasan yang masih dipertahankan untuk fungsi perlindungan. Meskipun tidak memiliki hutan alami, Kota Pontianak masih memiliki elemen ekologis penting seperti ruang terbuka hijau, hutan kota, kawasan lindung, dan sempadan sungai. Kondisi ini menjadi dasar dalam menilai kualitas lahan dari perspektif lingkungan hidup perkotaan.

1) Kondisi Indeks Kinerja Tutupan Lahan di Kota Pontianak

Nilai Indeks Kualitas Lahan pada **Tabel 2.30** memberikan gambaran umum mengenai kondisi lahan dari aspek kualitas lingkungan. Perubahan tutupan lahan di wilayah Kota Pontianak menunjukkan adanya dinamika yang mempengaruhi kondisi pemanfaatan lahan di Kota Pontianak. Kondisi ini menggambarkan adanya perubahan yang berpengaruh terhadap keberlanjutan fungsi ekologis di kawasan perkotaan.

Tabel 2. 30 Indeks Kinerja Tutupan Lahan (IKTL)

No	Tahun	IKTL	Selisih dengan tahun sebelumnya
1	2021	29,52	-4,03
2	2022	27,64	-1,88
3	2023	37,75	10,11
4	2024	23,75	-14
5	2025	41,24	17,49

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2026

Keterangan: Terjadi perubahan rumus di tahun 2025

Gambaran kondisi lahan yang tercermin dari **Tabel 2.30**, menunjukkan kualitas tutupan vegetasi dalam mendukung fungsi ekologis wilayah. Nilai IKTL Kota Pontianak berfluktuasi dari 29,52 pada tahun 2021 menjadi 27,64 pada tahun 2022, meningkat menjadi 37,75 pada tahun 2023, menurun menjadi 23,75 pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 41,24 pada tahun 2025. Meskipun nilai tahun 2025 perlu dicermati karena terdapat perubahan rumus perhitungan, fluktuasi tersebut tetap menunjukkan bahwa kondisi tutupan lahan di Kota Pontianak mengalami peningkatan dengan adanya penambahan RTH yang didukung dengan kegiatan penanaman pohon.

2) Terjadinya Genangan Air

Perubahan pemanfaatan lahan di Kota Pontianak turut berpengaruh terhadap munculnya genangan di berbagai wilayah. Pada tahun 2025, kejadian genangan masih sering terjadi, terutama ketika curah hujan tinggi dan sistem drainase di beberapa lokasi belum mampu menampung limpasan air secara optimal.

3) Peningkatan Capaian RTH di Kota Pontianak

Penentuan klasifikasi RTH merujuk pada Permen ATR/BPN RI No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dimana capaian RTH Kota Pontianak Tahun 2025 adalah

31.35% yang artinya telah melebihi target 31.33% yang sudah ditetapkan.

Tabel 2. 31 Capaian RTH Kota Pontianak

NO.	KLASIFIKASI	LUAS (Ha)
A	RTH Publik	2523,960018
1	Rimba Kota	208,7120432
2	Taman Kota	979,378256
3	Taman Kecamatan	9,468561907
4	Taman Kelurahan	65,20723956
5	Taman RW	2,702573896
6	Taman RT	4,869328166
7	Pemukaman	95,14020151
8	Sempadan Badan Air	96,49642623
9	Tubuh Air	641,0195
10	Lapangan Olahraga	33,1639751
11	Lindung Gambut	387,8019122
B	RTH Privat	1182,1
C	TOTAL LUAS RTH (A+B)	3706,060018
D	LUAS KOTA	11821
E	PERSENTASE (%)	31,35149326
F	TARGET CAPAIAN 2025 (%)	31,33

Sumber: (1) Dinas PUPR Kota Pontianak; dan (2) DLH Kota Pontianak, 2025

D. Impact

Perubahan kondisi lahan di Kota Pontianak berdampak pada menurunnya fungsi ekologis lahan perkotaan. Berkurangnya vegetasi dan ruang terbuka menyebabkan kemampuan lahan dalam menyerap air menurun, sehingga limpasan permukaan meningkat. Dampak ini sangat penting bagi Pontianak yang memiliki karakteristik dataran rendah dan dipengaruhi oleh sistem Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

- 1) Dominasi kawasan terbangun pada lahan dataran rendah dan gambut meningkatkan kerentanan genangan dan banjir, terutama karena Pontianak berada pada ketinggian sekitar 0,8–1,5 meter dpl, berlereng sangat landai, serta dipengaruhi pasang surut sungai.

- 2) Pemanfaatan lahan yang melampaui kemampuan lingkungannya menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap kondisi lahan di Kota Pontianak. Salah satu bentuknya adalah perubahan fungsi lahan yang mengurangi keberadaan ruang terbuka hijau, padahal ruang tersebut berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan, keseimbangan ekologis, dan kenyamanan hidup masyarakat.
- 3) Berkurangnya lahan terbuka dan meningkatnya kawasan terbangun menyebabkan kemampuan lahan dalam meresapkan air hujan semakin menurun, sehingga limpasan permukaan menjadi lebih besar. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas sistem drainase yang memadai, maka potensi genangan dan banjir di wilayah perkotaan akan semakin meningkat.

E. Response

Pengelolaan lahan di Kota Pontianak perlu diarahkan pada pengendalian pemanfaatan ruang, perlindungan ruang ekologis, dan penguatan vegetasi perkotaan. Karena kota ini tidak memiliki hutan alami, maka penguatan fungsi ekologis harus dilakukan melalui RTH, hutan kota, sempadan sungai, dan kawasan lindung lainnya. Respons kebijakan perlu memastikan bahwa pembangunan tetap berlangsung tanpa memperburuk kualitas lahan dan tata air kota.

- 1) Memberikan pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan berupa pengawasan, pembinaan, dan labelisasi kegiatan usaha
Penyusunan dan pelaksanaan komitmen pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup dilakukan melalui dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagai dasar dalam pengajuan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),

persetujuan lingkungan, dan perizinan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Realisasi Kegiatan Penghijauan

Penguatan konsep kota hijau, perlindungan sempadan Sungai Kapuas dan Sungai Landak, serta optimalisasi pemenuhan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di kota menjadi strategi utama untuk menjaga fungsi lahan secara berkelanjutan.

Tabel 2. 32 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi Kota Pontianak

No	Lokasi Penanaman	Penghijauan			
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (Batang)
1	Jl. dr. Soedarso	1	0,4	89	89 (Ketapang Kencana Variegata)
2	Jl. Median Ahmad Yani	2	1,11	500	500 (Tekoma)
3	Jl. Median Paralel Sungai Jawi	0,55	0,19	500	500 (Tekoma)
4	Jl. Median Husein Hamzah	1	0,5	170	170 (Tekoma)
5	Jl. Ampera	1	0,29	50	50 (Tekoma)

Sumber : Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025

- 4) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013–2033, pengembangan kawasan lindung, ruang terbuka hijau, dan sempadan sungai yang terdiri dari Kawasan lindung gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter tercatat sekitar 641 hektar, sedangkan total kawasan lindung gambut mencapai sekitar 1.607 hektar atau 14,9% dari luas wilayah kota. RTH publik Kota Pontianak seluas 20,16 km² dari total wilayah 107,82 km², yang terdiri atas taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, pemakaman umum, hutan kota, dan agrowisata/KSA.

**Tabel 2. 33 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Publik Kota Pontianak**

No	Jenis RTH	Luas		Persentase
		Wilayah Kota (Km ²)	RTH (Km ²)	
1	Taman Kota	107,82	4,9	4,5
2	Jalur Hijau	107,82	1,6	1,5
3	Lapangan Olahraga	107,82	0,65	0,6
4	Pemukaman Umum	107,82	0,45	0,4
5	Hutan Kota	107,82	2,56	2,4
6	Agrowisata/KSA	107,82	10	9,3
Jumlah		107,82	20,16	1,7

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2024

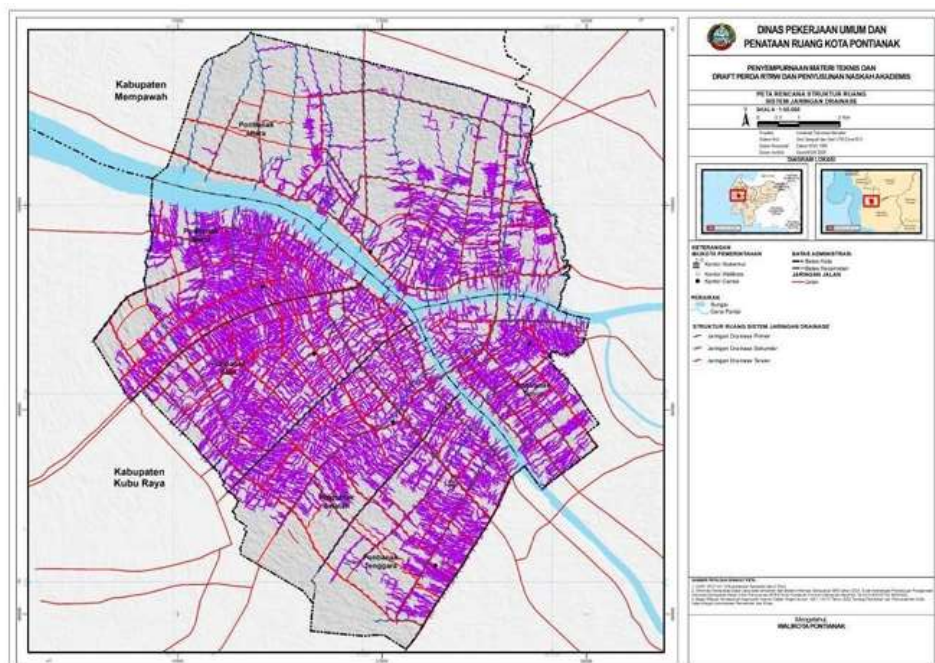
- 5) Pengelolaan Kawasan Lindung di Kota Pontianak

Kondisi lahan Kota Pontianak juga ditandai oleh keberadaan kawasan lindung dan lahan sensitif, terutama badan air, kawasan lindung gambut, kawasan perlindungan setempat, dan ruang terbuka hijau. Dalam rencana pola ruang, total kawasan lindung tercatat sekitar 2.085,84 ha (17,6%), terdiri antara lain dari badan air 701,30 ha, kawasan lindung gambut 242,12 ha, dan kawasan perlindungan setempat 84,08 ha. Selain itu, persebaran tanah gambut mencapai sekitar 2.454 ha, terutama di Pontianak Utara, Pontianak Tenggara,

Pontianak Selatan, dan Pontianak Kota, yang menunjukkan bahwa sebagian wilayah kota memiliki daya dukung lahan yang terbatas dan perlu pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih ketat.

6) Pengembangan Rencana Jaringan Drainase

Selain itu, upaya penanganan permasalahan tata guna lahan juga didukung melalui peta rencana drainase kota yang memuat pengembangan jaringan saluran primer dan saluran sekunder pada berbagai bagian wilayah Kota Pontianak. Perencanaan drainase tersebut merupakan bentuk respons terhadap tingginya limpasan air pada kawasan terbangun dan wilayah yang rawan mengalami genangan. Dalam konteks ini, sistem drainase tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengaliran air, tetapi juga menjadi bagian dari pengendalian tata guna lahan agar pemanfaatan ruang tetap memperhatikan kapasitas lingkungan dalam menampung air hujan.



Gambar 2. 28 Peta Jaringan Drainase

Sumber: KLHS Revisi RTRW Kota Pontianak Tahun 2013 - 2033

Dengan demikian, RTRW struktur ruang dan rencana drainase

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan instrumen perencanaan untuk mengarahkan penggunaan lahan secara lebih tertib, menjaga fungsi ruang, serta mengurangi risiko genangan dan banjir yang timbul akibat perubahan pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan.

2.6 Pengelolaan Sampah dan Limbah

Pengelolaan sampah dan limbah di Kota Pontianak menunjukkan kinerja yang relatif baik dan menjadi salah satu aspek unggulan dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan timbulan sampah terus bertambah, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang terintegrasi dari sumber hingga ke tempat pemrosesan akhir. Pemerintah Kota Pontianak telah mengembangkan pendekatan pengelolaan yang tidak hanya berfokus pada penanganan di hilir, tetapi juga pada pengurangan sampah melalui prinsip 3R serta pelibatan masyarakat.

A. Driving Force

Pertumbuhan timbulan sampah di Kota Pontianak dipengaruhi oleh dinamika perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat. Faktor ini mendorong peningkatan produksi sampah dari berbagai sumber, baik domestik maupun non-domestik. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat perkotaan juga berperan dalam meningkatkan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.

1) Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Timbulan Sampah

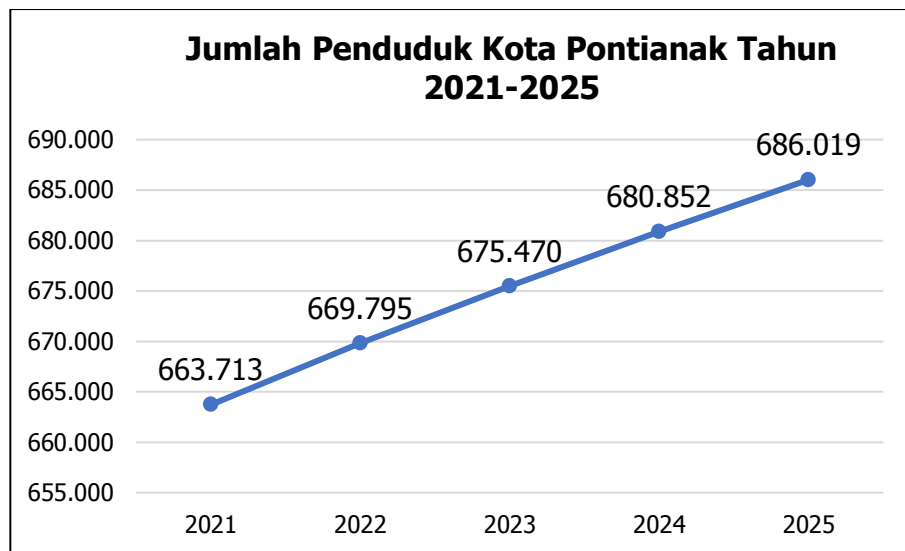
Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2025 tercatat mencapai 686.019 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 5.803 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor pendorong penting dalam meningkatnya timbulan sampah dan limbah di Kota Pontianak. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya aktivitas rumah tangga, konsumsi

harian, dan kebutuhan pelayanan perkotaan yang secara langsung berpengaruh terhadap volume sampah domestik dan limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, dinamika jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk perlu diperhatikan sebagai dasar dalam memahami tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah dan limbah di Kota Pontianak.

Tabel 2. 34 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
1	Pontianak Selatan	16,524	91.483	0,15	5.536
2	Pontianak Tenggara	16,127	49.189	0,03	3.050
3	Pontianak Timur	12,061	114.199	1,62	9.468
4	Pontianak Barat	16,383	152.877	0,87	9.331
5	Pontianak Kota	16,016	124.282	0,21	7.760
6	Pontianak Utara	41,097	153.989	1,54	3.747
Kota Pontianak		118,209	686.019	0,86	5.803

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026



Gambar 2. 29 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026

Jumlah penduduk Kota Pontianak yang besar dengan tingkat kepadatan yang tinggi di beberapa kecamatan menyebabkan kebutuhan pengelolaan persampahan dan limbah semakin meningkat, baik dari sisi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, maupun pengurangan beban sampah di lingkungan perkotaan.

2) Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan Limbah Usaha

Selain dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, timbulan sampah dan limbah juga erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan kegiatan perdagangan, jasa, konstruksi, dan sektor usaha lainnya mendorong peningkatan konsumsi barang dan jasa serta bertambahnya aktivitas produksi yang berimplikasi pada meningkatnya volume sampah non-domestik dan limbah usaha. Perkembangan ekonomi Kota Pontianak tersebut tercermin dalam nilai PDRB sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.35** dan **Tabel 2.36** berikut.

Tabel 2. 35 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

No	Uraian	Dua Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)
1.	a. Pertanian Sempit	545,70	572,44
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3.	Industri Pengolahan	7.956,95	8.560,22
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	258,98	108,77
5.	Bangunan	7.969,18	8.879,30
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	9.488,37	11.843,49
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	7.524,3	8120,49
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5.884,41	6276,88
9.	Jasa-Jasa	5.684,23	
	– Jasa Pendidikan		3.085,99
	– Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		2.276,75
	– Jasa lainnya		848,53
10.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.401,26	4.690,65
11.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	157,16	163,26
Produk Domestik Bruto		51.349,89	55.426,77
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas		-	-

Sumber : Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Tabel 2. 36 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

No	Uraian	Dua Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya (miliar Rupiah)
1.	a. Pertanian Sempit	389,44	395,73
	– Tanaman Bahan Makanan	-	
	– Tanaman Perkebunan	-	
	– Peternakan dan Hasil-hasilnya	-	

BUKU II – LAPORAN UTAMA**DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)****KOTA PONTIANAK TAHUN 2026**

	b. Kehutanan	-	
	c. Perikanan	-	
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3.	Industri Pengolahan	4.440,73	4470,56
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	172,92	55,23
5.	Bangunan	3.882,36	4 262,08
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5.417,29	6.667,79
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4.977,86	5 347,18
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.409,09	3.586,32
9.	Jasa-Jasa	3.564,06	
	– Jasa Pendidikan		1.859,16
	– Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		1.290,36
	– Jasa lainnya		637,78
10.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.577,03	1.627,59
11.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	120,21	121,98
Produk Domestik Bruto		27.950,99	30.321,76
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas		-	-

Sumber : Kota Pontianak dalam Angka, 2026

Peningkatan nilai PDRB pada Tabel diatas menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kota Pontianak terus berkembang dari tahun ke tahun yang mendorong peningkatan timbulan sampah dan limbah cair, baik yang berasal dari kegiatan perdagangan, jasa, perkantoran, maupun aktivitas usaha lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pendorong yang memperbesar kebutuhan sistem pengelolaan sampah dan limbah cair yang lebih efektif di wilayah perkotaan.

- 3) Sumber Timbulan Sampah Tersebar Akibat Pusat Kegiatan Ekonomi
- Perkembangan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi di Kota Pontianak menyebabkan sumber timbulan sampah semakin tersebar karena diperkuat oleh perubahan pola konsumsi masyarakat perkotaan yang cenderung meningkat pada penggunaan produk

kemasan, makanan siap saji, dan barang sekali pakai, sehingga volume sampah anorganik yang dihasilkan juga semakin besar.

Perkembangan aktivitas perkotaan turut mendorong meningkatnya penggunaan bahan dan produk yang berpotensi menghasilkan limbah B3 yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, jasa, fasilitas kesehatan, maupun usaha skala kecil lainnya. Keberadaan limbah B3 ini menambah kompleksitas pengelolaan persampahan dan limbah perkotaan karena memerlukan penanganan yang lebih khusus dibandingkan sampah domestik biasa.

B. Pressure

Tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah dan limbah di Kota Pontianak muncul sebagai akibat dari tingginya volume sampah dan limbah cair yang harus ditangani setiap hari. Sistem pengelolaan yang ada dituntut untuk mampu mengimbangi peningkatan timbulan tersebut secara berkelanjutan. Selain itu, adanya variasi jenis sampah juga menjadi tantangan dalam proses pengelolaan dan pengolahan.

- 1) Meningkatnya timbulan sampah perkotaan dan beban layanan persampahan memerlukan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang konsisten.
- 2) TPA menghadapi keterbatasan lahan yang drastis, sehingga metode *open dumping* sudah dilarang dan harus beralih ke *sanitary landfill* yang lebih ramah lingkungan.
- 3) Karakteristik sampah yang semakin beragam, termasuk residu dan sampah non-daur ulang, yang menyulitkan proses pengolahan.

- 4) Masih rendahnya pengelolaan sampah dari sumber dan masih adanya praktik pembuangan yang tidak sesuai ketentuan. Sebagian kecil masyarakat belum melakukan pengelolaan sampah dengan baik dimana cara yang paling dominan adalah dibakar. Kondisi ini menjadi tekanan langsung terhadap lingkungan perkotaan.
- 5) Aspek sanitasi permukiman turut memberikan tekanan terhadap lingkungan. Berdasarkan Tabel 2.36, Kota Pontianak masih memiliki penduduk miskin sebesar 4%, yang mengindikasikan masih adanya kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap sanitasi dan pengelolaan limbah domestik yang layak.

Tabel 2. 37 Jumlah Rumah Tangga Miskin

Kota	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
Kota Pontianak	729.168	27,50	4

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka 2026

- 6) Pengelolaan limbah cair pada badan usaha umumnya sudah memiliki landasan pengaturan dan kewajiban penyediaan IPAL sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pada kawasan permukiman, air limbah domestik masih banyak yang belum dikelola secara memadai sebelum dialirkan ke saluran drainase, parit, atau badan air. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan terhadap kualitas air permukaan masih tetap terjadi, meskipun pengendalian pada sektor usaha sudah lebih terstruktur.

C. State

Kondisi pengelolaan sampah di Kota Pontianak menunjukkan perkembangan yang cukup baik seiring dengan peningkatan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Indikator kinerja menunjukkan bahwa pengelolaan tidak hanya berfokus pada penanganan, tetapi juga pada pengurangan sampah. Selain itu, keterlibatan masyarakat menjadi

salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah.

1) Data Jumlah Sampah Terkelola Berdasarkan SIPSN

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPNS), jumlah timbulan sampah di Kota Pontianak Tahun 2025 sebesar ± 480 Ton/Hari, sementara yang dibuang ke TPA Batu Layang sekitar ± 369 ton/hari. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPNS) sebanyak 23% sampah di Kota Pontianak sudah terkelola sementara sisanya belum terkelola dengan baik.



Gambar 2. 30 Grafik Pengelolaan Sampah Kota Pontianak

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025

2) Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) pada Tabel berikut yang menunjukkan kinerja pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Tabel 2. 38 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

No	Tahun	IKPS
1	2025 (Semester 1)	42,9
2	2024 (Semester 2)	62,3

Kondisi pengelolaan sampah di Kota Pontianak secara umum tercermin dari Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.37**. Nilai IKPS Kota Pontianak pada Semester I Tahun 2025 tercatat sebesar 42,9, menurun dibandingkan Semester II Tahun 2024 yang mencapai 62,3. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sampah di Kota Pontianak masih memerlukan penguatan, baik dari sisi pengurangan sampah, penanganan sampah, maupun efektivitas layanan pengelolaan secara keseluruhan.

3) Kondisi Capaian Pengurangan dan Daur Ulang Sampah

Upaya pengurangan sampah di Kota Pontianak telah dilakukan melalui berbagai fasilitas pengelolaan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Capaian pengurangan sampah pada masing-masing fasilitas tersebut disajikan pada tabel berikut.

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Tabel 2. 39 Capaian Pengurangan dan Daur Ulang Sampah

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	Pendaurn Ulang Sampah		Jumlah Pendaurn Ulang Sampah /Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Pendaurn Ulang Sampah/ sampah Terkelola (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
					Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Pakan Ternak/Ikan (ton/hari)			
1	Bank Sampah Unit (Anorganik) dikelola oleh Masyarakat/Pemda	16	0,33	120,67	-	-	0,331	120,668	100
2	Bank Sampah Induk (Anorganik) dikelola oleh Masyarakat/Pemda	1	0,216	78,796	-	0,001	0,216	78,796	100
3	TPS3R (Organik dan atau Anorganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	2	0,219	79,931	0,118	-	0,219	79,931	100
4	POO (Pusat Olah Organik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	12	1,233	449,939	-	1.233,0000	1,233	449,939	100
5	Pengepul/Lapak	43	97,909	35736,727			97,909	35.736,727	100

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

Kondisi capaian pengurangan sampah di Kota Pontianak menunjukkan bahwa pengelolaan melalui berbagai fasilitas yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha telah berkontribusi terhadap pengurangan timbulan sampah. Berdasarkan tabel capaian pengurangan sampah, fasilitas yang berperan meliputi 16 unit Bank Sampah Unit, 1 unit Bank Sampah Induk, 2 unit TPS3R, 12 unit Pusat Olah Organik (POO), dan 43 unit pengepul/lapak. Dari seluruh fasilitas tersebut, volume sampah yang masuk dan berhasil dikelola didominasi oleh pengepul/lapak sebesar 97,909 ton/hari atau 35.736,727 ton/tahun, diikuti oleh Pusat Olah Organik sebesar 1,233 ton/hari atau 449,939 ton/tahun. Sementara itu, Bank Sampah Unit mengelola 0,331 ton/hari atau 120,668 ton/tahun, Bank Sampah Induk sebesar 0,216 ton/hari atau 78,796 ton/tahun, dan TPS3R sebesar 0,219 ton/hari atau 79,931 ton/tahun. Seluruh fasilitas tersebut tercatat memiliki persentase sampah terkelola sebesar 100 persen, yang menunjukkan bahwa sampah yang masuk ke fasilitas pengurangan telah seluruhnya dimanfaatkan atau dikelola.

D. Impact

Pengelolaan sampah yang baik memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Pontianak. Dampak ini terlihat dari berkurangnya potensi pencemaran yang diakibatkan oleh timbulan sampah yang tidak terkelola. Selain itu, sistem pengelolaan yang berjalan juga membantu meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

- 1) Pengelolaan yang baik mampu mengurangi potensi pencemaran tanah, air, dan udara di wilayah perkotaan.
- 2) Capaian pengurangan pada **Tabel 2.38** sudah berkontribusi dalam mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA. Pengurangan sampah telah memberikan dampak positif, namun belum

se penuhnya mengurangi tekanan sistem persampahan di Kota Pontianak.

- 3) Keberadaan bank sampah, TPS3R, Pusat Olah Organik, dan pengepul/lapak telah memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan sampah, terutama melalui pengelolaan sampah anorganik dan organik. Namun demikian, capaian tersebut masih didominasi oleh pengepul/lapak, sehingga dampak positif pengurangan sampah belum sepenuhnya mampu menyeimbangi besarnya timbulan sampah kota dan tekanan terhadap sistem pengelolaan secara keseluruhan.
- 4) Pengelolaan limbah cair domestik dan kegiatan usaha yang lebih baik memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan perairan Kota Pontianak. Meskipun demikian, pengaruhnya belum sepenuhnya merata, mengingat masih terdapat kawasan permukiman yang sistem pengelolaan air limbahnya belum optimal sehingga tekanan terhadap kualitas air permukaan masih tetap terjadi.
- 5) Pengelolaan sampah dan limbah perkotaan turut berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat. Lingkungan yang kurang bersih akibat sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Jenis penyakit utama yang diderita masyarakat di Kota Pontianak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Penyakit Utama Yang Diderita Masyarakat

Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
Kota Pontianak	Essential (primary) hypertension	54.409
	Acute nasopharyngitis (common cold)	44.912
	Dyspepsia	28.448
	Acute upper respiratory infection, unspecified	20.575

Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
	Non-insulin-dependent diabetes melitus	19.522
	Acute pharyngitis	15.004
	Acute upper respiratory infection of multiple and unspecified sites	14.889
	Myalgia	13.329
	Fever, unspecified	12.535
	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	11.652

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2025

E. Response

Upaya pengelolaan sampah di Kota Pontianak dilakukan melalui berbagai strategi yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada penanganan sampah, tetapi juga pada pengurangan dari sumber. Selain itu, penguatan kebijakan dan dukungan program menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.

- 1) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan
- 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
- 3) Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah

Penguatan sistem pengelolaan sampah juga dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan. Dalam dokumen studi kelayakan TPST/TPS3R disebutkan bahwa sistem pengangkutan sampah di Kota Pontianak didukung oleh armada dan fasilitas persampahan, antara lain dump truck, pick up, gerobak motor/tossa, serta fasilitas TPS, TPST/TPS3R, rumah kompos, dan pusat daur ulang. Dukungan sarana tersebut menjadi bagian penting

dalam memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat kota.



Gambar 2. 31 Armada Pengangkut Sampah

- 4) Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Bank Sampah
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang dimulai dari sumber timbulan. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis bank sampah sebagai upaya untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya. Kegiatan ini diarahkan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai pemilahan, pengurangan, dan pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Tabel 2. 41 Daftar Bank Sampah di Kota Pontianak

No	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status
1	Bank Sampah Induk Khatulistiwa	-	7.800,000	Aktif

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

No	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status
2	Bank Sampah Unit Ananda	21/PARMA/TAHUN 2020	198,150	Aktif
3	Bank Sampah Unit Berkah Mendawai	28 Tahun 2018	93,580	Aktif
4	Bank Sampah Unit Beting Permai	02 Tahun 2019	85,750	Aktif
5	Bank Sampah Unit Borneo	10 Tahun 2014	747,580	Aktif
6	Bank Sampah Unit Dansen Sejahtera	09 Tahun 2019	2.200,800	Aktif
7	Bank Sampah Unit Bank Sampah DLH	22 Tahun 2019	80,810	Aktif
8	Bank Sampah Unit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SK.13/MENLHK-KORWIL/BPDASHL.Kp/PLB.0/6/2022	105,000	Aktif
9	Bank Sampah Unit Laily Raya	32 Tahun 2019	65,000	Aktif
10	Bank Sampah Unit Mahasiswa Untan	14 Tahun 2021	62,350	Aktif
11	Bank Sampah Unit Maju Bersama	12 Tahun 2022	206,160	Aktif
12	Bank Sampah Unit Melati	22/PARMA/TAHUN 2020	21,020	Aktif
13	Bank Sampah Milenial	-	-	Pembinaan
14	Bank Sampah Unit Nilam 7	15 Tahun 2021	49,450	Aktif
15	Bank Sampah Unit Palem Asri	07 Tahun 2018	1.604,100	Aktif
16	Bank Sampah Unit Permata	72 Tahun 2022	3.269,500	Aktif
17	Bank Sampah Unit Rosella	14 Tahun 2013	655,810	Aktif
18	Bank Sampah Unit Rosella Siantan	04 Tahun 2013	622,000	Aktif

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

No	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status
19	Bank Sampah Unit Rumput Hias	07 Tahun 2018	-	Aktif
20	Bank Sampah Unit Sejahtera Asri	57.a Tahun 2019	131,500	Aktif
21	Bank Sampah Unit Slamet Sejahtera	01 Tahun 2015 (06.1 Tahun 2022)	123,880	Aktif

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025



Gambar 2. 32 Bank Sampah di Kota Pontianak

- Pengelolaan Sampah melalui TPST/TPS3R dengan Metode 3R
Pengelolaan sampah melalui TPST/TPS3R merupakan bagian dari penerapan metode **3R (reduce, reuse, recycle)** dalam sistem persampahan Kota Pontianak. Melalui fasilitas ini, sampah tidak seluruhnya langsung dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir, tetapi terlebih dahulu ditangani melalui tahapan pengumpulan, pemilahan, penyimpanan sementara, dan pengolahan sesuai karakteristiknya. Pengembangan fasilitas ini diarahkan untuk mengurangi timbunan sampah yang masuk ke TPA Batu Layang, yang hingga kini masih menjadi tumpuan utama pelayanan persampahan kota. Pemerintah Kota Pontianak telah didukung oleh keberadaan fasilitas TPST dan TPS3R yang tersebar di beberapa lokasi. Fasilitas tersebut berperan dalam mendukung penerapan pengelolaan sampah berbasis reduce,

reuse, dan recycle (3R), terutama melalui kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah sebelum masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir. Sebaran fasilitas TPST dan TPS3R di Kota Pontianak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 42 Fasilitas TPST/TPS3R di Kota Pontianak

No	Nama Fasilitas	Lokasi
1	TPST Edelweis	Jl. Purnama II, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan
2	TPS3R Kurnia	Jl. Kurnia
3	TPS3R Borneo	Jl. Kom. Yos. Sudarso
4	TPS3R Borneo	Jl. Tanjung Harapan, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur
5	TPS3R Palem Asri	Komplek Ganda Dewata, Kelurahan Sui Jawi, Kecamatan Pontianak Kota
6	Pusat Daur Ulang (PDU) Nipah Kuning	Jl. Nipah Kuning Dalam
7	Rumah Kompos	Jl. Kebangkitan Nasional

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

Fasilitas TPST/TPS3R juga membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah, termasuk pengolahan sampah anorganik menjadi produk bernilai ekonomi.



Gambar 2. 33 TPST/TPS3R di Kota Pontianak

- Pengelolaan Sampah Organik dengan Metode Biodigester
Pemanfaatan sampah organik melalui metode biodigester menjadi salah satu bentuk penguatan pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Melalui metode ini, sampah organik diolah menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, serta menghasilkan residu yang masih dapat digunakan sebagai pupuk organik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sampah organik tidak hanya dipandang sebagai limbah, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali dalam kerangka pengelolaan yang lebih berkelanjutan.



Gambar 2. 34 Fasilitas Biodisgester

- Pengelolaan Sampah Organik dengan Metode Pengomposan
Pengelolaan sampah organik melalui pengomposan merupakan salah satu langkah penting untuk mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA. Hal ini relevan karena timbulan sampah perkotaan masih didominasi oleh bahan organik, seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan dedaunan. Dalam pengelolaan persampahan Kota Pontianak, metode pengomposan dilakukan baik secara komunal maupun melalui fasilitas pengolahan sampah, dan dalam dokumen studi kelayakan TPST/TPS3R juga ditegaskan bahwa pemisahan sampah organik merupakan bagian penting dari upaya

pengurangan beban TPA Batu Layang. Selain pengomposan konvensional, pengolahan sampah organik juga dapat dikembangkan melalui metode maggot dengan larva *Black Soldier Fly* (BSF) yang mampu mempercepat proses penguraian bahan organik.



Gambar 2. 35 Larva BSF

- Pengelolaan Sampah Plastik dengan Metode Pirolisis
Metode pirolisis juga dapat menjadi alternatif dalam pengolahan sampah plastik di kawasan perkotaan. Proses ini dilakukan melalui pemanasan bahan tanpa oksigen sehingga menghasilkan produk berupa biochar, bio-oil, dan gas sintetis. Penerapan metode ini memberikan peluang pengurangan volume sampah sekaligus mendukung pemanfaatan hasil olahan yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, pirolisis dapat dipandang sebagai salah satu opsi teknologi pengolahan sampah yang dapat memperkuat sistem pengelolaan persampahan daerah.



Gambar 2. 36 Bahan Bakar Hasil Pirolisis

5) Melaksanakan Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah

- Operasional Penyapuan Kebersihan Jalan Kota

Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan kegiatan penyapuan kebersihan jalan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan kawasan perkotaan. Kegiatan penyapuan dilakukan setiap hari pada pukul 05.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB, sedangkan penyisiran sampah hasil penyapuan dilaksanakan oleh pasukan penyisiran mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondisi ruas jalan dan ruang publik yang lebih bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

- Pengaturan Waktu Pembuangan Sampah

Penanganan persampahan di Kota Pontianak juga didukung melalui pengaturan jadwal pembuangan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2006. Dalam ketentuan tersebut, masyarakat diarahkan untuk membuang sampah pada pukul 18.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB. Pengaturan waktu ini dimaksudkan agar sampah terkonsentrasi di TPS pada saat armada pengangkutan bertugas, sehingga proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dapat berjalan lebih tertib dan optimal.

6) Melaksanakan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional

7) Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

- Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah dari sumbernya, Pemerintah Kota Pontianak juga menerapkan kebijakan pembatasan kantong plastik. Kebijakan ini didasarkan

pada **Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik**, yang statusnya tercatat **berlaku** dalam JDIH Kota Pontianak. Penguatan implementasinya dilakukan melalui **Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 43 Tahun 2024 tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha**, dan JDIH Kota Pontianak menyebut bahwa mulai **1 Januari 2025** pelaku usaha di Kota Pontianak tidak lagi diperbolehkan menyediakan kantong plastik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengurangan sampah di Kota Pontianak tidak hanya dilakukan pada tahap pengelolaan, tetapi juga diarahkan untuk menekan timbulan sampah plastik sejak dari aktivitas belanja masyarakat.



Gambar 2. 37 Larangan Penggunaan Kantong Plastik

8) Inovasi GALAH BUNG SAM di Sekolah

Upaya pengurangan sampah di Kota Pontianak juga diperkuat melalui inovasi **GALAH BUNG SAM (Gerakan Memilah dan Menabung Sampah) di Sekolah** yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Inovasi ini dikembangkan untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak usia dini melalui integrasi edukasi lingkungan, sistem tabungan sampah, dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Program tersebut ditetapkan sebagai inovasi daerah melalui **Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 859/BAPPEDA/Tahun 2024**. Keberadaan inovasi ini

menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Pontianak tidak hanya diarahkan pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan perilaku peduli lingkungan secara berkelanjutan sejak lingkungan pendidikan.



Gambar 2. 38 Kegiatan GALAH BUNG SAM

9) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Koordinasi Rencana Sistem Penanganan Sampah Tepian Sungai

Bersama pihak Akademisi, Perkindo, Pegiat Lingkungan serta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di permukiman tepian sungai kapuas. Kegiatan ini bertujuan untuk *sharing idea* konsep penanganan sampah tepian sungai yang bisa diterapkan di Kota Pontianak (konsep terlampir)

- Melakukan kegiatan Pendampingan TPA dalam rangka penyelesaian sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

10) Pengelolaan Limbah Cair dengan SPALD-T

Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat pengelolaan limbah cair domestik melalui percepatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Pengembangan infrastruktur ini didukung oleh pemerintah pusat dan lembaga

internasional, termasuk *Asian Development Bank* (ADB), sebagai upaya meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik agar lebih terpusat, terencana, dan mampu mengurangi potensi pencemaran lingkungan. Rencana pembangunan SPALD-T di dua lokasi Nipah Kuning dan Martapura

11) Melaksanakan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan LB3 melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

12) Keberadaan Perusahaan Pengelola Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 di Kota Pontianak turut didukung oleh keberadaan perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3. Keberadaan perusahaan tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang penanganan limbah B3 agar dapat dikelola sesuai ketentuan serta mengurangi potensi pencemaran lingkungan. Daftar perusahaan yang memperoleh izin mengelola limbah B3 di Kota Pontianak pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 43 Perusahaan Pengelola Limbah B3 Berizin

No	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi
1	2025	PT. Mitra Karya Surya Kencana	Jalan Budi Utomo, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

No	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi
2	2025	PT. Safira Maju Mandiri	Jalan Dharma Putra, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak
3	2025	PT. Putra Limbah Khatulistiwa	Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

2.7 Perubahan Iklim

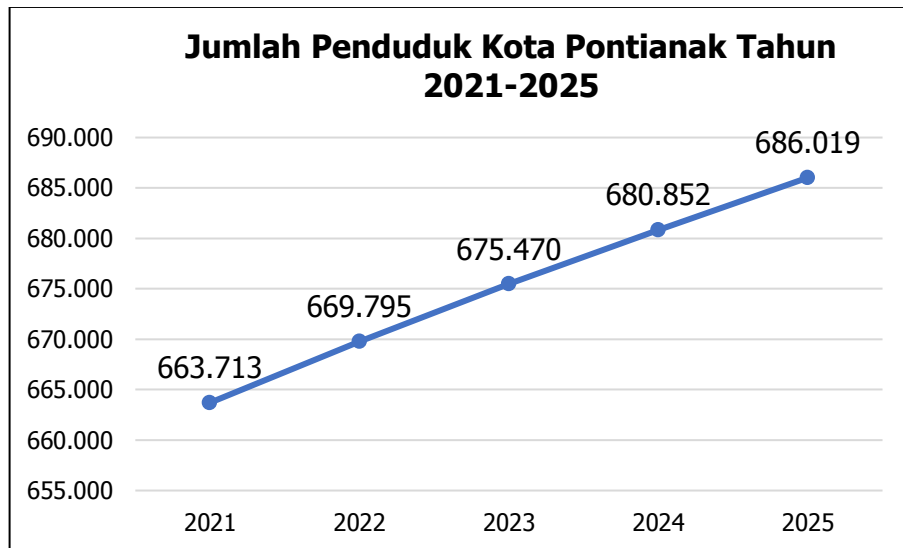
Perubahan iklim menjadi salah satu isu penting yang mempengaruhi kondisi lingkungan di Kota Pontianak, terutama karena karakteristik wilayah yang didominasi dataran rendah dan lahan rawa. Variabilitas iklim seperti perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu udara berpotensi mempengaruhi keseimbangan lingkungan perkotaan. Kondisi ini memerlukan upaya mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

A. Driving Force

Perubahan iklim di Kota Pontianak dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Aktivitas perkotaan yang terus berkembang berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi energi dan penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, perubahan penggunaan lahan juga berperan dalam mengurangi kapasitas lingkungan dalam menyerap emisi.

- 1) Pertumbuhan Penduduk Mendorong Peningkatan Kebutuhan Energi
Jumlah penduduk Kota Pontianak menunjukkan tren meningkat selama periode 2021–2025. Berdasarkan grafik, jumlah penduduk bertambah dari 663.713 jiwa pada tahun 2021 menjadi 686.019 jiwa pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertambahan kebutuhan ruang untuk permukiman, sarana pelayanan umum, fasilitas sosial, serta infrastruktur perkotaan. Selain itu, pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan energi, transportasi,

dan aktivitas domestik yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca di wilayah perkotaan.



Gambar 2. 39 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka, 2026

- 2) Peningkatan Aktivitas Ekonomi Sebabkan Emisi Sektor Transportasi
Adanya peningkatan aktivitas ekonomi perkotaan oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, serta jasa-jasa. Kondisi ini meningkatkan intensitas kegiatan jasa, perdagangan, dan distribusi yang berdampak pada meningkatnya konsumsi energi dan emisi sektor transportasi yang memengaruhi sistem lingkungan dan iklim lokal.
- 3) Perubahan Penggunaan Lahan Mengurangi Area Resapan Tanah
Perubahan penggunaan lahan di Kota Pontianak pada **Tabel 2.43** menunjukkan bahwa ruang terbuka dan lahan vegetatif terus mengalami tekanan akibat perluasan kawasan terbangun. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya daya serap tanah terhadap air hujan. Peningkatan aktivitas pembangunan menyebabkan perubahan kondisi hidrologi yang mempengaruhi sistem aliran air.

Tabel 2. 44 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

Kota	Luas Lahan Kering Campur Semak (Ha)	Luas Lahan Terbuka (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Pemukiman (Ha)	Luas Tubuh Air (Ha)
Kota Pontianak	0,02	145,03	1.181,10	2.345,46	7.487,82	662,07

Sumber : BPKH Wilayah III Kota Pontianak, 2026

4) Pertumbuhan Ekonomi Sebabkan Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor

Perkembangan ekonomi meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, dan distribusi barang yang berkontribusi terhadap emisi dari sektor transportasi dan kegiatan usaha. Pertumbuhan ekonomi juga mendorong naiknya penggunaan kendaraan bermotor, konsumsi bahan bakar, dan aktivitas perkotaan lainnya yang menghasilkan emisi dan polutan. Jumlah kendaraan bermotor pada **Tabel 2.44** menunjukkan adanya sumber emisi yang terus berkembang di wilayah Kota Pontianak.

Tabel 2. 45 Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
1.	Sepeda Motor	822.466	-	-	-
2.	Mobil Penumpang	90.735	-	-	-
3.	Mobil Bus	605	-	-	-
4.	Mobil Barang	45.282	-	-	-
5.	Kendaraan Khusus	385	-	-	-

Keterangan: Menurut PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pontianak, 2025

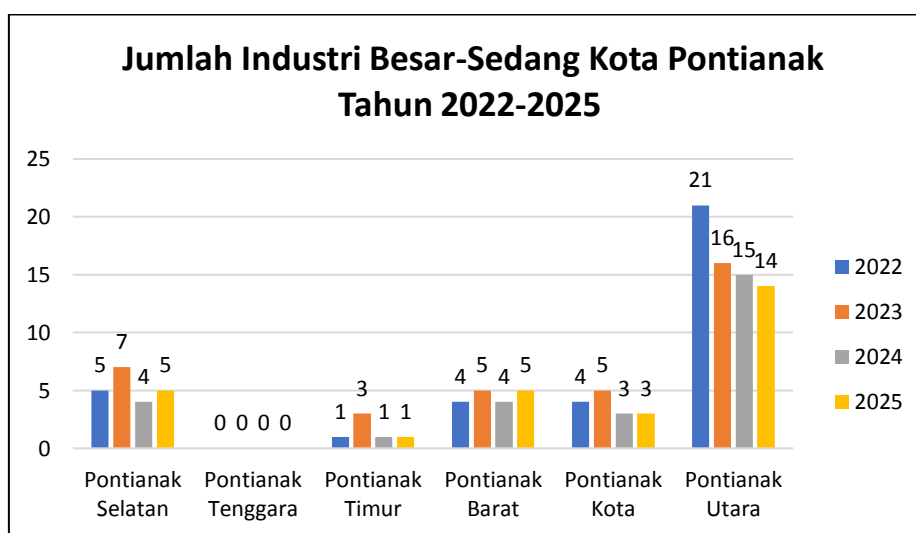
B. Pressure

Tekanan perubahan iklim di Kota Pontianak tercermin dari meningkatnya emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor kegiatan. Aktivitas transportasi, penggunaan energi, serta perubahan lahan

menjadi penyumbang utama tekanan terhadap sistem iklim lokal. Selain itu, kondisi lahan gambut yang sensitif turut meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim.

1) Penggunaan Bahan Bakar Sektor Industri Hasilkan Emisi GRK

Penggunaan bahan bakar pada sektor rumah tangga dan industri kecil sebagaimana tercantum pada **Gambar 2.26** turut menyumbang emisi gas pencemar udara. Pemakaian energi berbahan bakar pada rumah tangga, usaha skala kecil, dan kegiatan ekonomi perkotaan turut memberikan tekanan terhadap emisi gas rumah kaca.



**Gambar 2. 40 Jumlah Industri Besar-Sedang Kota
Pontianak Tahun 2022-2025**

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026

2) Emisi GRK Oleh Berbagai Sektor di Kota Pontianak

Tekanan terhadap perubahan iklim di Kota Pontianak disebabkan oleh besaran emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh berbagai sektor kegiatan. Rincian tingkat emisi GRK masing-masing sektor disajikan pada **Tabel 2.45**

Tabel 2. 46 Tingkat Emisi GRK Masing-Masing Sektor

Tahun	Sektor Energi (Gg CO2 eq)	Sektor IPPU (Gg CO2 eq)	Sektor Pertanian (Gg CO2 eq)	Sektor Kehutanan (Gg CO2 eq)	Sektor Limbah (Gg CO2 eq)
2024	971,98	0	10,17	118,93	242,64
2023	856,01	0	7,24	98,21	240,88
2022	814,49	0	7,55	142,81	226,69
2021	872,39	0	11,43	112,4	224,98
2020	806,11	0	9,94	103,2	210,55
2019	933,01	0	10,57	0	181,87
2018	634,22	0	5,64	218,53	143,33
2017	838,29	0	3,95	0	142,82
2016	838,28	0	3,75	0	137,52
2015	923,16	0	3,97	0	137,84
2014	898,46	0	4,33	0	132,56
2013	905,08	0	4,95	0	134,01
2012	904,92	0	7,65	0	132,64
2011	867,38	0	6,46	0	75,74
2010	864,1	0	3,64	0	75,09

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.45**, sektor energi merupakan penyumbang emisi GRK terbesar di Kota Pontianak selama periode 2010–2024, dengan nilai yang cenderung tinggi dan mencapai 971,98 Gg CO2 eq pada Tahun 2024. Sektor limbah juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar serta kecenderungan meningkat, dari 75,09 Gg CO2 eq pada tahun 2010 menjadi 242,64 Gg CO2 eq pada Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap perubahan iklim di Kota Pontianak terutama berasal dari sektor energi dan limbah, sejalan dengan meningkatnya aktivitas perkotaan, kebutuhan energi, dan timbunan limbah.

3) Perubahan Struktur Lahan Mengurangi Penyerapan Limpasan Permukaan

Perubahan struktur lahan dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga limpasan permukaan meningkat dan memengaruhi siklus hidrologi perkotaan. Dalam kondisi perubahan iklim, ketika hujan berintensitas tinggi dapat terjadi lebih sering, keadaan ini dapat memperbesar potensi genangan di Kota Pontianak,

terutama pada wilayah dataran rendah dan kawasan terbangun padat.

C. State

Kondisi perubahan iklim di Kota Pontianak dapat dilihat dari perubahan pola curah hujan dan suhu udara. Variasi curah hujan yang terjadi menunjukkan adanya ketidakstabilan pola iklim yang berdampak pada kondisi lingkungan. Selain itu, peningkatan suhu udara juga menjadi indikator perubahan kondisi atmosfer perkotaan.

1) Pola Curah Hujan Tinggi

Pola curah hujan pada **Tabel 2.46** menunjukkan adanya fluktuasi curah hujan bulanan sepanjang tahun. Kondisi ini dapat memengaruhi sistem drainase perkotaan dan meningkatkan potensi genangan, terutama pada bulan dengan curah hujan yang tinggi.

Tabel 2. 47 Curah Hujan Rata-Rata Bulanan

Nama Stasiun	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan (mm)											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Stasiun Meteorologi Maritim	368.3	165.2	378.3	168.6	166.7	236.5	45.8	446	384.6	60.7	224.7	184.9

Sumber: Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, 2025

2) Suhu Udara Perkotaan Meningkat Akibat Pemanasan Global

Perubahan iklim dan pemanasan global tidak terlepas dari emisi kendaraan bermotor yang menghasilkan karbon dioksida (CO₂) dalam jumlah besar. Gas tersebut menghambat pelepasan panas bumi ke luar angkasa, sehingga suhu permukaan bumi terus mengalami kenaikan. Suhu udara rata-rata pada **Tabel 2.47** menunjukkan kecenderungan peningkatan suhu yang berdampak pada kondisi iklim mikro di Kota Pontianak.

Tabel 2. 48 Suhu Udara Rata-Rata Bulanan

Nama Stasiun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Stasiun Meteorologi Maritim	26.8	27.2	27.6	27.7	29	28.5	28.8	27.4	27.5	27.4	27.6	27.5

Sumber: Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, 2025

3) Tingkat Kerentanan Berdasarkan Kecamatan di Kota Pontianak

Kondisi perubahan iklim di Kota Pontianak tercermin dari tingkat kerentanan wilayah terhadap beberapa bencana terkait iklim. Seluruh kecamatan di Kota Pontianak berada pada tingkat kerentanan sedang terhadap banjir dan cuaca ekstrem (angin kencang), sedangkan untuk kebakaran hutan dan lahan terdapat 3 kecamatan dengan tingkat kerentanan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Pontianak memiliki tingkat kerentanan yang perlu diperhatikan terhadap ancaman perubahan iklim, terutama yang berkaitan dengan kejadian hidrometeorologi dan potensi kebakaran lahan pada kondisi tertentu.

Tabel 2. 49 Jumlah Kecamatan Berdasarkan Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim

Tahun	Bencana	Jumlah Kecamatan Tingkat Kerentanan Tinggi	Jumlah Kecamatan Tingkat Kerentanan Sedang	Jumlah Kecamatan Tingkat Kerentanan Rendah
Periode dokumen kajian risiko bencana (tahun 2024 - 2028)	Banjir	-	6	-
	Cuaca ekstrim (angin kencang)	-	6	-
	Karhutla	3	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, 2025

D. Impact

Dampak perubahan iklim di Kota Pontianak terlihat dari meningkatnya kejadian genangan dan banjir akibat intensitas hujan yang tinggi.

Kondisi ini diperparah oleh karakteristik wilayah yang berada di dataran rendah dan dipengaruhi oleh pasang surut Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Selain itu, peningkatan suhu udara juga berdampak pada kenyamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

- Dampak perubahan iklim juga terlihat melalui kejadian bencana di Kota Pontianak pada Tahun 2025, terutama cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan di beberapa kecamatan. Kejadian tersebut menunjukkan adanya area terdampak dan korban terdampak, yang menandakan bahwa perubahan iklim tidak hanya menjadi tekanan terhadap lingkungan, tetapi telah menimbulkan konsekuensi nyata terhadap wilayah dan masyarakat.

Tabel 2. 50 Kejadian Bencana di Kota Pontianak

Kecamatan	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Jumlah Korban
Pontianak Barat	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	1	7
	Kebakaran Permukiman	8	46
Pontianak Kota	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	1	9
	Kebakaran Permukiman	12	43
	Lainnya	1	0
Pontianak Selatan	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	2	0
	Kebakaran Hutan dan Lahan	6	0
Pontianak Tenggara	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	6	13
	Kebakaran Hutan dan Lahan	17	0
	Kebakaran Permukiman	4	34
	Lainnya	1	6
Pontianak Timur	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	9	46
	Kebakaran Permukiman	8	98
	Lainnya	1	1
Pontianak Utara	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	17	85
	Kebakaran Hutan dan Lahan	6	0
	Kebakaran Permukiman	9	63
Total		109	451

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, 2025

- 1) Dominasi lahan gambut di sekitar kota menjadikan kebakaran lahan sebagai risiko signifikan, terutama saat musim kemarau. Kejadian

karhutla di Kota Pontianak tahun 2025 mengalami peningkatan pada Juli–Agustus. Kebakaran umumnya terjadi pada lahan semak dan gambut, bahkan di beberapa lokasi mendekati permukiman, sehingga menimbulkan asap yang mempengaruhi kualitas udara.

- 2) Pada Juli 2025, kualitas udara di Pontianak menurun akibat kabut asap karhutla dan nilai ISPU berada pada kategori tidak sehat. Meskipun tidak terjadi peningkatan kasus ISPA, namun dampak karhutla menyebabkan penurunan kualitas udara yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat.
- 3) Bencana banjir rob di Kota Pontianak pada Desember 2025 menimbulkan dampak berupa terendamnya permukiman di kawasan pesisir, dataran rendah, dan tepian sungai, serta mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Banjir rob juga menyebabkan gangguan lalu lintas pada ruas-ruas jalan terdampak, menghambat mobilitas warga dan aktivitas perkotaan secara umum.
- 4) Cuaca ekstrem yang terjadi di Pontianak tahun 2025 menimbulkan dampak berupa kerusakan rumah warga, pohon tumbang, dan gangguan pada kawasan permukiman, terutama akibat angin puting beliung dan angin kencang. Selain itu, bencana ini juga berdampak pada sektor pertanian, yaitu merusak lahan hortikultura dan memengaruhi ratusan petani di Pontianak Utara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cuaca ekstrem tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik pada bangunan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan mata pencaharian warga.

E. Response

Upaya penanganan perubahan iklim di Kota Pontianak dilakukan melalui strategi mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi. Pemerintah daerah telah mengembangkan program yang mendukung pengurangan emisi serta peningkatan ketahanan lingkungan. Selain itu, kebijakan daerah

BUKU II – LAPORAN UTAMA**DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)****KOTA PONTIANAK TAHUN 2026**

juga diarahkan untuk mengintegrasikan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan.

1) Pengurangan Emisi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Upaya mitigasi perubahan iklim di Kota Pontianak dilakukan terutama pada pengelolaan persampahan melalui operasionalisasi bank sampah, serta didukung oleh beberapa tindakan di sektor transportasi. Secara umum, aksi mitigasi tersebut berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca khususnya Karbon dioksida (CO₂).

Tabel 2. 51 Pengurangan Emisi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Kota Pontianak Tahun 2024

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO₂eq)
1	[SIPSN] Operasionalisasi Suharto - Bank Sampah - Pengepul	21561,732
2	[SIPSN] Operasionalisasi Abdul Haris - Bank Sampah - Pengepul	15,647529
3	[SIPSN] Operasionalisasi Nilam 7 - Bank Sampah - Unit	0,7483718
4	[SIPSN] Operasionalisasi Timwar - Bank Sampah - Pengepul	-
5	[SIPSN] Operasionalisasi Susanto - Bank Sampah - Pengepul	148236,9
6	[SIPSN] Operasionalisasi Sukarman - Bank Sampah - Pengepul	-
7	[SIPSN] Operasionalisasi Subur - Bank Sampah - Pengepul	49412,305
8	[SIPSN] Operasionalisasi Sadin - Bank Sampah - Pengepul	49412,305
9	[SIPSN] Operasionalisasi Rudy Kariantoko - Bank Sampah - Pengepul	938833,75
10	[SIPSN] Operasionalisasi Rahman - Bank Sampah - Pengepul	5,667142
11	[SIPSN] Operasionalisasi Rahim Belantara - Bank Sampah - Pengepul	2,0627391
12	[SIPSN] Operasionalisasi PT Furbo - Bank Sampah - Pengepul	-
13	[SIPSN] Operasionalisasi Ngatman - Bank Sampah - Pengepul	10,95336
14	[SIPSN] Operasionalisasi Muhammad Aditya - Bank Sampah - Pengepul	7,823315
15	[SIPSN] Operasionalisasi Margono - Bank Sampah - Pengepul	12,517484
16	[SIPSN] Operasionalisasi Mardianto - Bank Sampah - Pengepul	4,6941686
17	[SIPSN] Operasionalisasi Mak Nyah - Bank Sampah - Pengepul	146,73927
18	[SIPSN] Operasionalisasi M. Hitler Pasaribu - Bank Sampah - Pengepul	9,388337
19	[SIPSN] Operasionalisasi Juminah Helian Lina - Bank Sampah - Pengepul	19,559187
20	[SIPSN] Operasionalisasi Jumali - Bank Sampah - Pengepul	15,647529
21	[SIPSN] Operasionalisasi Johari - Bank Sampah - Pengepul	12,517484
22	[SIPSN] Operasionalisasi Heri - Bank Sampah - Pengepul	14,552372
23	[SIPSN] Operasionalisasi Heni - Bank Sampah - Pengepul	15,647529
24	[SIPSN] Operasionalisasi Hartono - Bank Sampah - Pengepul	25,192188
25	[SIPSN] Operasionalisasi Erwin - Bank Sampah - Pengepul	7,823315

BUKU II – LAPORAN UTAMA**DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)****KOTA PONTIANAK TAHUN 2026**

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO₂eq)
26	[SIPSN] Operasionalisasi Edi Sugianto - Bank Sampah - Pengepul	20,341698
27	[SIPSN] Operasionalisasi Dafit - Bank Sampah - Pengepul	10,95336
28	[SIPSN] Operasionalisasi Candra - Bank Sampah - Pengepul	12,517484
29	[SIPSN] Operasionalisasi Aseng - Bank Sampah - Pengepul	29,94655
30	[SIPSN] Operasionalisasi Antonius - Bank Sampah - Pengepul	17,211653
31	[SIPSN] Operasionalisasi Ana/Apin - Bank Sampah - Pengepul	16,445312
32	[SIPSN] Operasionalisasi Ana - Bank Sampah - Pengepul	15,756236
33	[SIPSN] Operasionalisasi Abdul Yasid - Bank Sampah - Pengepul	19,445988
34	[SIPSN] Operasionalisasi Timwar - Bank Sampah - Pengepul	-
35	[SIPSN] Operasionalisasi Susanto - Bank Sampah - Pengepul	13476,083
36	[SIPSN] Operasionalisasi Sukarman - Bank Sampah - Pengepul	-
37	[SIPSN] Operasionalisasi Subur - Bank Sampah - Pengepul	4492,0273
38	[SIPSN] Operasionalisasi Sadin - Bank Sampah - Pengepul	4492,0273
39	[SIPSN] Operasionalisasi Rudy Kariantoko - Bank Sampah - Pengepul	898,4055
40	[SIPSN] Operasionalisasi Rahman - Bank Sampah - Pengepul	4,7911963
41	[SIPSN] Operasionalisasi Rahim Belantara - Bank Sampah - Pengepul	16,198252
42	[SIPSN] Operasionalisasi PT Furbo - Bank Sampah - Pengepul	-
43	[SIPSN] Operasionalisasi Ngatman - Bank Sampah - Pengepul	10,481697
44	[SIPSN] Operasionalisasi Muhammad Aditya - Bank Sampah - Pengepul	7,486413
45	[SIPSN] Operasionalisasi Margono - Bank Sampah - Pengepul	11,97844
46	[SIPSN] Operasionalisasi Mardianto - Bank Sampah - Pengepul	4,4920278
47	[SIPSN] Operasionalisasi Mak Nyah - Bank Sampah - Pengepul	119,7871
48	[SIPSN] Operasionalisasi M. Hitler Pasaribu - Bank Sampah - Pengepul	8,9840555
49	[SIPSN] Operasionalisasi Juminah Helian Lina - Bank Sampah - Pengepul	18,716482
50	[SIPSN] Operasionalisasi Jumali - Bank Sampah - Pengepul	14,973724
51	[SIPSN] Operasionalisasi Johari - Bank Sampah - Pengepul	11,97844
52	[SIPSN] Operasionalisasi Heri - Bank Sampah - Pengepul	13,925285
53	[SIPSN] Operasionalisasi Heni - Bank Sampah - Pengepul	14,973724
54	[SIPSN] Operasionalisasi Hartono - Bank Sampah - Pengepul	24,106915
55	[SIPSN] Operasionalisasi Erwin - Bank Sampah - Pengepul	10,481697
56	[SIPSN] Operasionalisasi Edi Sugianto - Bank Sampah - Pengepul	19,465752
57	[SIPSN] Operasionalisasi Dafit - Bank Sampah - Pengepul	10,481697
58	[SIPSN] Operasionalisasi Candra - Bank Sampah - Pengepul	11,97844
59	[SIPSN] Operasionalisasi Aseng - Bank Sampah - Pengepul	14,973724
60	[SIPSN] Operasionalisasi Antonius - Bank Sampah - Pengepul	16,470469
61	[SIPSN] Operasionalisasi Ana/Apin - Bank Sampah - Pengepul	15,73737
62	[SIPSN] Operasionalisasi Ana - Bank Sampah - Pengepul	15,87213
63	[SIPSN] Operasionalisasi Abdul Yasid - Bank Sampah - Pengepul	12,876846
64	Pengujian Kendaraan Bermotor	-
65	Penyediaan Angkutan Umum	-
66	Pengawasan Titik Parkir	-

BUKU II – LAPORAN UTAMA**DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)****KOTA PONTIANAK TAHUN 2026**

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO₂eq)
67	Penyediaan Perlengkapan Pendukung Lalu Lintas	-
68	[SIPSN] Operasionalisasi Kampung Caping - Bank Sampah - Unit	1,2227299
69	[SIPSN] Operasionalisasi TPA BATU LAYANG - Tempat Pembuangan Akhir TPA - TPA Pemda (Non Regional)	-
70	[SIPSN] Operasionalisasi TPA BATU LAYANG - Tempat Pembuangan Akhir TPA - TPA Pemda (Non Regional)	-
71	[SIPSN] Operasionalisasi Permata - Bank Sampah - Unit	32,596848
72	[SIPSN] Operasionalisasi BSI Khatulistiwa - Bank Sampah - Induk	233,58543
73	[SIPSN] Operasionalisasi Bank Sampah Maju Bersama - Bank Sampah - Unit	4,349181
74	[SIPSN] Operasionalisasi Bank Sampah Mahasiswa - Bank Sampah - Unit	1,559632
75	[SIPSN] Operasionalisasi Sejahtera Asri - Bank Sampah - Unit	2,5901031
76	[SIPSN] Operasionalisasi Rosella Siantan - Bank Sampah - Unit	1,7815381
77	[SIPSN] Operasionalisasi Melati - Bank Sampah - Unit	0,40248567
78	[SIPSN] Operasionalisasi Bank Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bank Sampah - Unit	1,9468447
79	[SIPSN] Operasionalisasi DLH - Bank Sampah - Unit	2,1013706
80	[SIPSN] Operasionalisasi Laily Raya - Bank Sampah - Unit	1,1975745
81	[SIPSN] Operasionalisasi Palem Asri - Bank Sampah - Unit	20,617508
82	[SIPSN] Operasionalisasi Ananda - Bank Sampah - Unit	3,861347
83	[SIPSN] Operasionalisasi Slamet Sejahtera - Bank Sampah - Unit	2,1103544
84	[SIPSN] Operasionalisasi Beting Permai - Bank Sampah - Unit	1,1382798
85	[SIPSN] Operasionalisasi Dansen Sejahtera - Bank Sampah - Unit	60,84631
86	[SIPSN] Operasionalisasi Rosella Purnama - Bank Sampah - Unit	15,069854
87	[SIPSN] Operasionalisasi Borneo - Bank Sampah - Unit	5,0310707
88	[SIPSN] Operasionalisasi Permata - Bank Sampah - Unit	12,417761
89	[SIPSN] Operasionalisasi BSI Khatulistiwa - Bank Sampah - Induk	0,00988246
90	[SIPSN] Operasionalisasi Bank Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bank Sampah - Unit	1,9468447
91	[SIPSN] Operasionalisasi Bank Sampah Maju Bersama - Bank Sampah - Unit	4,349181
92	[SIPSN] Operasionalisasi Bank Sampah Mahasiswa - Bank Sampah - Unit	11,15101
93	[SIPSN] Operasionalisasi Sejahtera Asri - Bank Sampah - Unit	0,8633677
94	[SIPSN] Operasionalisasi Rosella Siantan - Bank Sampah - Unit	1,5793968
95	[SIPSN] Operasionalisasi Melati - Bank Sampah - Unit	0,6576328
96	[SIPSN] Operasionalisasi DLH - Bank Sampah - Unit	7,486413
97	[SIPSN] Operasionalisasi Laily Raya - Bank Sampah - Unit	1,1975745
98	[SIPSN] Operasionalisasi Nilam 7 - Bank Sampah - Unit	0,7483718
99	[SIPSN] Operasionalisasi Palem Asri - Bank Sampah - Unit	11,7888775
100	[SIPSN] Operasionalisasi Rumput Hias - Bank Sampah - Unit	8,445012
101	[SIPSN] Operasionalisasi Slamet Sejahtera - Bank Sampah - Unit	1,1436702
102	[SIPSN] Operasionalisasi Beting Permai - Bank Sampah - Unit	2,2406232
103	[SIPSN] Operasionalisasi Ananda - Bank Sampah - Unit	5,255672

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)
104	[SIPSN] Operasionalisasi Dansen Sejahtera - Bank Sampah - Unit	8,749571
105	[SIPSN] Operasionalisasi Rosella Purnama - Bank Sampah - Unit	4,349181
106	[SIPSN] Operasionalisasi Kampung Caping - Bank Sampah - Unit	1,8219664
107	[SIPSN] Operasionalisasi Borneo - Bank Sampah - Unit	2,2612867

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025**Gambar 2. 41 Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor****2) Aksi Adaptasi Perubahan Iklim**

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Kota Pontianak tahun 2025 dilakukan melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di beberapa lokasi, yaitu di Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Utara. Kegiatan ini tersebar pada lima lokasi dengan cakupan luas yang bervariasi, mulai dari 5 Ha hingga 100 Ha. Program tersebut menunjukkan adanya upaya adaptasi berbasis wilayah dan masyarakat sebagai bagian dari penguatan ketahanan lingkungan yang difokuskan pada peningkatan ketahanan lingkungan terhadap perubahan kondisi iklim.

Tabel 2. 52 Aksi Adaptasi Perubahan Iklim

No	Tahun	Aksi Adaptasi	Keterangan Aksi (Luas)
1	2025	Program Kampung Iklim (ProKlim) RW 21 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	10,6 Ha
2		Program Kampung Iklim (ProKlim) RW 10, Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak	5 Ha

BUKU II – LAPORAN UTAMA**DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)****KOTA PONTIANAK TAHUN 2026**

No	Tahun	Aksi Adaptasi	Keterangan Aksi (Luas)
		Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	
3		Program Kampung Iklim (ProKlim) RW 27, Kampung Tangguh Penggerak Kesadaran Lingkungan, Kelurahan Siantan Hulu, kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	8,7 Ha
4		Program Kampung Iklim (ProKlim) RW 33 Kampung Gambut Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat	100 Ha
5		Program Kampung Iklim (ProKlim) RW 15 Kampung Tenun Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat	15,75 Ha

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025



Gambar 2. 42 Penyerahan Penghargaan Proklim

3) Realisasi Kegiatan Penghijauan Kota Pontianak

Peningkatan ruang terbuka hijau dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas serapan karbon dan memperbaiki kualitas lingkungan dalam mitigasi perubahan iklim yang terjadi di Kota Pontianak.

Tabel 2. 53 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi Kota Pontianak

No	Lokasi Penanaman	Penghijauan			
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (Batang)
1	Jl. dr. Soedarso	1	0,4	89	89 (Ketapang Kencana Variegata)
2	Jl. Median Ahmad Yani	2	1,11	500	500 (Tekoma)
3	Jl. Median Paralel Sungai Jawi	0,55	0,19	500	500 (Tekoma)
4	Jl. Median Husein Hamzah	1	0,5	170	170 (Tekoma)
5	Jl. Ampera	1	0,29	50	50 (Tekoma)

Sumber: Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025

4) Peningkatan Capaian RTH di Kota Pontianak

Penentuan klasifikasi RTH merujuk pada Permen ATR/BPN RI No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dimana capaian RTH Kota Pontianak Tahun 2025 adalah 31.35% yang artinya telah melebihi target.

Tabel 2. 54 Capaian RTH Kota Pontianak

NO.	KLASIFIKASI	LUAS (Ha)
A	RTH Publik	2523,960018
1	Rimba Kota	208,7120432
2	Taman Kota	979,378256
3	Taman Kecamatan	9,468561907
4	Taman Kelurahan	65,20723956
5	Taman RW	2,702573896
6	Taman RT	4,869328166
7	Pemukaman	95,14020151
8	Sempadan Badan Air	96,49642623
9	Tubuh Air	641,0195
10	Lapangan Olahraga	33,1639751
11	Lindung Gambut	387,8019122
B	RTH Privat	1182,1
C	TOTAL LUAS RTH (A+B)	3706,060018
D	LUAS KOTA	11821
E	PERSENTASE (%)	31,35149326
F	TARGET CAPAIAN 2025 (%)	31,33

Sumber: (1) Dinas PUPR Kota Pontianak; dan (2) DLH Kota Pontianak, 2025

2.8 Risiko Bencana

Kota Pontianak memiliki kerentanan terhadap bencana yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, hidrologi, dan perkembangan wilayah perkotaan. Karakteristik wilayah dataran rendah serta keberadaan Sungai Kapuas dan Sungai Landak menyebabkan kota ini rentan terhadap banjir dan genangan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko bencana menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kota.

A. Driving Force

Faktor pendorong risiko bencana di Kota Pontianak berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan penggunaan lahan. Peningkatan aktivitas pembangunan menyebabkan bertambahnya kawasan terbangun yang mengurangi fungsi resapan air. Selain itu, perkembangan wilayah di sekitar sungai juga meningkatkan eksposur terhadap potensi bencana.

- 1) Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Kepadatan Pemukiman Hingga Sempadan Sungai

Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2025 tercatat mencapai 686.019 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 5.803 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2. 55 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Luas (km²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per Km²)
1	Pontianak Selatan	16,524	91.483	0,15	5.536
2	Pontianak Tenggara	16,127	49.189	0,03	3.050
3	Pontianak Timur	12,061	114.199	1,62	9.468
4	Pontianak Barat	16,383	152.877	0,87	9.331
5	Pontianak Kota	16,016	124.282	0,21	7.760
6	Pontianak Utara	41,097	153.989	1,54	3.747

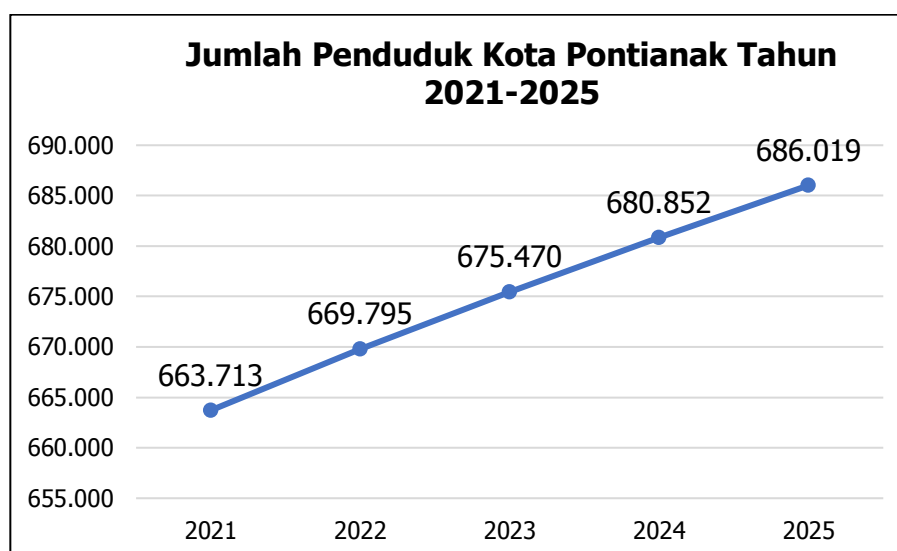
BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

No	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
	Kota Pontianak	118,209	686.019	0,86	5.803

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026



Gambar 2. 43 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2021-2025

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2026

Dengan jumlah penduduk mencapai 686.019 jiwa dan tingkat kepadatan sebesar 5.803 jiwa/km², tekanan terhadap daya dukung lingkungan di Kota Pontianak semakin meningkat. Keterbatasan lahan di pusat kota mendorong ekspansi permukiman ke wilayah pinggiran, termasuk kawasan sempadan Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem di area tersebut.

2) Perubahan Penggunaan Lahan Sebabkan Berkurangnya Area Resapan Tanah

Perubahan penggunaan lahan di Kota Pontianak pada **Tabel 2.54** menunjukkan bahwa ruang terbuka dan lahan vegetatif terus mengalami tekanan akibat perluasan kawasan terbangun. Kondisi

tersebut menyebabkan berkurangnya daya serap tanah terhadap air hujan. Peningkatan aktivitas pembangunan menyebabkan perubahan kondisi hidrologi yang mempengaruhi sistem aliran air.

Tabel 2. 56 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

Kota	Luas Lahan Kering Campur Semak (Ha)	Luas Lahan Terbuka (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Pemukiman (Ha)	Luas Tubuh Air (Ha)
Kota Pontianak	0,02	145,03	1.181,10	2.345,46	7.487,82	662,07

Sumber: BPKH Wilayah III Kota Pontianak, 2026

B. Pressure

Tekanan terhadap risiko bencana di Kota Pontianak ditunjukkan oleh kondisi lingkungan yang semakin rentan terhadap genangan dan banjir. Sistem drainase yang terbatas serta meningkatnya limpasan permukaan menjadi faktor utama tekanan. Selain itu, perubahan kondisi lingkungan juga mempengaruhi kapasitas alami dalam menahan air.

1) Perkembangan Pemukiman Hingga Sempadan Sungai Meningkatkan Kerentanan Terhadap Genangan Air/Banjir

Perkembangan kawasan permukiman di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Landak meningkatkan tingkat kerentanan terhadap banjir. Secara geografis, Kota Pontianak berada di muara Sungai Kapuas dengan ketinggian wilayah yang relatif rendah, yakni antara 0,10 hingga 1,5 mdpl, sehingga sangat rentan terhadap intrusi pasang air laut, terutama pada fase bulan baru dan purnama. Kerentanan ini semakin meningkat akibat tingginya curah hujan serta angin kencang yang turut memperbesar debit dan muka air sungai (BPS Kalbar, 2025).

2) Perubahan Iklim Sebabkan Kenaikan Muka Air Laut dan Perubahan Pola Curah Hujan

Dampak perubahan iklim di Kota Pontianak ditandai dengan kenaikan permukaan air laut dan pola curah hujan yang semakin ekstrem akibat perubahan iklim meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir rob dan banjir bandang. Selain itu, frekuensi dan tingkat keparahan cuaca ekstrem, seperti angin puting beliung, juga semakin meningkat sehingga memperbesar ancaman bencana di Kota Pontianak.

C. State

Kondisi risiko bencana di Kota Pontianak dapat dilihat melalui nilai Indeks Risiko Bencana (IRB). Nilai ini memberikan gambaran tingkat kerentanan wilayah terhadap berbagai jenis bencana. Selain itu, kondisi lingkungan perkotaan juga menunjukkan adanya wilayah yang rentan terhadap bencana lainnya.

1) Indeks Resiko Bencana Kota Pontianak

Tabel 2.55 menunjukkan tingkat kerentanan Kota Pontianak terhadap bencana karhutla, banjir (genangan), dan cuaca ekstrim (angin kencang), memiliki nilai Indeks Risiko Bencana sebesar 50,09 dengan kategori sedang. Nilai indeks pada kategori sedang mengindikasikan bahwa potensi kejadian bencana masih cukup signifikan dan dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan apabila tidak diantisipasi melalui langkah pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.

Tabel 2. 57 Indeks Resiko Bencana Kota Pontianak

No	Jenis Bencana	Nilai Indeks Risiko	Kategori
1	Karhutla	50,09	Sedang
2	Banjir (Genangan)		
3	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)		

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, 2025

2) Kondisi Kebencanaan di Kota Pontianak

Kondisi kebencanaan di Kota Pontianak tahun 2025 menunjukkan 109 kejadian dengan 451 korban terdampak. Jenis bencana dengan jumlah kejadian tertinggi adalah kebakaran permukiman sebanyak 41 kejadian, sekaligus menjadi bencana dengan dampak korban terbesar, yaitu 284 orang. Sementara itu, cuaca ekstrim (angin kencang) tercatat 36 kejadian dengan 160 korban, dan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 29 kejadian tanpa korban terdampak pada data yang tercatat. Berdasarkan wilayah, kejadian terbanyak berada di Pontianak Utara sebanyak 32 kejadian, disusul Pontianak Tenggara 28 kejadian, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi kebencanaan di Pontianak masih didominasi oleh kejadian kebakaran permukiman dan cuaca ekstrim yang berulang serta berdampak langsung pada masyarakat.

Tabel 2. 58 Kejadian Bencana di Kota Pontianak

Kecamatan	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Jumlah Korban
Pontianak Barat	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	1	7
	Kebakaran Permukiman	8	46
Pontianak Kota	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	1	9
	Kebakaran Permukiman	12	43
	Lainnya	1	0
Pontianak Selatan	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	2	0
	Kebakaran Hutan dan Lahan	6	0
Pontianak Tenggara	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	6	13
	Kebakaran Hutan dan Lahan	17	0
	Kebakaran Permukiman	4	34
	Lainnya	1	6
Pontianak Timur	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	9	46
	Kebakaran Permukiman	8	98
	Lainnya	1	1
Pontianak Utara	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	17	85
	Kebakaran Hutan dan Lahan	6	0
	Kebakaran Permukiman	9	63
Total		109	451

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, 2025

D. Impact

Dampak risiko bencana di Kota Pontianak terutama berupa kerugian ekonomi dan gangguan aktivitas masyarakat. Kejadian banjir dan genangan dapat mengganggu mobilitas serta aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan. Selain itu, dampak juga dirasakan pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

- 1) Kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, serta letak geografis Kota Pontianak yang didominasi dataran rendah dan dikelilingi aliran sungai meningkatkan kerentanan terhadap banjir dan angin puting beliung.
- 2) Kejadian karhutla di Kota Pontianak tahun 2025 mengalami peningkatan pada Juli–Agustus. Kebakaran terjadi pada lahan semak dan gambut, serta di beberapa lokasi mendekati permukiman, sehingga menimbulkan asap yang mempengaruhi kualitas udara.
- 3) Pada Juli 2025, kualitas udara di Pontianak menurun akibat kabut asap karhutla dan nilai ISPU berada pada kategori tidak sehat. Meskipun tidak terjadi peningkatan kasus ISPA, namun dampak karhutla menyebabkan penurunan kualitas udara yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat.
- 4) Bencana banjir rob di Kota Pontianak pada Desember 2025 menimbulkan dampak berupa terendamnya permukiman di kawasan pesisir, dataran rendah, dan tepian sungai, serta mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Banjir rob juga menyebabkan gangguan lalu lintas pada ruas-ruas jalan terdampak, menghambat mobilitas warga dan aktivitas perkotaan secara umum.
- 5) Cuaca ekstrem yang terjadi di Pontianak tahun 2025 menimbulkan dampak berupa kerusakan rumah warga, pohon tumbang, dan gangguan pada kawasan permukiman, terutama akibat angin

puting beliung dan angin kencang. Selain itu, bencana ini juga berdampak pada sektor pertanian, yaitu merusak lahan hortikultura dan memengaruhi ratusan petani di Pontianak Utara. Kondisi tersebut menunjukkan juga mengganggu aktivitas masyarakat dan mata pencaharian warga.

- 6) Rangkaian bencana yang terjadi menimbulkan konsekuensi berupa kerugian ekonomi, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerusakan lingkungan.

E. Response

Upaya pengurangan risiko bencana di Kota Pontianak dilakukan melalui peningkatan sistem drainase dan pengelolaan tata ruang berbasis risiko. Pemerintah daerah juga mengembangkan program pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi bencana.

- 1) Upaya mitigasi bencana perlu ditingkatkan mengingat tingginya jumlah penduduk Kota Pontianak yang rentan terhadap ancaman banjir dan angin puting beliung.
- 2) Melakukan pendataan serta pemetaan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana, seperti daerah rawan banjir dan kebakaran lahan.
- 3) Penataan tata ruang kota perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek kebencanaan, misalnya dengan membatasi pembangunan di area yang berisiko tinggi.
- 4) Pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase secara rutin menjadi langkah penting dalam menekan risiko banjir, termasuk kegiatan normalisasi sungai dan saluran air.
- 5) Peningkatan peran serta, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana di Kota Pontianak menjadi hal yang sangat penting.

- 6) Pembentukan tim khusus pemadam kebakaran diperlukan untuk memperkuat respons cepat terhadap potensi kebakaran.
- 7) Pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pembakaran lahan saat pembukaan lahan perlu dilakukan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Analisis pada 8 (delapan) matra lingkungan hidup menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan Kota Pontianak memberikan tekanan yang signifikan terhadap sistem lingkungan perkotaan. Tingginya kepadatan penduduk dan aktivitas perkotaan menyebabkan peningkatan timbunan sampah yang berfluktuasi, sementara tekanan terhadap kualitas perairan semakin meningkat seiring bertambahnya aktivitas domestik dan ekonomi. Di sisi lain, perubahan penggunaan lahan yang semakin intensif turut mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka dan fungsi ekologis lingkungan, yang kemudian diperkuat oleh peningkatan intensitas curah hujan pada wilayah dataran rendah yang memicu terjadinya genangan sementara di beberapa bagian kota. Keterkaitan antar matra menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan yang terjadi bersifat saling mempengaruhi dan membentuk dampak yang kompleks, termasuk pada kualitas udara dan kenyamanan lingkungan perkotaan.

Kondisi ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan secara terpadu, lintas sektor, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil analisis pada Bab II ini selanjutnya menjadi bagian dalam proses perumusan isu prioritas lingkungan hidup Kota Pontianak Tahun 2026 yang akan diuraikan lebih lanjut pada Bab III beserta arah kebijakan dan rencana penanganannya. Proses tersebut juga dilengkapi dengan penilaian berbasis skoring terhadap berbagai isu strategis lingkungan hidup yang berkembang di Kota Pontianak, sehingga menghasilkan prioritas yang lebih terukur dan mencerminkan kondisi aktual wilayah

BAB III

ISU PRIORITAS, RESPON, DAN INOVASI

3.1 Penetapan Isu Prioritas dan Rencana Penyelesaian

3.1.1 Proses Perumusan Isu Prioritas

Kota Pontianak sebagai wilayah perkotaan yang terus berkembang menghadapi peningkatan tekanan terhadap lingkungan hidup yang bersumber dari aktivitas domestik, pertumbuhan penduduk, serta perkembangan kegiatan ekonomi dan pembangunan. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perubahan pada kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan meningkatnya permasalahan lingkungan yang saling berkaitan dan berpotensi memengaruhi keberlanjutan pembangunan daerah.

Isu lingkungan hidup pada dasarnya merupakan representasi perubahan kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, baik dalam bentuk penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya fungsi ekologis, maupun meningkatnya risiko terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi isu lingkungan tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi eksisting, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih terarah.

Perumusan isu prioritas dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis kondisi lingkungan hidup daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, dengan menggunakan pendekatan *Driving Force, Pressure, State, Impact*, dan *Response* (DPSIR). Pendekatan ini digunakan untuk memahami keterkaitan antara faktor pendorong pembangunan, tekanan terhadap lingkungan, kondisi lingkungan eksisting, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan ekosistem. Dalam proses perumusan, dilakukan eksplorasi terhadap berbagai komponen lingkungan dengan menelusuri tekanan (*pressure*) yang timbul akibat aktivitas pembangunan,

kondisi lingkungan (*state*), serta dampak (*impact*) yang terjadi. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan (*root cause*) serta potensi dampak lanjutan yang bersifat sistemik (*cascading impact*). Pendekatan ini diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu menyasar sumber permasalahan secara lebih efektif.

Hasil eksplorasi tersebut kemudian dipadukan dengan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta karakteristik ekologis wilayah Kota Pontianak. Integrasi berbagai kajian tersebut memberikan dasar yang kuat dalam merumuskan isu lingkungan yang tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga strategis dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan perencanaan lingkungan hidup yang berbasis data dan analisis terpadu, sehingga isu yang dirumuskan benar-benar mencerminkan permasalahan utama yang perlu mendapatkan intervensi kebijakan secara prioritas.

3.1.2 Penyaringan dan Penilaian Isu Prioritas

Isu-isu lingkungan hidup yang telah diidentifikasi selanjutnya dilakukan proses penyaringan untuk menentukan isu dengan tingkat prioritas tertinggi. Proses ini dilakukan melalui mekanisme penilaian berbasis skoring yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, baik dari unsur perangkat daerah, akademisi, maupun pihak lainnya melalui forum diskusi dan rapat koordinasi. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama, antara lain:

1. Tingkat urgensi penanganan;
2. Tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan;
3. Kecenderungan perkembangan permasalahan;
4. Kompleksitas penanganan; dan
5. Luasnya cakupan dampak terhadap masyarakat dan wilayah.

Melalui proses skoring tersebut, setiap isu diberikan bobot penilaian sehingga dapat diidentifikasi isu-isu yang memiliki tingkat prioritas paling tinggi. Hasil penilaian ini menjadi dasar dalam menentukan fokus intervensi kebijakan, khususnya dalam mengalokasikan sumber daya, menetapkan program prioritas, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, proses penyaringan tidak hanya berfungsi sebagai tahapan seleksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penetapan isu prioritas serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil berbasis pada pertimbangan yang objektif dan terukur.

3.1.3 Penetapan Isu Prioritas

Berdasarkan hasil perumusan dan penilaian yang telah dilakukan, ditetapkan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah perkotaan;
2. Penurunan kualitas air permukaan; dan
3. Genangan air perkotaan.

Isu-isu tersebut mencerminkan permasalahan utama yang memiliki keterkaitan erat dengan tekanan pembangunan perkotaan, kondisi lingkungan eksisting, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, isu-isu tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang serta efek kumulatif apabila tidak dilakukan penanganan secara tepat. Isu prioritas yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup daerah yang dilaksanakan secara terintegrasi. Berikut diuraikan alasan penetapan isu prioritas lingkungan hidup di Kota Pontianak.

Pengelolaan Sampah Perkotaan

Pengelolaan sampah perkotaan di Kota Pontianak masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi berdampak pada meningkatnya timbulan sampah setiap tahunnya. Di sisi lain, kapasitas pelayanan persampahan, baik dari aspek pengumpulan, pengangkutan, maupun pengolahan belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju peningkatan tersebut. Sistem pengelolaan sampah yang masih didominasi oleh pendekatan kumpul-angkut-timbun menyebabkan beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) semakin meningkat. Selain itu, rendahnya tingkat pemilahan sampah di sumber serta keterbatasan fasilitas pengolahan turut memperburuk kondisi pengelolaan sampah. Dampak yang ditimbulkan antara lain pencemaran lingkungan, penurunan kualitas estetika kota, serta potensi gangguan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui pengurangan di sumber, peningkatan fasilitas pengolahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Penurunan Kualitas Air Permukaan

Kualitas air permukaan di Kota Pontianak menunjukkan kecenderungan penurunan akibat meningkatnya beban pencemar dari berbagai aktivitas. Keberadaan badan air memiliki peran strategis sebagai sumber air baku, sarana transportasi, serta penunjang kehidupan masyarakat. Namun demikian, tekanan terhadap kualitas air semakin meningkat akibat pembuangan limbah domestik, aktivitas permukiman di bantaran sungai, serta kegiatan usaha yang belum sepenuhnya memenuhi baku mutu lingkungan. Hal ini tercermin dari meningkatnya parameter pencemar seperti BOD, COD, dan TSS. Penurunan kualitas air ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, terganggunya ekosistem perairan, serta menurunnya daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan air limbah serta peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar.

Genangan Air Perkotaan

Genangan air perkotaan merupakan salah satu isu lingkungan yang masih sering terjadi di Kota Pontianak. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang berada pada dataran rendah serta adanya pengaruh pasang surut air sungai. Selain itu, tingginya intensitas curah hujan dan terbatasnya kapasitas sistem drainase perkotaan turut memperparah terjadinya genangan. Perkembangan kawasan terbangun yang tidak diimbangi dengan penyediaan sistem drainase yang memadai serta berkurangnya area resapan air menyebabkan air hujan tidak dapat teralirkan secara optimal. Dampak dari genangan ini antara lain terganggunya aktivitas masyarakat, kerusakan infrastruktur, serta meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sistem drainase yang terintegrasi, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penerapan konsep pengelolaan air berbasis lingkungan.

3.1.4 Rencana Penyelesaian (Respon) Isu Prioritas

Sebagai tindak lanjut dari penetapan isu prioritas, disusun rencana penyelesaian atau respon terhadap masing-masing isu yang telah ditetapkan. Rencana penyelesaian ini dirancang dengan mempertimbangkan keterkaitan antara penyebab permasalahan, kondisi lingkungan, serta dampak yang ditimbulkan. Perumusan respon dilakukan dengan pendekatan yang terukur dan sistematis dengan memperhatikan kejelasan tujuan, keterukuran capaian, keterlaksanaan program, serta relevansi terhadap permasalahan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif serta memberikan hasil yang nyata.

Rencana penyelesaian diarahkan pada upaya pengurangan tekanan terhadap lingkungan, pemulihan kondisi lingkungan yang terdampak, serta pencegahan dampak lanjutan melalui pendekatan preventif dan adaptif. Selain itu, respon yang dirumuskan juga mencakup penguatan kapasitas

kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup, serta optimalisasi peran serta masyarakat dan pelaku usaha.

Penanganan isu prioritas memerlukan pendekatan yang terintegrasi, lintas sektor, serta berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, rencana penyelesaian yang disusun diharapkan mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif sekaligus memperjelas arah kebijakan yang akan ditempuh, masing-masing isu prioritas diuraikan lebih lanjut berdasarkan kondisi eksisting, faktor penyebab utama, dampak yang ditimbulkan, serta rencana penyelesaian yang disesuaikan dengan karakteristik permasalahan.

3.1.5 Pengelolaan Sampah Perkotaan

a. Gambaran Kondisi Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPNS), jumlah timbulan sampah di Kota Pontianak Tahun 2025 sebesar ± 480 Ton/Hari, sementara yang dibuang ke TPA Batu Layang sekitar ± 369 ton/hari. Sampah yang dihasilkan didominasi sampah organik dan diikuti oleh sampah plastik, kertas dan sisanya terdiri dari logam, kaca, serta sampah lainnya. Berdasarkan data yang tersedia, jenis sampah yang paling banyak ditemukan di Kota Pontianak adalah sampah organik seperti sisa makanan, kayu, ranting, daun, serta kertas dan karton. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, karet, logam, dan kaca jumlahnya memang lebih sedikit, namun menimbulkan dampak lingkungan yang lebih serius karena sulit terurai dan mencemari lingkungan.

Sistem pengelolaan sampah di Kota Pontianak saat ini masih mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Layang. Berdasarkan arahan Kementerian Lingkungan Hidup, TPA Batu Layang masih dikategorikan menggunakan sistem *open dumping* karena pola pengelolaan

yang diterapkan masih berupa kumpul–angkut–timbun. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seperti bau, pencemaran air tanah, serta emisi gas metana. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah menargetkan penghentian praktik *open dumping* dan peningkatan sistem pengelolaan menjadi *sanitary landfill*. Hal ini juga ditegaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bahwa mulai tahun 2030 tidak diperkenankan lagi penggunaan TPA dengan sistem *open dumping*, sehingga pengelolaan sampah harus beralih ke sistem yang lebih terintegrasi. Dalam hal ini, Kota Pontianak merencanakan peningkatan sistem TPA Batu Layang menjadi *sanitary landfill* yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2029.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kota Pontianak juga melakukan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul–angkut–timbun menjadi kurangi–kumpul–angkut–olah. Penerapan pola ini menekankan pentingnya pengurangan sampah dari sumber serta pengolahan sebelum sampah masuk ke TPA, termasuk melalui optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R). Dalam mendukung implementasi tersebut, Kota Pontianak telah memiliki sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan. Terdapat sebanyak 90 kontainer pada 38 titik TPS yang berfungsi sebagai titik pengumpulan sampah sebelum diangkut ke fasilitas pengolahan. Sampah dari TPS selanjutnya didistribusikan ke berbagai fasilitas pengelolaan, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), TPS 3R, Pusat Daur Ulang (PDU), rumah kompos, bank sampah, peternakan maggot, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Peningkatan pengelolaan TPA Batu Layang juga didukung melalui kerja sama dengan Bank Dunia dalam program *Local Service Delivery Improvement Project (LSDP)*, yang mencakup peningkatan fasilitas TPA selama periode 2027 hingga 2029. Dalam rencana pengembangannya, TPA

Batu Layang akan dioperasikan sebagai TPST pada tahun 2029–2030, dengan penerapan sistem TPST, TPA lama akan diratakan dan ditutup menggunakan sel berlapis *geo membrane*. Setiap sel dirancang dengan kapasitas tertentu dan secara bertahap akan dilengkapi dengan sistem penangkapan gas metana, dengan target penangkapan gas mencapai sekitar 25% yang diharapkan dapat mengurangi potensi emisi gas rumah kaca dari aktivitas TPA.

Adapun rencana tindak lanjut dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak meliputi pengurangan sampah dari sumber, peningkatan kapasitas pengolahan melalui TPS3R, serta optimalisasi sarana dan prasarana pengelolaan yang telah tersedia. Hingga saat ini, fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah telah berkembang, meskipun masih terdapat kebutuhan peningkatan efektivitas operasional di lapangan.

b. Tekanan dan Permasalahan Utama

Pengelolaan sampah di Kota Pontianak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang seiring dengan dinamika pertumbuhan kota. Faktor-faktor ini pada dasarnya merupakan bagian dari proses perkembangan wilayah perkotaan yang perlu diantisipasi melalui pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu faktor utama adalah peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan bertambahnya aktivitas sosial dan ekonomi. Kondisi ini secara alami mendorong peningkatan timbulan sampah, sehingga memerlukan kapasitas layanan pengelolaan sampah yang semakin memadai. Pertumbuhan penduduk ini sekaligus menjadi peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.

Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi karakteristik dan volume sampah. Meningkatnya penggunaan produk kemasan, terutama yang berbahan non-organik, menyebabkan jenis sampah yang dihasilkan menjadi lebih beragam dan

memerlukan penanganan yang lebih spesifik. Kondisi ini mendorong pentingnya penerapan prinsip pengurangan sampah, seperti penggunaan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*), dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang perlu terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan kota. Ketersediaan tempat penampungan sementara, sistem pengangkutan, serta fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir menjadi elemen penting dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang efektif. Optimalisasi dan peningkatan infrastruktur ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan persampahan.

Di samping itu, aspek kelembagaan dan kesadaran masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah di sumber masih perlu terus didorong melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

c. Dampak Yang Ditimbulkan

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pontianak masih menjadi salah satu isu penting yang berdampak terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta tingkat kenyamanan lingkungan perkotaan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan, volume timbulan sampah cenderung meningkat, sementara sistem pengelolaan yang belum optimal berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif.

Dari aspek kualitas lingkungan, pengelolaan sampah yang belum memadai dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Penumpukan sampah di berbagai lokasi, baik di tempat penampungan sementara maupun di lingkungan permukiman berpotensi menghasilkan lindi (*leachate*) yang dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari air permukaan maupun air tanah. Selain itu, sampah yang tidak tertangani

dengan baik, terutama yang dibuang ke badan air, dapat menurunkan kualitas air sungai serta mengganggu fungsi ekologis perairan.

Dari sisi udara, timbulan sampah organik yang membusuk dapat menghasilkan gas seperti metana dan senyawa berbau tidak sedap yang menurunkan kualitas udara ambien. Dalam beberapa kasus, praktik pembakaran sampah secara terbuka juga masih terjadi yang dapat menghasilkan emisi polutan berbahaya dan berkontribusi terhadap pencemaran udara serta gangguan kesehatan.

Dari aspek kesehatan masyarakat, pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menjadi media berkembangnya vektor penyakit, seperti lalat, tikus, dan nyamuk. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, demam berdarah, dan penyakit infeksi lainnya. Selain itu, paparan langsung terhadap sampah, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi penumpukan sampah atau pekerja informal di sektor persampahan, dapat menimbulkan gangguan kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sementara itu, dari perspektif kenyamanan dan estetika kota, keberadaan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menurunkan kualitas visual lingkungan perkotaan. Penumpukan sampah di ruang publik, drainase, dan bantaran sungai menciptakan kesan kumuh serta mengurangi daya tarik kota. Selain itu, penyumbatan saluran drainase akibat sampah juga berpotensi menyebabkan genangan atau banjir yang semakin menurunkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat.

Permasalahan pengelolaan sampah juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Menurunnya kualitas lingkungan dapat mempengaruhi nilai kawasan serta meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan dampak, seperti pembersihan lingkungan, pengendalian penyakit, dan pengolahan air. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang tidak optimal tidak hanya berdampak secara ekologis, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

d. Rencana Penyelesaian

Untuk mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, serangkaian kegiatan strategis telah dirancang untuk dilaksanakan pada tahun 2025–2026. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan infrastruktur pengolahan sampah, penguatan regulasi, edukasi dan partisipasi masyarakat, hingga penerapan teknologi inovatif dalam pengelolaan sampah. Setiap tahapan kegiatan disusun secara sistematis guna memastikan implementasi yang terarah dan berdampak nyata terhadap pengurangan timbulan sampah serta peningkatan tingkat daur ulang di berbagai sektor. Rencana ini juga mencakup kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal, guna memastikan bahwa pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Pontianak, pemerintah berencana untuk menerbitkan kebijakan baru yang mencakup:

1. Pembagian Zonasi Pengelolaan Sampah – Mengatur zonasi pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat RT/RW
2. Kebijakan Insentif bagi Pelaku Pengelolaan Sampah – Memberikan insentif berupa pengurangan biaya retribusi kebersihan dan/atau pemberian penghargaan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pengelolaan sampah
3. Implementasi Teknologi Waste-to-Energy – Mendorong pengolahan sampah menjadi energi terbarukan
4. Perluasan Larangan Plastik Sekali Pakai – Meliputi pasar tradisional dan industri makanan
5. Peningkatan Keterlibatan Swasta – Mewajibkan peran aktif produsen dalam pengelolaan sampah dan/ limbah produk mereka

Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, pemerintah Kota Pontianak menargetkan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah TPS3R dari 2 unit menjadi 3 unit pada Tahun 2026 untuk memperkuat pengolahan sampah berbasis komunitas (masyarakat)
2. Penambahan dan peningkatan Bank Sampah (masyarakat dan sekolah), dengan target mencapai 30 unit aktif di berbagai kelurahan
3. Pengadaan sistem pemilahan sampah dari sumbernya, termasuk instalasi tempat sampah terpisah di area publik dan pasar tradisional
4. Pengembangan fasilitas pengolahan sampah organik, termasuk komposter skala kota dan pengolahan limbah menjadi energi alternatif
5. Perkiraan pengurangan timbulan sampah Tahun 2026: 30% sampah tertangani dengan sistem daur ulang dan pemanfaatan energi

3.1.6 Penurunan Kualitas Air Permukaan

a. Gambaran Kondisi Kualitas Air Permukaan

Kondisi kualitas air permukaan di Kota Pontianak secara umum dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang didominasi oleh jaringan sungai, terutama Sungai Kapuas dan Sungai Landak, serta anak-anak sungainya. Sebagai kota yang berkembang di kawasan dataran rendah dengan sistem hidrologi yang kompleks, kualitas air permukaan sangat dipengaruhi oleh aktivitas alami maupun kegiatan antropogenik di wilayah hulu hingga hilir. Berikut disajikan nilai indeks kualitas air Kota Pontianak yang mana indeks tersebut cenderung mengalami kenaikan pada setiap tahunnya.

Tabel 3. 1 Indeks Kualitas Air

No	Tahun	IKA	Kategori
1	2021	56,05	Sedang
2	2022	59,84	Sedang
3	2023	51,4	Sedang

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

No	Tahun	IKA	Kategori
4	2024	54,91	Sedang
5	2025	72,67	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2025

catatan: terjadi perubahan rumus di tahun 2025

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kota Pontianak masih berada pada tingkat yang perlu mendapat perhatian, karena belum menunjukkan kondisi yang baik secara konsisten sehingga upaya pengendalian dan pengelolaan kualitas air tetap perlu diperkuat. Kualitas air permukaan di Kota Pontianak menunjukkan adanya tekanan akibat aktivitas perkotaan, seperti permukiman, perdagangan, jasa, serta kegiatan domestik lainnya. Pembuangan air limbah domestik yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas air, terutama pada kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan akses sanitasi yang terbatas.

Selain itu, keberadaan aktivitas ekonomi seperti, rumah makan serta kegiatan usaha kecil dan menengah di sepanjang bantaran sungai juga berpotensi menambah beban pencemar ke badan air. Limbah yang dihasilkan baik berupa bahan organik maupun anorganik dapat meningkatkan kandungan zat pencemar dan mempengaruhi parameter kualitas air seperti kekeruhan, kandungan bahan organik, serta kadar nutrisi.

Dari aspek fisik, kondisi air permukaan di Kota Pontianak umumnya dipengaruhi oleh tingginya kandungan sedimen yang terbawa aliran sungai, terutama pada saat curah hujan tinggi. Hal ini menyebabkan tingkat kekeruhan air relatif tinggi yang dapat mempengaruhi estetika serta pemanfaatan air untuk kebutuhan tertentu. Dari aspek kimia, kualitas air permukaan menunjukkan adanya indikasi peningkatan kandungan bahan organik dan nutrisi yang berasal dari aktivitas domestik dan limpasan permukaan. Kondisi ini berpotensi memicu proses eutrofikasi pada badan

air tertentu yang ditandai dengan pertumbuhan alga atau tanaman air secara berlebihan. Dari aspek biologis, kualitas air permukaan di beberapa lokasi menunjukkan adanya potensi kontaminasi mikroorganisme yang umumnya berasal dari limbah domestik. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat pemanfaatan air sungai oleh masyarakat masih cukup tinggi, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun aktivitas ekonomi tertentu.

b. Tekanan dan Sumber Pencemar Utama

Penurunan kualitas air permukaan disebabkan oleh masuknya limbah domestik maupun limbah industri ke dalam badan air. Secara umum, sumber pencemaran air di Kota Pontianak dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber langsung dan tidak langsung. Sumber tidak langsung berasal dari polutan yang masuk ke badan air melalui media seperti tanah, air tanah, atau hujan asam. Sedangkan sumber langsung berasal dari aktivitas manusia yang membuang limbah atau bahan ke badan air secara langsung, sehingga menurunkan kualitas air tersebut. Beberapa penyebab utama pencemaran air meliputi:

- a. Limbah rumah tangga/domestik, limbah yang berasal dari aktivitas sehari-hari di perkantoran, rumah, pasar, sekolah, rumah makan, rumah sakit, dan tempat lainnya.
- b. Limbah industri pabrik, limbah yang berasal dari aktivitas industri dan sering dibuang langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu sehingga menyebabkan pencemaran.
- c. Sampah yang dibuang sembarangan, kebiasaan membuang sampah secara sembarangan ke sungai atau saluran drainase turut menyumbang pencemaran air.
- d. Limbah dari aktivitas pertanian, limbah yang berasal dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida oleh petani dalam usaha pemeliharaan tanaman.

c. Dampak Terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Pencemaran air permukaan di Kota Pontianak memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem perairan serta kesehatan masyarakat. Sebagai kota yang sangat bergantung pada sistem sungai, khususnya Sungai Kapuas dan Sungai Landak, penurunan kualitas air berpotensi mempengaruhi berbagai aspek lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dari aspek ekosistem, pencemaran air dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologi perairan. Masuknya bahan pencemar, terutama yang bersifat organik, dapat meningkatkan kebutuhan oksigen terlarut sehingga menurunkan kadar oksigen dalam air. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas habitat bagi biota perairan, seperti ikan dan organisme lainnya yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan populasi bahkan kematian biota tertentu.

Selain itu, peningkatan kandungan nutrisi dalam air akibat limbah domestik dan limpasan permukaan dapat memicu terjadinya eutrofikasi. Proses ini ditandai dengan pertumbuhan alga dan tumbuhan air secara berlebihan yang dapat mengganggu penetrasi cahaya matahari dan menurunkan kualitas habitat perairan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengubah struktur komunitas biota dan mengurangi keanekaragaman hayati di perairan.

Pencemaran air juga berpotensi menyebabkan akumulasi bahan berbahaya dalam rantai makanan (bioakumulasi), terutama jika terdapat kandungan logam berat atau senyawa kimia tertentu. Hal ini dapat berdampak tidak hanya pada organisme perairan, tetapi juga pada manusia yang mengonsumsi hasil perikanan dari perairan tersebut.

Dari sisi kesehatan masyarakat, pencemaran air menjadi salah satu faktor risiko utama terhadap timbulnya berbagai penyakit. Air yang terkontaminasi mikroorganisme patogen dapat menyebabkan penyakit berbasis air (*waterborne diseases*), seperti diare, disentri, dan infeksi

saluran pencernaan lainnya. Risiko ini menjadi lebih tinggi pada masyarakat yang masih memanfaatkan air sungai secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kandungan bahan kimia berbahaya dalam air, baik dari limbah domestik maupun aktivitas lainnya, berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang, seperti gangguan fungsi organ tubuh. Paparan terhadap air yang tercemar, baik melalui konsumsi maupun kontak langsung dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pencemaran air juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Menurunnya kualitas air dapat mengganggu aktivitas perikanan, meningkatkan biaya pengolahan air bersih, serta mengurangi kenyamanan lingkungan. Kondisi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang sangat bergantung pada sumber daya air.

d. Rencana Penyelesaian

Pengendalian pencemaran air di Kota Pontianak disusun sebagai upaya sistematis dan terpadu yang mengedepankan prinsip pencegahan, pengendalian, dan pemulihan kualitas lingkungan perairan. Kondisi kualitas air pada badan air, khususnya Sungai Kapuas menunjukkan adanya tekanan yang cukup signifikan akibat meningkatnya aktivitas domestik, permukiman, serta kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan limbah cair. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup pengendalian sumber pencemar, peningkatan infrastruktur pengelolaan air limbah, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Program yang akan terus dilakukan untuk pengendalian pencemaran air di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - a. Pemantauan kualitas air permukaan secara manual dan menggunakan alat pemantauan air (WQMS dan Onlimo) di 3 Lokasi (Intake PDAM, Sungai Jawi dan taman Alun Kapuas)
 - b. Kegiatan Jumat Bersih yaitu program bersih parit yang melibatkan OPD, Camat lurah, Komunitas Lingkungan, RW, RT Masyarakat dan pelaku usaha
 - c. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran melalui aplikasi SIPEKA (Sistema Pemantauan Kualitas Air) yang memuat data hasil pemantauan air
 - d. Pembinaan/Pengawasan Kegiatan Usaha
Melakukan kegiatan pemulihan lingkungan dengan pemasangan Biocord di Parit Primer untuk mengurangi beban pencemar
2. Program Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - a. Pendampingan gerakan peduli lingkungan, kampanye lingkungan melibatkan komunitas, OPD, Camat, Lurah, Dunia Pendidikan dan Usaha
 - b. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan lingkungan seperti masyarakat, pelaku usaha dan OPD
 - c. Penertiban dan penindakan kegiatan usaha
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan yang Dikeluarkan Daerah
 - a. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha terhadap pengelolaan lingkungan
 - b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dalam pengelolaan limbah cair
 - c. Penertiban dan penindakan kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan usaha dengan melibatkan aparaturnya terkait

4. Program peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pada bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemanusiaan
 - a. Mengadakan kegiatan Saka Kalpataru
 - b. Mengadakan kegiatan Duta Lingkungan Hidup
5. Memberikan sosialisasi atau kampanye keliling di sepanjang bantaran Sungai Kapuas
6. Program pengendalian sungai dan parit menjadi wajah kota dengan penataan *waterfront city* di sepanjang bantaran Sungai Kapuas
7. Pemasangan banner/spanduk/baliho untuk larangan membuang sampah di lahan kosong/saluran/parit/sungai
8. Melaksanakan program animas dan kotaku dalam pembangunan IPAL Komunal skala permukiman dan kawasan
9. Pembangunan SPALD-T di dua lokasi Nipah Kuning dan Martapura
10. Kegiatan normalisasi parit dan sungai yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.1.7 Genangan Air Perkotaan

a. Gambaran Kondisi Genangan Air

Genangan air di Kota Pontianak merupakan salah satu fenomena yang cukup sering terjadi dan menjadi bagian dari dinamika lingkungan perkotaan. Genangan di Kota Pontianak adalah kondisi tertahannya air hujan atau air limpasan pada permukaan tanah, jalan, atau kawasan permukiman dalam waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang didominasi oleh dataran rendah serta keberadaan sistem sungai yang kuat, termasuk Sungai Kapuas dan Sungai Landak beserta jaringan drainase alaminya. Secara umum, genangan air di Kota Pontianak terjadi terutama pada saat intensitas curah hujan tinggi yang menyebabkan peningkatan limpasan permukaan (*runoff*) di kawasan perkotaan. Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan daya tampung dan kapasitas sistem drainase di beberapa

wilayah, sehingga air hujan tidak dapat langsung teralirkan secara optimal ke badan air penerima.

Selain faktor curah hujan, kondisi genangan juga dipengaruhi oleh karakteristik topografi yang relatif datar, sehingga kecepatan aliran air menjadi rendah. Hal ini menyebabkan air cenderung tertahan pada area tertentu, terutama pada kawasan dengan elevasi rendah atau cekungan. Di beberapa lokasi, genangan dapat berlangsung dalam durasi tertentu sebelum surut secara alami atau melalui sistem drainase. Keberadaan pasang surut air sungai juga menjadi faktor penting dalam dinamika genangan di Kota Pontianak. Pada saat terjadi pasang, aliran air dari saluran drainase menuju sungai dapat terhambat, sehingga memperlambat proses pengaliran air hujan dan berpotensi meningkatkan luasan genangan. Di sisi lain, perkembangan kawasan terbangun turut mempengaruhi kondisi genangan. Peningkatan luas permukaan kedap air, seperti jalan dan bangunan dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, sehingga meningkatkan volume limpasan permukaan.

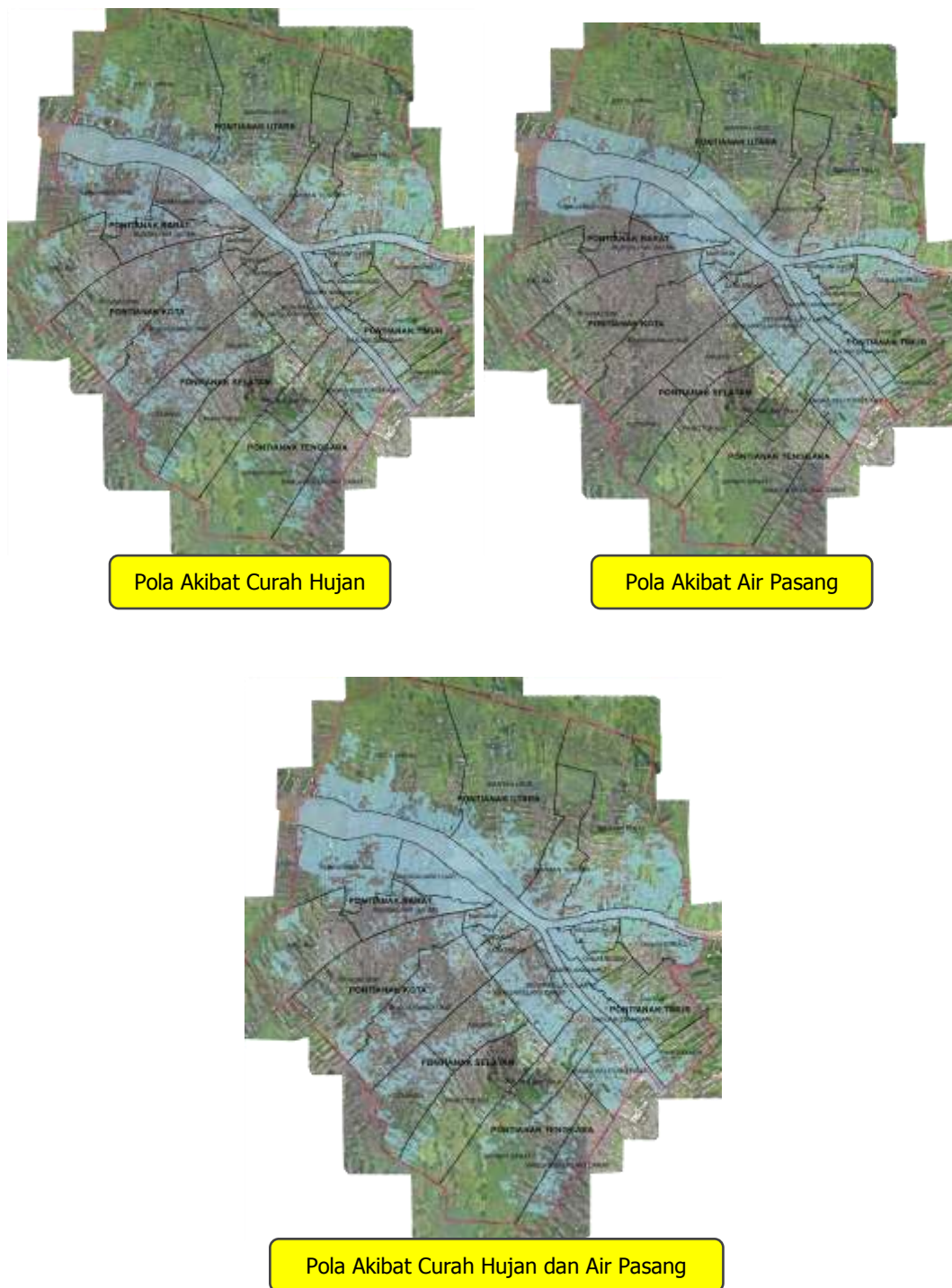
Tabel 3. 2 Luas Area Rawan Genangan Kota Pontianak

NO	KECAMATAN	LUAS AREA RAWAN GENANGAN		
		Curah Hujan (Ha)	Air Pasang (Ha)	Curah Hujan + Pasang (Ha)
1	KECAMATAN UTARA	388,09	594,92	750,15
2	KECAMATAN BARAT	373,00	497,77	646,97
3	KECAMATAN SELATAN	282,58	292,63	433,92
4	KECAMATAN TIMUR	187,95	311,79	424,56
5	KECAMATAN KOTA	380,37	154,91	383,13
6	KECAMATAN TENGGARA	355,83	214,43	374,56

Sumber Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025

BUKU II – LAPORAN UTAMA

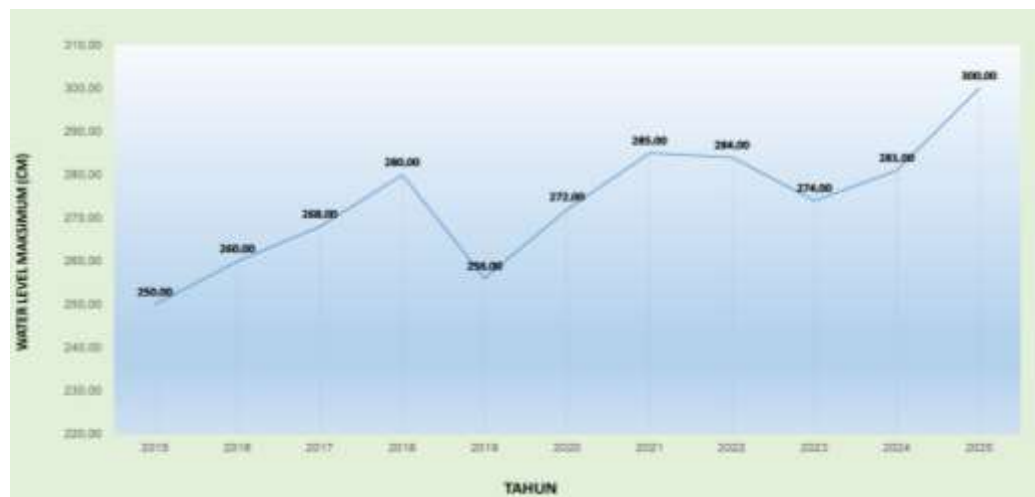
DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2026



Gambar 3. 1 Peta Pola Genangan di Kota Pontianak

BUKU II – LAPORAN UTAMA
DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)
KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

TAHUN	WATER LEVEL MAKSIMUM (CM)												RATA-RATA	MAX
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC		
2015	246	230	204	212	220	232	222	223	206	220	240	250	225,42	250,00
2016	250	260	217	217	230	240	240	247	230	250	242	248	239,25	260,00
2017	248	238	219	225	246	240	238	234	226	242	252	268	239,50	268,00
2018	257	250	232	226	232	254	224	230	228	242	248	280	241,92	280,00
2019	256	246	239	226	232	237	241	240	232	241	245	250	240,42	256,00
2020	254	250	234	240	238	246	250	246	240	262	262	272	249,50	272,00
2021	274	248	236	240	255	254	268	252	250	248	262	285	256,00	285,00
2022	270	258	250	250	256	260	256	260	262	272	264	284	261,83	284,00
2023	274	266	250	238	254	250	262	245	238	246	270	264	254,75	274,00
2024	276	262	252	238	254	240	252	250	276	256	274	281	259,25	281,00
2025	280	258	250	258	273	254	250	252	253	260	278	300	263,83	300,00
MAX	280	266	252	258	273	260	268	260	276	272	278	300		
% BANJIR	75,00%	58,33%	33,33%	16,67%	41,67%	41,67%	50,00%	33,33%	25,00%	41,67%	58,33%	83,33%		



Gambar 3. 3 *Water Level Meter* Tahun 2025



data dari *peil scale* di Kota Pontianak pada tanggal 7 Desember 2025 menunjukkan ketinggian mencapai **2,7 meter**, sedangkan pada tanggal 8 desember 2025 muka air melebihi skala *peil scale* (>3 m)

Gambar 3. 2 Pengukuran Ketinggian Muka Air dengan *Peil Scale*

b. Tekanan dan Faktor Penyebab Genangan

Genangan air di Kota Pontianak merupakan permasalahan lingkungan perkotaan yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan karakteristik fisik wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika hidrologi serta tingkat pengelolaan infrastruktur drainase. Secara umum, genangan dapat terjadi akibat curah hujan, pasang surut air sungai, maupun interaksi keduanya yang saling memperkuat dampaknya terhadap sistem drainase perkotaan. Adapun penyebab genangan di Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Topografi

Kota Pontianak berada pada dataran rendah dengan kemiringan sangat kecil sehingga aliran air berlangsung lambat dan mudah tertahan di permukaan. Kemiringan lahan yang rendah menyebabkan aliran air berlangsung lambat, sehingga air hujan cenderung tertahan pada area tertentu sebelum dapat mengalir ke saluran pembuangan atau badan air penerima.

2. Pasang Surut Sungai

Pada saat pasang, muka air Sungai Kapuas dan Sungai Landak meningkat hingga menghambat aliran drainase, bahkan dapat menyebabkan air balik ke daratan.

3. Curah Hujan

Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat berpotensi meningkatkan volume limpasan permukaan secara signifikan. Tingginya limpasan permukaan yang sering melebihi kapasitas saluran, dapat menimbulkan genangan.

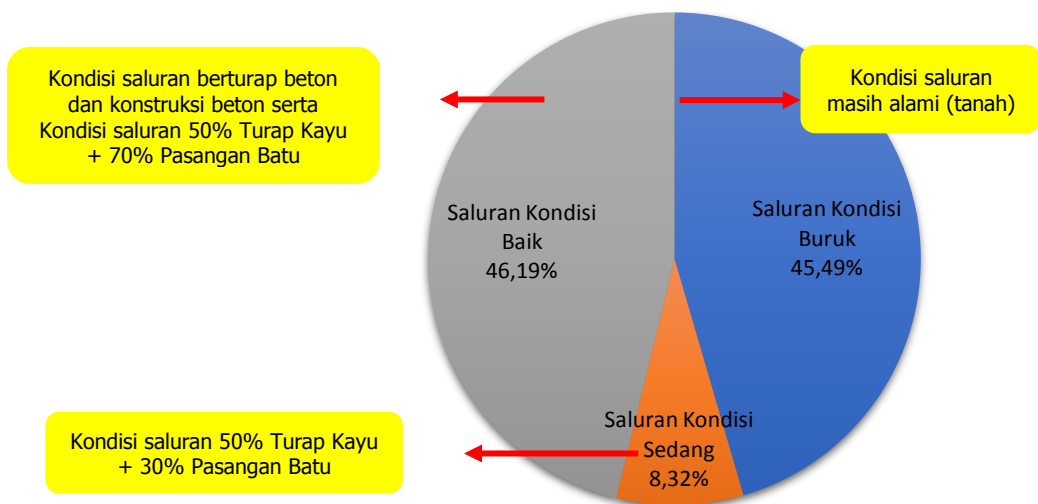
4. Faktor Antropogenik

Dari aspek aktivitas manusia, perkembangan kawasan terbangun menjadi faktor yang cukup dominan. Peningkatan luas permukaan kedap air, seperti jalan, permukiman, dan fasilitas perkotaan lainnya,

mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Hal ini menyebabkan peningkatan limpasan permukaan yang harus ditampung oleh sistem drainase.

5. Kondisi Saluran Drainase

Kondisi dan kapasitas infrastruktur drainase juga mempengaruhi terjadinya genangan. Saluran drainase yang belum sepenuhnya terintegrasi, kapasitas yang terbatas, serta kebutuhan pemeliharaan yang berkelanjutan dapat menghambat aliran air. Di beberapa lokasi, keberadaan sedimentasi dan sampah dalam saluran turut mengurangi efektivitas drainase dalam mengalirkan air.



Gambar 3. 4 Kondisi Saluran Drainase Kota Pontianak

c. Dampak Terhadap Aktivitas dan Lingkungan

Genangan air yang terjadi di Kota Pontianak memberikan berbagai dampak terhadap aktivitas masyarakat serta kondisi lingkungan perkotaan. Meskipun umumnya bersifat sementara, kejadian genangan tetap mempengaruhi kelancaran aktivitas dan kualitas lingkungan, terutama pada kawasan dengan intensitas kegiatan yang tinggi. Dari aspek aktivitas masyarakat, genangan air dapat mengganggu mobilitas, baik bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan. Kondisi jalan yang tergenang berpotensi memperlambat arus lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan,

khususnya pada saat curah hujan tinggi. Selain itu, genangan yang terjadi di kawasan permukiman juga dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti akses menuju tempat kerja, sekolah, maupun fasilitas umum.

Dari sisi kegiatan ekonomi, genangan air dapat berdampak pada kelancaran aktivitas perdagangan dan jasa, terutama pada kawasan pusat kegiatan ekonomi dan pasar. Kondisi ini dapat menyebabkan terganggunya distribusi barang dan jasa serta menurunnya kenyamanan pengunjung, meskipun umumnya bersifat sementara dan pulih setelah genangan surut. Sementara itu dari aspek lingkungan genangan air berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan, khususnya apabila terjadi pada area yang terdapat timbunan sampah atau saluran drainase yang kurang optimal. Genangan dapat menyebabkan penyebaran material tersuspensi serta menurunkan kualitas kebersihan lingkungan. Selain itu, genangan yang berlangsung dalam durasi tertentu dapat menimbulkan bau tidak sedap akibat proses dekomposisi bahan organik.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, genangan air dapat menjadi media berkembangnya vektor penyakit, seperti nyamuk, apabila terjadi secara berulang atau dalam durasi yang cukup lama. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Namun demikian, dampak ini dapat diminimalkan melalui pengelolaan lingkungan yang baik dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Di sisi lain, genangan juga dapat memberikan tekanan terhadap infrastruktur perkotaan, seperti jalan dan saluran drainase. Paparan air yang berulang dapat mempercepat kerusakan infrastruktur, sehingga memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif.

d. Rencana Penyelesaian

Secara umum, genangan air di Kota Pontianak bersifat temporer dan terjadi pada lokasi-lokasi tertentu dengan karakteristik spesifik, seperti kawasan permukiman padat, pusat aktivitas perkotaan, serta area dengan

sistem drainase yang memerlukan peningkatan kapasitas dan pemeliharaan. Upaya penanganan yang telah dan terus dilakukan mulai dari peningkatan infrastruktur drainase hingga pengelolaan lingkungan yang mendukung kelancaran aliran air. Berikut program yang dilakukan untuk penanganan genangan air yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sistem Drainase

Melakukan normalisasi, rehabilitasi, dan peningkatan kapasitas saluran drainase primer, sekunder, dan tersier pada kawasan rawan genangan. Kegiatan ini mencakup pengerukan sedimen, pelebaran saluran, serta perbaikan konstruksi drainase untuk memastikan kelancaran aliran air, terutama pada saat curah hujan tinggi dan kondisi pasang.



Gambar 3. 5 Kegiatan Normalisasi Parit dan Drainase



Gambar 3. 6 Kegiatan Pembangunan Turap

2. Integrasi Sistem Drainase dengan Pengelolaan Tata Ruang

Mendorong sinkronisasi antara pembangunan sistem drainase dengan rencana tata ruang wilayah, termasuk pengendalian pemanfaatan lahan

pada kawasan rawan genangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kawasan terbangun dan area resapan air. Selain itu, pelaksanaan kegiatan tersebut telah didukung oleh adanya regulasi perizinan yang ditetapkan oleh instansi berwenang, sehingga setiap pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku guna meminimalkan risiko genangan dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan.

a. Perizinan Peil Banjir untuk Pembangunan Bangunan Baru

- Perda Kota Pontianak No. 10 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung Pasal 34 Ayat 1 dan 3 tentang ketinggian (peil) bebas banjir untuk mengkaji sejauh mana dampak banjir yang diakibatkan oleh pembangunan dan ketersediaan saluran irigasi di lokasi sekitar agar aman dari banjir/genangan. Direkomendasikan agar meninggikan lantai bangunan di kawasan sekurang-kurangnya ± 40 cm dari muka jalan utama



Gambar 3. 7 Rekomendasi *Peil* Banjir Untuk Bangunan Baru

b. Izin rekomendasi jembatan

- Perencanaan dan pembangun jembatan mengikuti SNI No.1726 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Bagunan Sedang Dan Non Bagunan Sedang serta SNI Nomor 2817 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Beton Struktur Untuk Bangunan Gedung dan Non Bangunan Gedung.

- Persyaratan lain dalam membangun jembatan tidak boleh menggunakan tiang tengah sehingga tidak menghambat aliran pada saluran drainase.



Gambar 3. 8 Standar Pembangunan Jembatan

3. Peningkatan Infrastruktur Berbasis Konservasi Air

Mengembangkan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) seperti sumur resapan, biopori, dan perkerasan berpori untuk meningkatkan daya serap air ke dalam tanah. Hal ini bertujuan mengurangi limpasan permukaan (*run-off*) serta mendukung pengendalian genangan secara berkelanjutan.

4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Meningkatkan kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin saluran drainase, termasuk pembersihan sampah dan sedimentasi secara berkala. Hal ini penting untuk menjaga fungsi optimal sistem drainase dan mencegah terjadinya penyumbatan yang dapat memperparah genangan.



Gambar 3. 9 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Drainase

5. Koordinasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor serta pelibatan masyarakat dalam menjaga fungsi drainase, seperti tidak membuang sampah ke saluran air. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sistem drainase.



Gambar 3. 10 Kegiatan Bersih Parit Bersama Masyarakat

3.2 Progres Implementasi Rencana Penyelesaian Isu Prioritas

Progres implementasi rencana penyelesaian isu prioritas menggambarkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Penyajian progres ini disusun berdasarkan isu prioritas yang telah ditetapkan, sehingga memberikan gambaran keterkaitan antara

perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Evaluasi dilakukan dengan melihat capaian pelaksanaan program, efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, subbab ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaporan, tetapi juga sebagai dasar dalam perbaikan kebijakan dan program ke depan.

a. Pengelolaan Sampah Perkotaan

Upaya penanganan pengelolaan sampah perkotaan telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang diarahkan pada peningkatan layanan persampahan serta pengurangan sampah dari sumber. Pelaksanaan program meliputi peningkatan cakupan layanan pengangkutan sampah, pengembangan fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Berikut berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Peningkatan Infrastruktur – Pemerintah Kota Pontianak telah membangun beberapa Pengelolaan sampah seperti 1 Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), 2 Unit Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) berbasis pemerintah, 1 Unit Rumah Kompos dan 1 Unit Pusat Daur Ulang serta 2 Unit TPS3R yang dikelola oleh masyarakat untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- 2) Program Bank Sampah – Jumlah Bank Sampah tercatat tahun 2025 sebanyak 23 Bank Sampah (18 dalam status aktif dan 5 dalam status tidak aktif) yang tersebar di seluruh Kecamatan se-Kota Pontianak guna mendorong partisipasi masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah;
- 3) Kampanye dan Edukasi – Sosialisasi terkait pengurangan sampah plastik dan pentingnya memilah sampah telah dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat pada setiap kegiatan kesehariannya;
- 4) Kolaborasi dengan Sektor Swasta – Beberapa perusahaan telah terlibat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) yang

mendukung pengelolaan sampah, termasuk dalam pengurangan sampah plastik;

- 5) Pembinaan kepada Jasa Angkut Sampah - Pembinaan kepada Jasa Angkut Sampah yang melayani pengangkutan sampah sekaligus memilah dari sumber timbunan sampah serta melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak; dan
- 6) Membuat Aplikasi SIGITA JAS BERKERAH yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan angkutan sampah saat itu juga yang akuntabel dan terpercaya.

Secara umum, capaian implementasi menunjukkan adanya peningkatan layanan di beberapa wilayah, meskipun belum sepenuhnya merata. Program pengurangan sampah melalui pendekatan berbasis masyarakat juga mulai berkembang, namun masih memerlukan penguatan dari sisi partisipasi dan keberlanjutan. Berikut keberhasilan yang telah dicapai dalam menangani isu sampah yaitu:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat – Edukasi dan kampanye telah meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah dengan lebih baik
2. Pengurangan Sampah Plastik – Beberapa pusat perbelanjaan dan sejenisnya telah menerapkan kebijakan bebas kantong plastik dengan mengganti kemasan dengan bahan yang ramah lingkungan atau dapat digunakan ulang
3. Optimalisasi Pengelolaan Sampah disumbernya – Dengan adanya TPS3R dan program Bank Sampah, jumlah sampah yang langsung dibuang ke TPA berkurang secara bertahap
4. Kolaborasi dengan Dunia Usaha – Beberapa perusahaan telah berkontribusi dalam program Extended Producer Responsibility (EPR) untuk menangani sampah produk mereka

b. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Penanganan penurunan kualitas air permukaan di Kota Pontianak dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada penguatan pengelolaan kualitas air, pengurangan beban pencemar, serta peningkatan infrastruktur dan kesadaran masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah daerah dalam menjaga kualitas Sungai Kapuas, Sungai Landak, serta saluran air perkotaan secara berkelanjutan.

Adapun implementasi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Pemantauan Kualitas Air
Dilakukan melalui pengoperasian titik pemantauan pada lokasi strategis yang dilengkapi dengan pemantauan manual dan sistem berbasis teknologi untuk memperoleh data kualitas air secara berkala.
2. Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Air
Kegiatan penyampaian data kondisi air kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan peningkatan kewaspadaan terhadap pencemaran.
3. Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Secara Langsung di Lapangan
Dilakukan melalui kegiatan penanganan lokasi terdampak, pembersihan media tercemar, serta pengurangan sumber pencemar pada badan air.
4. Peningkatan Kepatuhan Kegiatan Usaha
Aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penataan dan Peningkatan Fungsi Saluran Air Perkotaan
Secara berkala dan berkelanjutan melakukan kegiatan normalisasi parit, penataan bantaran, serta penguatan infrastruktur pengendali aliran air.
6. Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
Berperan aktif melalui kegiatan gotong royong kebersihan saluran serta kampanye perilaku ramah lingkungan di kawasan bantaran sungai.

7. Pengembangan Sistem Sanitasi Permukiman

Telah merencanakan pembangunan secara bertahap dan peningkatan fasilitas pengolahan air limbah domestik skala kawasan.

Implementasi rencana penyelesaian isu penurunan kualitas air permukaan menunjukkan bahwa penanganan kualitas air di Kota Pontianak telah mengarah pada pendekatan yang lebih terintegrasi antara aspek teknis, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas pengendalian pencemaran air masih perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam mengurangi beban pencemar yang berasal dari limbah domestik yang tersebar di kawasan permukiman. Selain itu, diperlukan penguatan keberlanjutan program serta peningkatan efektivitas pelaksanaan agar kualitas air permukaan dapat terus membaik.

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam implementasi program antara lain keterbatasan cakupan layanan dan kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah domestik, termasuk sistem pengolahan terpusat maupun setempat. Selain itu, sistem pengendalian sumber pencemar yang belum sepenuhnya terintegrasi antar sektor juga menjadi tantangan dalam upaya menurunkan beban pencemaran secara signifikan. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah masih perlunya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, meskipun berbagai upaya pengendalian pencemaran air permukaan telah dilaksanakan dan menunjukkan arah yang positif, masih diperlukan langkah-langkah lanjutan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas infrastruktur, optimalisasi pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi rencana penyelesaian isu penurunan kualitas air permukaan di Kota Pontianak.

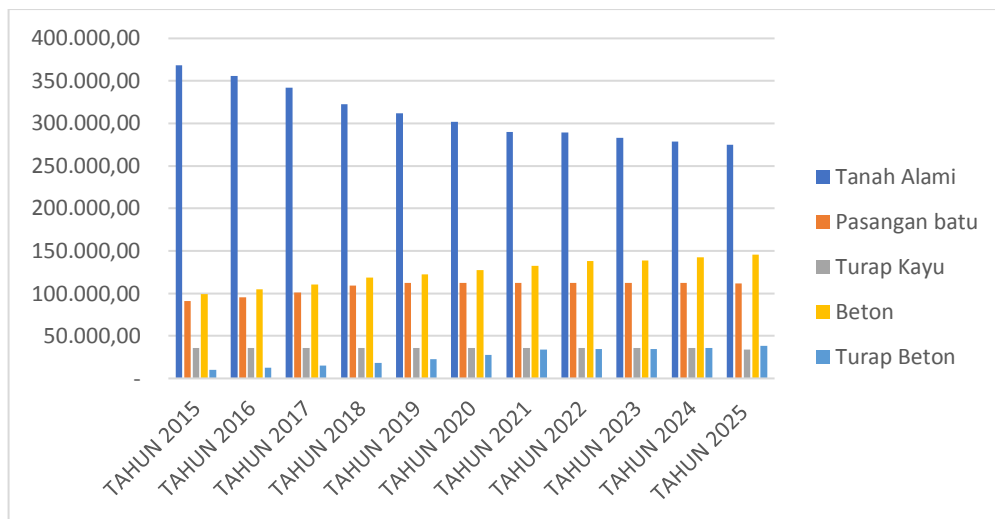
c. Genangan Air Perkotaan

Upaya penanganan genangan air di Kota Pontianak telah dilaksanakan melalui berbagai program yang bersifat struktural maupun non-struktural, antara lain peningkatan dan rehabilitasi sistem drainase, pemeliharaan rutin saluran, normalisasi parit, serta penanganan titik-titik genangan yang teridentifikasi. Selain itu, kegiatan pengendalian juga mencakup pembersihan sedimentasi dan sampah pada saluran drainase, serta peningkatan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan sistem tata air perkotaan. Sebagai bentuk implementasi peningkatan infrastruktur drainase, berikut disajikan data saluran drainase yang telah terbangun beserta implementasi kegiatan penanganan genangan air di Kota Pontianak.

Tabel 3. 3 Data Saluran Terbangun Kota Pontianak

NO	TAHUN ANGGARAN	KONSTRUKSI					PANJANG KONTRUKSI TERBANGUN	PERSENTASE PANJANG KONST SALURAN	PROSENTASE PERTAMBAHAN PANJANG (%)
		TANAH	PASANGAN	TURAP KAYU	BETON	TURAP BETON			
3	TAHUN 2015	368.240,42	91.094,50	36.130,00	99.052,63	10.287,45	236.564,58	39,11	0,86
4	TAHUN 2016	355.917,10	95.154,50	36.130,00	105.129,63	12.473,77	248.889,90	41,15	2,04
5	TAHUN 2017	342.233,10	100.791,50	36.130,00	110.562,63	15.087,77	262.571,90	43,41	2,26
6	TAHUN 2018	322.825,10	109.011,50	36.130,00	118.458,63	18.379,77	281.979,90	46,62	3,21
7	TAHUN 2019	311.627,80	112.077,50	36.130,00	122.337,23	22.632,47	293.177,20	48,47	1,85
8	TAHUN 2020	301.658,47	112.077,50	36.130,00	127.234,63	27.704,40	303.146,53	50,12	1,65
9	TAHUN 2021	289.970,72	112.077,50	36.130,00	132.599,93	34.026,85	314.834,28	52,06	1,93
10	TAHUN 2022	289.152,49	112.077,50	36.130,00	138.273,72	34.472,08	320.953,30	53,07	1,01
11	TAHUN 2023	282.968,39	112.077,50	36.130,00	139.036,22	34.592,89	321.836,61	53,21	0,14
12	TAHUN 2024	278.452,63	112.077,50	36.130,00	142.608,56	35.536,31	326.352,37	53,96	0,75
13	TAHUN 2025	275.095,64	111.694,10	33.683,50	145.802,20	38.529,56	329.709,36	54,51	0,55

Sumber: Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025



Gambar 3. 11 Grafik Data Saluran Drainase Terbangun Kota Pontianak

Sumber Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025



Gambar 3. 12 Kondisi Saluran Drainase Sebelum Pemeliharaan dan Setelah Pemeliharaan

Sumber Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025



Gambar 3. 13 Kondisi Saluran/Parit Sebelum Normalisasi dan Setelah Normalisasi

Sumber Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025



Gambar 3. 14 Kondisi Saluran/Parit Sebelum Normalisasi dan Setelah Normalisasi

Sumber Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025



Gambar 3. 15 Operasional Pompa dan Pintu Air Saat Curah Hujan Meningkat

Sumber Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025



Gambar 3. 16 Pembangunan Turap dan Sheet Pile Mini Untuk Penanganan Jangka Panjang

Sumber Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025

Pelaksanaan berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang positif yang ditandai dengan berkurangnya intensitas genangan pada beberapa lokasi prioritas serta meningkatnya kelancaran aliran air pada sistem drainase yang telah ditingkatkan. Perbaikan ini memberikan dampak terhadap meningkatnya kenyamanan lingkungan dan kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya pada kawasan yang sebelumnya sering terdampak genangan. Namun demikian, secara umum genangan air masih terjadi pada kondisi tertentu terutama pada saat curah hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang relatif singkat.

Adapun kendala dalam penanganan genangan air lebih berkaitan dengan aspek pengelolaan dan kinerja sistem drainase. Jaringan drainase yang belum sepenuhnya terhubung secara menyeluruh menyebabkan aliran air pada beberapa kawasan belum dapat mengalir secara optimal menuju badan air penerima. Selain itu, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan saluran, seperti pembersihan rutin dan pengendalian sedimentasi, masih perlu ditingkatkan agar kapasitas efektif saluran tetap terjaga. Dari sisi perencanaan, integrasi antara pembangunan sistem drainase dan pengendalian pemanfaatan ruang belum sepenuhnya berjalan konsisten, sehingga perkembangan kawasan terbangun belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan infrastruktur drainase yang memadai. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air masih perlu diperkuat guna mendukung keberlanjutan fungsi drainase di tingkat lingkungan. Adapun implementasi dari kegiatan penanganan genangan air di Kota Pontianak dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Dengan demikian, meskipun berbagai upaya penanganan genangan air telah dilaksanakan dan menunjukkan hasil yang cukup positif, masih diperlukan langkah-langkah lanjutan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas dan integrasi sistem drainase, pengelolaan limpasan berbasis lingkungan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam

menjaga kebersihan saluran air menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengendalian genangan air di Kota Pontianak ke depan.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap progres implementasi rencana penyelesaian isu prioritas sebagaimana diuraikan pada **Subbab 3.2**, diperlukan upaya penguatan melalui pengembangan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Inovasi menjadi salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan lingkungan, khususnya dalam menjawab keterbatasan sumber daya, kompleksitas permasalahan, serta dinamika perkembangan wilayah perkotaan.

3.3 Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya pembaruan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Inovasi tidak hanya mencakup penerapan teknologi baru, tetapi juga pengembangan pendekatan, sistem, maupun model pengelolaan yang memberikan nilai tambah dibandingkan praktik sebelumnya. Pengembangan inovasi juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Berikut diuraikan inovasi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani isu lingkungan di Kota Pontianak.

a. Pengelolaan Sampah Perkotaan

Inovasi dalam pengelolaan sampah perkotaan diarahkan pada penguatan sistem pengelolaan yang lebih modern dan partisipatif. Salah satu bentuk inovasi yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan sampah, seperti pengembangan sistem pelaporan dan layanan pengangkutan sampah berbasis digital. Selain itu, penguatan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pengembangan bank sampah juga menjadi

bagian dari inovasi yang memberikan nilai tambah, baik dari aspek pengurangan timbulan sampah maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

GALAH BUNG SAM (Gerakan Memilah dan Menabung Sampah) di Sekolah

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pontianak masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, khususnya pada lingkungan sekolah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, volume timbulan sampah menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, sementara tingkat pemilahan dan daur ulang sampah masih belum optimal dan belum mencapai target pengurangan sampah yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih terarah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, termasuk pada sektor pendidikan.

Sebagai salah satu tempat strategis dalam pembentukan karakter, sekolah belum sepenuhnya mampu menanamkan kebiasaan memilah dan mengelola sampah secara konsisten. Hal ini berdampak pada kondisi lingkungan sekolah yang kurang optimal dari segi kebersihan dan estetika, serta mencerminkan masih rendahnya kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan. Di samping itu, pemahaman mengenai nilai ekonomis sampah juga masih terbatas, sehingga perilaku konsumtif terhadap sumber daya masih cenderung terjadi.

Sebelum diterapkannya inovasi Galah Bung Sam, kegiatan pemilahan sampah di lingkungan sekolah masih bersifat sporadis dan belum didukung oleh sistem yang terstruktur, seperti mekanisme tabungan sampah maupun pemberian insentif. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pengelolaan sampah belum berjalan secara berkelanjutan dan belum memberikan dampak yang signifikan.

Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, terdapat potensi bahwa generasi muda akan tumbuh tanpa kesadaran ekologis yang memadai, serta peluang pengembangan ekonomi sirkular berbasis sampah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, inovasi Galah Bung Sam (Gerakan Memilah dan Menabung Sampah di Sekolah) mulai diimplementasikan sebagai upaya untuk mengintegrasikan edukasi lingkungan, sistem tabungan sampah, serta mendorong partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak dini.

Memilah Sampah Menabung Emas

Program Memilah Sampah Menabung Emas merupakan salah satu inovasi yang diinisiasi oleh Pegadaian melalui program "*The Gade Clean and Gold*". Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan memberikan insentif berupa tabungan emas atas sampah yang telah dipilah dan disetorkan. Melalui pendekatan ekonomi sirkular, program ini mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap sampah, dari yang semula dianggap tidak bernilai menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diakumulasi dalam bentuk logam mulia. Selain itu, program ini juga sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek kesehatan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program Memilah Sampah Menabung Emas di Kota Pontianak dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, masyarakat mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomi, seperti plastik, kertas, dan logam, dengan memperhatikan kondisi sampah yang bersih dan kering agar dapat diterima. Kedua, sampah yang telah dipilah kemudian disetorkan ke lokasi penukaran, seperti Bank Sampah atau kantor Pegadaian terdekat, untuk dilakukan penimbangan dan penilaian berdasarkan jenis serta beratnya. Ketiga, nilai ekonomis dari sampah tersebut selanjutnya

dikonversi menjadi saldo dalam tabungan emas Pegadaian, yang dapat terus ditambah secara berkala sesuai dengan jumlah setoran sampah.

Melalui implementasi program ini, Kota Pontianak tidak hanya memperoleh manfaat dalam bentuk peningkatan kebersihan lingkungan, tetapi juga menghadirkan solusi ekonomi mikro yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Peran Pegadaian sebagai inisiator menunjukkan bahwa lembaga keuangan memiliki kontribusi strategis dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih berkelanjutan dan produktif.

Adapun manfaat yang dihasilkan dari program ini antara lain berkurangnya pencemaran lingkungan melalui pengurangan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); meningkatnya potensi pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber nilai ekonomi dalam bentuk tabungan emas yang memiliki peluang peningkatan nilai; serta tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan melalui kebiasaan memilah dan mengelola sampah secara bertanggung jawab.

Si Gita Jas Berkerah

Aplikasi SIGITA JAS BERKERAH (Sistem Digital Layanan Angkutan Sampah Jasa Berbasis Kemitraan dan Ramah Lingkungan) merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Inovasi ini hadir sebagai respons terhadap berbagai kendala dalam layanan pengangkutan sampah yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, belum merata, serta memiliki keterbatasan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta mempermudah proses pelaporan dan pemantauan kegiatan pengelolaan sampah.

Melalui SIGITA JAS BERKERAH, masyarakat diberikan kemudahan dalam mengakses layanan pengangkutan sampah secara real-time dan

berbasis permintaan. Pengguna dapat mengajukan permintaan layanan secara langsung dari lokasi masing-masing, baik dari rumah tangga, pelaku usaha, maupun kegiatan masyarakat lainnya, tanpa harus bergantung pada jadwal pengangkutan rutin. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menentukan jenis sampah yang akan diangkut, menginput lokasi melalui sistem GPS, serta memilih waktu layanan sesuai kebutuhan.

Fitur yang tersedia dalam aplikasi ini meliputi layanan permintaan pengangkutan sampah, pengaturan jadwal dan rute petugas, pemantauan status layanan, serta fasilitas pelaporan dan pengaduan dari masyarakat. Tidak hanya itu, SIGITA JAS BERKERAH juga menjadi sarana pelaporan bagi pelaku jasa angkutan sampah swasta yang telah bermitra dan dibina oleh DLH Kota Pontianak. Melalui aplikasi ini, mereka dapat menyampaikan data terkait volume, jenis, serta sumber sampah yang diangkut, yang selanjutnya dihimpun dan dianalisis sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan berbasis data oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, aplikasi ini berperan dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kemudahan akses terhadap layanan pengelolaan sampah yang ditawarkan turut memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih transparan, akuntabel, dan berwawasan lingkungan. Ke depan, SIGITA JAS BERKERAH diharapkan menjadi pilar utama dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi di Kota Pontianak.

Kebijakan Penanganan

Pemerintah Kota Pontianak telah menerapkan beberapa kebijakan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, diantaranya:

1. Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik – Kebijakan ini mewajibkan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik

2. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah – Kebijakan ini mewajibkan masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya dan telah diterapkan secara bertahap melalui sosialisasi dan pengawasan
3. Surat Edaran Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha – Melalui Surat Edaran, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, dilarang untuk menyediakan kantong plastik
4. Pengembangan Bank Sampah – Hingga saat ini, bank sampah telah berkembang di berbagai kelurahan dan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kembali sampah
5. Rencana Alih Fungsi TPA Batu Layang menjadi TPST dalam Program LSDP – Pemerintah sedang mengikuti Program LSDP dalam peningkatan pengelolaan sampah di Kota Pontianak yang rencana akan mulai di bangun pada Tahun 2026.

b. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Inovasi dalam pengendalian pencemaran air permukaan difokuskan pada penguatan sistem pengelolaan limbah yang lebih terintegrasi serta peningkatan efektivitas pengawasan kualitas air. Salah satu pendekatan inovatif yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan sistem pemantauan kualitas air secara berkala berbasis teknologi, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik berbasis kawasan juga menjadi bagian dari inovasi yang bertujuan untuk mengurangi beban pencemar secara signifikan. Berikut diuraikan inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air.

SIPEKA (Sistem Pemantauan Air)

Dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup serta keberlanjutan sumber daya air, Pemerintah Kota Pontianak mengembangkan inovasi digital berupa SIPEKA (Sistem Pemantauan Air). Sistem ini dirancang untuk melakukan pemantauan kualitas air secara real-time dengan memanfaatkan teknologi sensor yang terintegrasi dalam jaringan data dan ditempatkan pada berbagai titik strategis, seperti sungai, danau, serta badan air lainnya di wilayah kota.

SIPEKA dilengkapi dengan sensor pintar yang mampu mengukur berbagai parameter penting kualitas air, antara lain suhu, tingkat keasaman (pH), oksigen terlarut, kekeruhan, serta konduktivitas. Data yang diperoleh dari sensor tersebut secara otomatis dikirimkan ke pusat pengolahan data untuk dianalisis, kemudian disajikan melalui platform berbasis web yang dapat diakses secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat, kalangan akademisi, maupun pemangku kebijakan dapat memperoleh informasi yang akurat, terkini, dan transparan terkait kondisi kualitas air.

Adapun manfaat dari penerapan inovasi SIPEKA antara lain mendukung peningkatan kualitas air melalui deteksi dini terhadap potensi pencemaran, sehingga memungkinkan dilakukannya langkah penanganan secara cepat dan tepat. Selain itu, sistem ini juga berkontribusi dalam menurunkan risiko gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh air tercemar, dengan menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar tindakan pencegahan.

Lebih lanjut, SIPEKA berperan dalam melindungi ekosistem perairan dengan memastikan pemantauan kondisi lingkungan secara berkelanjutan, sehingga keseimbangan habitat flora dan fauna air tetap terjaga. Dari sisi pengelolaan sumber daya, data yang dihasilkan menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pengelolaan air yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui implementasi SIPEKA, Kota Pontianak menunjukkan komitmen dalam mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dengan upaya pelestarian lingkungan. Inisiatif ini menjadi contoh nyata bahwa transformasi digital dapat dimanfaatkan secara strategis tidak hanya dalam peningkatan layanan publik, tetapi juga dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta meningkatkan ketahanan kota terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim.

Kebijakan Penanganan

Kebijakan penanganan kualitas air permukaan di Kota Pontianak diarahkan pada upaya pengendalian pencemaran air secara terpadu dan berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan pada pengendalian sumber pencemar, peningkatan pengelolaan air limbah, serta perlindungan badan air sebagai sumber daya penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya pada Sungai Kapuas. Selain itu, kebijakan juga difokuskan pada penguatan pemantauan kualitas air, peningkatan kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan perairan. Beberapa kebijakan dalam upaya pengendalian pencemaran air, diantaranya:

1. Pengelolaan Air Limbah & Pengendalian Pencemaran

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air, serta pengawasan ketat terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, sebagai langkah konkret Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah meluncurkan pilot project Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di wilayah Benua Melayu Laut dan Sungai Beliang guna mencegah pencemaran lebih lanjut.

2. Pemantauan Kualitas Air Secara Berkala

Pemantauan kualitas air permukaan dilakukan pada 3 sungai yang menjadi wilayah administrasi Kota Pontianak yaitu Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Adapun total titik pemantauan

kualitas air permukaan pada Sungai Kapuas dilakukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) titik pantau

3. Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Pemerintah daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan perairan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, serta

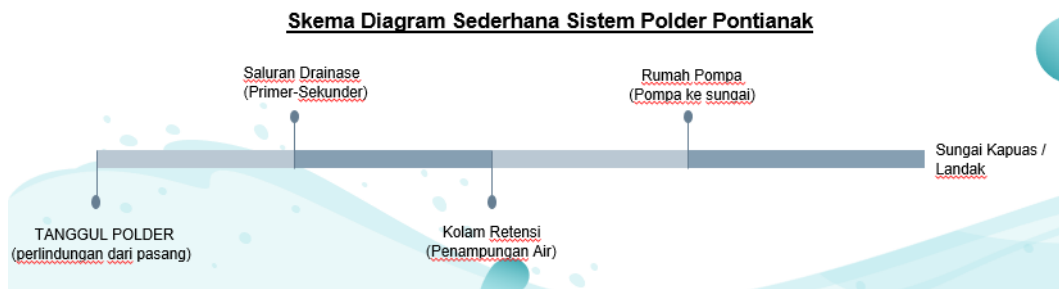
c. Genangan Air Perkotaan

Dalam rangka penanganan genangan air perkotaan, Pemerintah Kota Pontianak berencana mengembangkan inovasi infrastruktur adaptif melalui penerapan sistem polder. Inovasi ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang relatif datar serta dipengaruhi oleh pasang surut Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

Sistem polder merupakan sistem pengelolaan tata air terpadu yang terdiri dari jaringan drainase, kolam retensi, tanggul, serta rumah pompa. Sistem ini berfungsi menampung dan mengendalikan limpasan air hujan, serta mencegah aliran balik saat kondisi pasang, sehingga dapat mengurangi potensi genangan. Penerapan sistem polder direncanakan pada kawasan prioritas, antara lain Pontianak Utara, Pontianak Timur, Pontianak Selatan (koridor Ahmad Yani), dan Siantan. Kawasan tersebut dipilih berdasarkan tingkat kerawanan genangan, kepadatan permukiman, serta kondisi sistem drainase yang memerlukan peningkatan kapasitas.

Secara operasional, air dari saluran drainase dialirkan ke kolam retensi untuk ditampung sementara, kemudian dipompa ke sungai utama secara terkontrol. Sistem ini memungkinkan pengendalian muka air secara lebih efektif, terutama saat terjadi hujan bersamaan dengan pasang.

Penerapan sistem polder diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem drainase perkotaan serta menjadi solusi jangka panjang dalam pengendalian genangan air di Kota Pontianak.



Gambar 3. 17 Skema Rencana Sistem Polder di Kota Pontianak

Sumber: Dinas PUPR Kota Pontianak, 2025

Selain itu, upaya pemeliharaan sistem drainase dilakukan secara rutin sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi terjadinya genangan, khususnya pada musim hujan. Penumpukan material seperti daun dan sampah plastik pada saluran drainase dapat menyebabkan penyumbatan yang berdampak pada terganggunya aliran air dan memicu genangan pada titik-titik tertentu. Oleh karena itu, kegiatan pembersihan dan normalisasi saluran secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja sistem drainase. Dalam pelaksanaannya, Tim Rutin Saluran pada Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Pontianak secara konsisten melakukan kegiatan pemeliharaan saluran guna mengembalikan dan mempertahankan fungsi drainase agar tetap optimal dalam mengalirkan air, sehingga dapat meminimalisir potensi genangan di wilayah titik tertentu.

Kebijakan Penanganan

Kebijakan penanganan genangan air perkotaan di Kota Pontianak diarahkan pada upaya pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang berada pada dataran rendah serta dipengaruhi oleh kondisi pasang surut.

Berikut kebijakan dalam penanganan genangan air di Kota Pontianak yaitu:

1. Perda Kota Pontianak No. 10 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung Pasal 34 Ayat 1 dan 3 tentang ketinggian (peil) bebas banjir. Direkomendasikan agar meninggikan lantai bangunan di kawasan sekurang-kurangnya ± 40 cm dari muka jalan utama.

2. Perencanaan dan pembangun jembatan mengikuti SNI No.1726 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Bagunan Sedang dan Non Bagunan Sedang serta SNI Nomor 2817 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Beton Struktur Untuk Bangunan Gedung Dan Non Bangunan Gedung. Persyaratan lain dalam membangun jembatan tidak boleh menggunakan tiang tengah sehingga tidak menghambat aliran pada saluran drainase
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan
Kebijakan ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan pengembangan drainase yang terhubung langsung dengan badan air, termasuk pembangunan turap dan peningkatan saluran drainase.
4. Operasi dan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase
Kebijakan difokuskan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin saluran drainase melalui pembersihan sampah, pengerukan sedimen, dan normalisasi saluran. Kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk menjaga kelancaran aliran air dan mencegah terjadinya penyumbatan yang dapat menyebabkan genangan.
5. Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Drainase
Pemerintah daerah melakukan normalisasi parit dan rehabilitasi drainase sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas saluran guna mengatasi titik-titik rawan genangan.
6. Peninjauan dan Pengembangan Rencana Induk Drainase
Sebagai bagian dari kebijakan jangka menengah, pemerintah melakukan evaluasi dan peninjauan kembali rencana induk drainase kota. Hal ini bertujuan untuk memastikan sistem drainase mampu mengakomodasi kondisi eksisting, termasuk peningkatan curah hujan dan perubahan tata guna lahan.
7. Pelibatan Masyarakat melalui Program Kebersihan Lingkungan
Kebijakan juga diarahkan pada pelibatan masyarakat melalui program gotong royong untuk membersihkan saluran dan parit. Upaya ini

BUKU II – LAPORAN UTAMA

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)
KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta menjaga fungsi drainase agar tetap optimal dalam mengalirkan air.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

Bab ini menyajikan arah tindak lanjut sebagai respons terhadap isu prioritas lingkungan hidup Kota Pontianak yang telah diidentifikasi dan dianalisis pada Bab III. Perumusan rencana ini tidak hanya didasarkan pada kondisi eksisting, tetapi juga mempertimbangkan capaian pelaksanaan program yang telah berjalan beserta berbagai keterbatasan yang masih dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Rencana tindak lanjut disusun untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi aktual, khususnya pada aspek penanganan isu prioritas yang masih memerlukan penguatan. Pendekatan yang digunakan diarahkan pada upaya yang lebih operasional, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dalam penyusunannya, rencana ini memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah, keterkaitan antar sektor, serta kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan pembiayaan. Selain itu, perumusan rencana juga mengintegrasikan indikator kinerja, target waktu pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, rencana tindak lanjut yang dirumuskan diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen pengarah dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, rencana tindak lanjut diuraikan berdasarkan masing-masing isu prioritas lingkungan hidup.

1. Pengelolaan Sampah Perkotaan

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan salah satu aspek strategis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta kenyamanan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang terencana, terarah, dan berkelanjutan guna mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Sehubungan dengan hal tersebut, rencana tindak lanjut dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi
 - a. Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pontianak mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik
 - b. Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sampah, termasuk koordinasi antar instansi, pelaku usaha, dan produsen sampah lainnya
 - c. Perencanaan dan pengadaan sistem pengangkutan sampah berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi
2. Rencana dan Peningkatan Infrastruktur serta Penguatan Partisipasi Masyarakat
 - a. Perencanaan pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) di tingkat Kelurahan dan/atau Kecamatan
 - b. Perbaikan dan penataan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah menuju *Control Landfill / Sanitary Landfill*
 - c. Kegiatan penambahan luasan tutupan menggunakan lapisan *Geotextille/Geomembran* hingga 75% dari total luasan sel aktif sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku pada TPA Batu Layang
 - d. Pembangunan fasilitas pengolahan gas metana di TPA Batu Layang
 - e. Perencanaan pembuatan jalan, titik bongkar dan lokasi timbunan sampah dengan menggunakan sistem *Sanitary Landfill* di lokasi sel baru dalam zona aktif yang ada di TPA Batu Layang

- f. Penyempurnaan dan pematangan perencanaan pembangunan alih fungsi TPA menjadi TPST Batu Layang sebagai pusat pengolahan dan daur ulang sampah
- g. Sosialisasi Skema *Extended Producer Responsibility* (EPR) di Tingkat pelaku usaha terhadap pengelolaan sampah
- h. Sosialisasi restoran besar menerapkan sistem *refill* dan *reusable packaging*
- i. Sosialisasi Aplikasi SI GITA JAS BERKERAH (Sistem Digital Jasa Angkutan Sampah dari Sumber yang Keren dan Ramah) kepada kelompok Jasa Angkutan Sampah (JAS) dan Masyarakat
- j. Peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Kelompok, Lembaga yang bergerak di bidang Lingkungan
- k. Pembinaan terhadap JAS yang beroperasi di seluruh wilayah Kota Pontianak
- l. Kampanye dan sosialisasi melalui media massa dan digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah

2. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas air permukaan di Kota Pontianak, diperlukan langkah tindak lanjut yang disusun secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan mengedepankan pendekatan teknis, kelembagaan, serta partisipatif. Upaya ini diarahkan untuk mengurangi beban pencemar yang berasal dari limbah domestik maupun non-domestik, meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan air limbah, serta memperkuat pengawasan, pengendalian, dan penegakan regulasi di bidang lingkungan hidup. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan kualitas air permukaan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, rencana tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan kualitas air permukaan di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang terdiri dari:
 - a. Kegiatan pemantauan terhadap kualitas air permukaan secara manual dan menggunakan alat pemantauan air (WQMS dan Onimo)
 - b. Aksi Jumat Bersih yaitu kegiatan bersih parit yang melibatkan OPD, Masyarakat, dan Pelaku Usaha
2. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat melalui aplikasi SIPEKA (Sistem Pemantauan Kualitas Air) yang memuat data hasil pemantauan kualitas air permukaan
3. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada media tanah dan air
4. Melakukan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berupa penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar dan pemulihan lingkungan terkontaminasi LB3
5. Memberikan pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan berupa pengawasan, pembinaan, dan labelisasi kegiatan usaha

3. Genangan Air Perkotaan

Dalam rangka mengurangi dan mengendalikan genangan air di Kota Pontianak, diperlukan langkah tindak lanjut yang disusun secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui pendekatan teknis serta penataan ruang. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja sistem drainase, mengendalikan limpasan air hujan, serta memperbaiki pengelolaan tata air perkotaan secara menyeluruh, efektif, dan berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur drainase melalui rehabilitasi, normalisasi, serta pembangunan saluran drainase terutama pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan jaringan
2. Pembersihan sedimentasi, pengangkatan sampah pada saluran primer–sekunder–tersier, serta perbaikan titik-titik penyempitan aliran yang berpotensi menimbulkan genangan
3. Melakukan perkuatan tebing pada saluran primer, peningkatan kapasitas dan fungsi drainase perkotaan pada saluran sekunder, serta penataan dan pengembangan saluran drainase lingkungan pada saluran tersier
4. Pemangkasan vegetasi baik rumput maupun gulma di sekitar saluran drainase yang menghambat aliran air
5. Pengecekan dan pembersihan inlet/outlet drainase di jalan dengan *cap combi*, terutama di area rawan genangan pada saat air pasang
6. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan perkuatan tebing (Turap) dan pembangunan sistem drainase perkotaan
7. Penguatan sistem pemeliharaan dan pengawasan drainase secara rutin agar fungsi saluran tetap optimal
8. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemetaan titik genangan skala kelurahan dan pemantauan kondisi drainase

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

a. Pengelolaan Sampah Perkotaan

Pengelolaan sampah perkotaan di Kota Pontianak menunjukkan adanya potensi yang besar untuk terus ditingkatkan dalam rangka mendukung kualitas lingkungan yang lebih baik. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) yang pada Semester I Tahun 2025 sebesar 42,9, sehingga menjadi dasar penting untuk dilakukan penguatan kinerja secara berkelanjutan. Di sisi lain, berbagai upaya pengurangan sampah telah dilaksanakan melalui keberadaan 16 unit Bank Sampah Unit, 1 unit Bank Sampah Induk, 2 unit TPS3R, 12 unit Pusat Olah Organik (POO), serta 43 unit pengepul/lapak yang secara aktif berkontribusi dalam pengelolaan sampah.

Dari keseluruhan fasilitas tersebut, pengelolaan sampah terbesar saat ini didukung oleh peran pengepul/lapak dengan kapasitas 97,909 ton/hari atau 35.736,727 ton/tahun, diikuti oleh POO sebesar 1,233 ton/hari atau 449,939 ton/tahun, Bank Sampah Unit sebesar 0,331 ton/hari atau 120,668 ton/tahun, Bank Sampah Induk sebesar 0,216 ton/hari atau 78,796 ton/tahun, serta TPS3R sebesar 0,219 ton/hari atau 79,931 ton/tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Pontianak telah berjalan dan memiliki fondasi yang cukup baik, sehingga ke depan dapat terus dioptimalkan melalui penguatan pada aspek pengurangan di sumber, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan secara terpadu dan berkelanjutan.

b. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Kualitas air permukaan di Kota Pontianak menunjukkan adanya peluang yang besar untuk terus ditingkatkan melalui pengelolaan yang lebih optimal dan berkelanjutan, khususnya pada Sungai Kapuas dan Sungai

Landak sebagai badan air utama yang dipengaruhi oleh aktivitas perkotaan. Hal ini tercermin dari Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Pontianak selama tahun 2021–2025 yang berada pada kategori sedang, dengan nilai 56,05 pada tahun 2021, 59,84 pada tahun 2022, 51,4 pada tahun 2023, 54,91 pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 72,67 pada tahun 2025. Peningkatan pada tahun 2025 tersebut menjadi indikator positif yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas air serta efektivitas upaya pengelolaan yang telah dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kualitas air di Kota Pontianak telah berjalan dan memiliki dasar yang kuat untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya ke depan dapat difokuskan pada penguatan pengurangan beban pencemar, peningkatan sanitasi, optimalisasi pengolahan air limbah, serta pelaksanaan pemantauan kualitas air secara berkala dan berkesinambungan guna mewujudkan kualitas air yang lebih baik dan berkelanjutan.

c. Genangan Air Perkotaan

Kondisi genangan air perkotaan di Kota Pontianak menunjukkan adanya potensi yang dapat terus dikelola dan ditingkatkan melalui penanganan yang lebih terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik fisik wilayah sebagai dataran rendah. Secara topografis, Kota Pontianak memiliki ketinggian wilayah sekitar 0,1–1,5 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lahan umumnya kurang dari 2%, sehingga memberikan dasar penting dalam perencanaan sistem drainase yang adaptif. Pada kondisi tertentu, tinggi muka air dapat mencapai sekitar 50 cm dari permukaan tanah, yang menjadi acuan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan tata air.

Selain itu, pengaruh pasang surut yang cukup signifikan dengan pasang tertinggi mencapai 2,42 meter dan muka laut rata-rata maksimum sekitar 0,89 meter, serta kondisi curah hujan yang relatif tinggi hingga 443,90 mm/bulan menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan sistem pengendalian genangan. Di sisi lain, perkembangan

kawasan terbangun juga memberikan peluang untuk penerapan konsep drainase berkelanjutan guna meningkatkan daya resap air.

Genangan yang terjadi pada umumnya bersifat temporer dan terlokalisir, terutama pada kawasan permukiman padat dan pusat aktivitas kota sehingga penanganannya dapat difokuskan secara lebih spesifik dan efektif. Berbagai upaya telah dilaksanakan, seperti pembangunan turap, program sanitasi berbasis masyarakat, sosialisasi di bantaran sungai, serta normalisasi parit dan sungai yang menunjukkan komitmen dalam pengelolaan genangan. Upaya-upaya tersebut telah memberikan hasil positif dalam mengurangi jumlah dan luas titik genangan di beberapa wilayah, sehingga dapat dinyatakan berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan tata air perkotaan.

5.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pontianak secara menyeluruh, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keterkaitan antara pengelolaan persampahan, kualitas air permukaan, dan penanganan genangan air perkotaan. Upaya ini diarahkan untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas layanan dasar perkotaan, serta mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penguatan pengelolaan sampah melalui peningkatan pengurangan sampah dari sumber, optimalisasi pemilahan, serta peningkatan efektivitas sistem pengangkutan dan pengolahan sampah secara terpadu dan berkelanjutan
2. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas serta pemerataan fasilitas pengelolaan sampah, meliputi Bank Sampah, TPS3R, dan Pusat Olah

- Organik (POO), guna mendukung pengurangan beban sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
3. Meningkatkan pengendalian pencemaran air permukaan melalui penguatan pengelolaan air limbah domestik dan non-domestik serta pengawasan terhadap pembuangan limbah ke badan air
 4. Melaksanakan pemantauan kualitas air permukaan secara berkala dan berkesinambungan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
 5. Meningkatkan kapasitas dan kinerja sistem drainase perkotaan melalui perbaikan, normalisasi, dan pengembangan jaringan drainase secara terintegrasi
 6. Melaksanakan pengendalian limpasan air hujan melalui penerapan konsep drainase berkelanjutan serta penataan tata air perkotaan yang adaptif terhadap kondisi pasang surut dan curah hujan
 7. Mengoptimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai area resapan air guna mendukung pengurangan genangan dan peningkatan kualitas lingkungan
 8. Meningkatkan sinergi antara pengelolaan persampahan, air limbah, dan sistem drainase untuk mengurangi tekanan terhadap badan air dan meminimalkan potensi genangan
 9. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan melalui edukasi, sosialisasi, dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, perlindungan kualitas air, dan penanganan genangan air
 10. Memperkuat koordinasi lintas sektor dan kelembagaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan di Kota Pontianak

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang
Pengelolaan Sampah di Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak 2013–2033
- Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Pontianak Tahun 2021-2041
- Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2026. Kota Pontianak dalam Angka
2026. Badan Pusat Statistik Kota Pontianak: Pontianak



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. Alianyang No. 7D Pontianak, Kalimantan Barat 78116

Telp. (0561) 8171726